



Pemerintah Kota Semarang
2020



**SEMARANG
HEBAT!**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KOTA SEMARANG
TAHUN 2019**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2020**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. SEJARAH KOTA SEMARANG	2
D. KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG	5
E. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA SEMARANG	6
F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	10
G. STRUKTUR ORGANISASI	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. VISI DAN MISI	16
B. TUJUAN DAN SASARAN	19
C. RENCANA STRATEGIS KOTA SEMARANG 2016 – 2021	20
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SEMARANG	24
E. PERJANJIAN KINERJA	25
F. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. RINGKASAN PENCAPAIAN KINERJA IKU TAHUN 2019	28
B. RINGKASAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	32
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	34
MISI I Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas	34
MISI II Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	96
MISI III Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan	118
MISI IV Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif	147
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	174
Pengelolaan Pendapatan Daerah	175
Pengelolaan Belanja Daerah	205
Pembiayaan Daerah	216
SILPA Anggaran Tahun 2019	218
BAB IV PENUTUP	222



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang undang 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Daerah wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada Pemerintah, DPRD dan Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Pemerintah Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan serta sebagai wujud transparansi atau keterbukaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah:

1. Untuk bahan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019.
2. Untuk alat ukur pelaksanaan dan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
3. Untuk bahan evaluasi pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
4. Untuk alat kendali / *controlling* bagi Kepala Daerah untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
5. Untuk bahan masukan demi perbaikan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

C. SEJARAH KOTA SEMARANG

Sejarah Kota Semarang dimulai sejak kedatangan seseorang yang berasal dari Kesultanan Demak bernama Pangeran Made Pandan bersama putranya Raden Pandan Arang, yang meninggalkan Demak menuju ke daerah Barat (daerah tersebut yang kemudian bernama Pulau Tirang). Di daerah itu Pangeran dan putranya membuka hutan dan kemudian mendirikan pesantren untuk menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu daerah itu menjadi semakin subur. Dari sela-sela kesuburan muncullah pohon - pohon asam yang jarang (**bahasa Jawa : Asem Arang**), sehingga mereka memberikan nama daerah itu menjadi **Semarang**. Sebagai pendiri daerah, kemudian beliau menjadi kepala daerah setempat dengan gelar Kyai Pandan Arang I yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II. Perkembangan daerah Semarang makin menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Akhirnya Pandan Arang II oleh Sultan Pajang melalui konsultasi dengan Sultan Kalijaga dinobatkan menjadi Bupati Semarang yang pertama.

Penobatan tersebut bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal 954 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Pada tanggal tersebut "secara adat dan politis berdirilah Kabupaten Semarang". Berdasarkan momentum itulah oleh Pemerintah Kota Semarang dengan persetujuan DPRD dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1978, maka pada setiap tanggal **2 Mei** diperingati sebagai "**Hari Jadi Kota Semarang**".

Masa pemerintahan Raden Pandan Arang II menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat dinikmati penduduknya. Kawasan Semarang pada waktu itu meliputi: Inderono (Gisik Drono), Tirang Amper, Jurang Suru, Tinjomoyo, Wotgalih, Gajah Mungkur, Sejonilo dan Gedung Batu. Sesudah Bupati Pandan Arang II lalu diganti oleh Raden Ketib, Pangeran Kanoman atau Pandan Arang III (1553-1586), kemudian disusul pengganti berikutnya yaitu Mas R. Tumenggung Tambi (1657-1659), Mas Tumenggung Wongsorejo (1659-1666), Mas Tumenggung Prawiprojo (1666-1670), Mas Tumenggung Alap-Alap (1670-1674), Kyai Mertonoyo, Kyai Tumenggung Yudonegoro atau Kyai Adipati Suromenggolo (1674-1701), Raden Martoyudo (1743-1751), Marmowijoyo atau Sumowijoyo atau Raden Martoyudo (1743-1751), Marmowijoyo atau Sumowijoyo atau Sumonegoro atau Surohadimenggolo (1751-1773), Surohadimenggolo IV (1773-1778), Adipati Surohadimenggolo V atau Kanjeng Terboyo (1778-1841), Raden Tumenggung Surohadiningrat (1841), Putro Surohadimenggolo (1841-1855), Mas Ngabehi Reksonegoro (1855-1860), RTP Suryokusumo (1860-1887), RTP Reksodirjo (1887-1891), RMTA Purbaningrat (1891-1891), Raden Cokrodipuro (1891-1927), RM Soebiyono (1897-1927), RM Amin Suyitno (1927-1942).



Pada periode 1500-1700 Masehi, Kota Semarang mulai dikenal, terutama oleh orang-orang asing yang singgah dan berdagang di pelabuhan Semarang. Status kawasan yang semula berada dibawah kekuasaan Susuhunan Surakarta akhirnya berubah mejadi daerah kekuasaan Belanda. Karena letaknya yang strategis, maka pada tahun 1678 Kota Semarang dijadikan tempat pertahanan militer dan daerah perniagaan. Kemudian untuk kepentingan politik kolonial Belanda, Kota Semarang dijadikan kota kedua setelah Batavia. Pada periode 1700-1906, Kota Semarang mulai menampakkan dirinya sebagai bentuk fisik sebuah kota. Wilayah pemukimannya semakin diperluas dengan adanya Kampung Jawa di Kaligawe, Pengapon, dan Poncol, Kampung Pecinan di sekitar Bubakan, Kampung Melayu di Melayu Darat. Peristiwa penting yang terjadi pada masa itu adalah pelantikan Kyai Adipati Surahadi menggolo ke IV menjadi Bupati Semarang ke 21 oleh pihak Belanda pada tanggal 6 Juli 1704.

Pada pertengahan abad ke 18, perkembangan Kota Semarang semakin pesat yaitu dengan tumbuhnya perkantoran-perkantoran Pemerintahan Belanda. Kantor-kantor dagang, fasilitas-fasilitas sosial dan lain-lain. Dengan demikian pemerintahan pada masa itu terdiri dari pemerintahan pribumi dan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda di dalam benteng kota yang bernama Gubernur Jenderal Jawa Utara.

Pada tahun 1864 Nederlandsch Indisch Spoorwagen (NIS), membangun jalan kereta api yang pertama kali di Indonesia, yaitu rute Semarang-Yogyakarta, dengan stasiunnya di Tambak Sari. Kemudian pada tahun 1872 telah dibangun jalan kereta api jurusan Semarang-Kedung Jati dan Solo dengan mempertimbangkan transportasi tradisional yang semakin pesat.

Pada tahun 1900, jumlah ekspor meningkat, sehingga membuat kota perdagangan Semarang menjadi semakin makmur. Jaringan kereta api ditambah yaitu jurusan Semarang-Juwana dan Semarang-Cirebon. Pada tanggal 1 April 1906 dengan Statblad Nomor 120 tahun 1906 dibentuk dan diresmikanlah Pemerintah Gemeente, yang berarti Semarang menjadi Kotapraja (Stads Gemeente Van Semarang). Sehingga sejak saat itu Kota Semarang terlepas dari Kabupaten dan memiliki batas kekuasaan Pemerintah Kotapraja. Terdapat keterangan bahwa adanya Gemeente itu maka sejak tahun 1906 Semarang dipimpin oleh dua macam Pemerintahan. Yang menyangkut Pemerintahan Bumiputra dikepalai oleh Bupati, sedang yang menyangkut pemerintah Kota Semarang dikepalai oleh Burgermeester (Walikota).

Pemerintah Kota Besar Semarang buatan Belanda ini berakhir ketika tentara Jepang menduduki Indonesia tahun 1942. Tentara Jepang membentuk Pemerintahan Daerah Semarang yang dipimpin seorang militer (Shitjo). Didampingi



dua orang wakil, seorang Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Pemerintahan dijalankan secara sentral dibawah pimpinan Kepala Daerah Karesidenan, sehingga Bupati Semarang saat itu RMAA Sukarman Mertohadinegoro (1942-1945) tidak mempunyai kedudukan atau tugas sama sekali. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak lama kemudian yaitu tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945 terjadilah peristiwa kepahlawanan pemuda-pemuda Semarang yang bertempur melawan bala tentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada pasukan Republik. Perjuangan ini dikenal dengan nama “Pertempuran Lima Hari”.

Pada tanggal 16 Mei 1946, Inggris atas nama Sekutu menyerahkan Kota Semarang kepada pihak Belanda. Pada tanggal 3 Juni 1946 dengan tipu muslihatnya, pihak Belanda menangkap Mr. Imam Sudjahri, Walikota Semarang sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda hingga pemulihan kedaulatan yaitu tanggal 27 Desember 1949 tidak ada Pemerintahan Daerah di Kota Semarang. Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pengungsian tersebut dapat berjalan hingga bulan Desember 1949, berpindah-pindah mulai dari daerah Purwodadi, Gubug, Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturut-turut dipegang oleh R. Patah, R. Prawoto Soedibyo dan Mr. Ichsan.

Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Recomba berusaha membentuk kembali pemerintahan Gemeente seperti dimasa kolonial dahulu di bawah pimpinan R. Slamet Tirtosubroto. Hal itu tidak berhasil, karena pada masa pemulihan kedaulatan harus menyerahkan kepada komandan KMKB Semarang pada bulan Februari 1950 Mayor Suhardi, Komandan KMKB menyerahkan kepemimpinan Pemerintah Daerah Semarang kepada Mr. Koesoebijono, seorang pegawai tinggi Kementrian Dalam Negeri di Yogyakarta. Beliau menyusun kembali Pemerintahan Daerah Kota Besar Semarang sampai terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

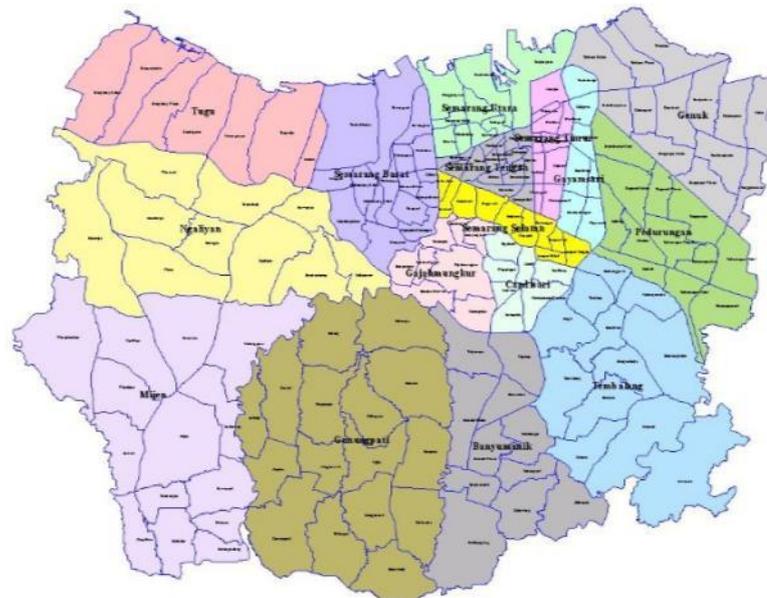
Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang, maka saat kepemimpinan Walikotamadya Kol. Hadijanto Kotamadya Semarang dimekarkan dari 5 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yaitu pada tanggal 19 Juni 1976 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dimana pemekaran tersebut sampai ke wilayah Tugu, Gunung Pati, Mijen, dan Genuk. Kemudian berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara

dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dimana secara administratif dari 9 Kecamatan yang ada di Kota Semarang diadakan penataan menjadi 16 Kecamatan.

D. KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG

1. Batas dan Luas Wilayah

Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan, dan secara geografis terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 50' - 110° 35' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² (BPS, 2019) yang dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai sepanjang 13,6 km (BPS, 2019). Kota Semarang memiliki letak yang strategis karena berada di tengah jalur utama pantai utara Jawa yang terhubung dari Jakarta sampai dengan Kota Surabaya.



Gambar 1.1
Peta Administratif Kota Semarang

Kota Semarang memiliki tipologi yang unik karena memiliki garis pantai sekaligus wilayah perbukitan, dengan rentang ketinggian antara 0,75 meter sampai dengan 348 meter di atas permukaan laut. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah

Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu:

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Candisari.
- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara) dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Semarang memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Total curah hujan di Kota Semarang di tahun 2019 mencapai 2070 mm (BMKG, 2019). Sedangkan untuk temperatur, pada tahun 2019 suhu udara rata-rata mencapai 28,1° Celcius, dengan suhu rata-rata tertinggi terjadi di bulan Oktober dan suhu rata-rata terendah di bulan Januari. Sedangkan rata-rata kelembaban udara mencapai 76,8% (BMKG, 2019).

E. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA SEMARANG

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2019 berjumlah 1.674.358 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 828.848 jiwa (49,5%) dan penduduk perempuan sejumlah 845.510 jiwa (50,5%)

dengan Kecamatan Pedurungan menjadi kecamatan dengan penduduk terbesar dan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG PER KECAMATAN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Kecamatan Semarang Selatan	68.507	4,09
2	Kecamatan Semarang Utara	130.434	7,79
3	Kecamatan Semarang Barat	157.348	9,40
4	Kecamatan Semarang Timur	72.433	4,33



NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
5	Kecamatan Semarang Tengah	62.854	3,75
6	Kecamatan Gunungpati	94.347	5,63
7	Kecamatan Tugu	33.308	1,99
8	Kecamatan Mijen	74.696	4,46
9	Kecamatan Genuk	115.058	6,87
10	Kecamatan Gajahmungkur	59.591	3,56
11	Kecamatan Tembalang	180.500	10,78
12	Kecamatan Candisari	79.385	4,74
13	Kecamatan Banyumanik	140.419	8,39
14	Kecamatan Ngaliyan	139.338	8,32
15	Kecamatan Gayamsari	73.716	4,40
16	Kecamatan Pedurungan	192.424	11,49
J U M L A H		1.674.358	100,00

Sumber Data : Dispendukcapil, Semester II 2019

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) pada semester 2 tahun 2019 sejumlah 1.183.343 jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 485.235 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*). Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebesar **41,01 %**. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASAR KELOMPOK UMUR KONDISI TAHUN 2019**

KELOMPOK UMUR	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
0 – 4	113.728	6,79
5 – 9	131.564	7,86
10 – 14	130.497	7,79
15 – 19	130.673	7,8
20 – 24	123.366	7,37
25 – 29	125.200	7,48
30 – 34	123.752	7,39
35 – 39	143.354	8,56
40 – 44	134.815	8,05
45 – 49	121.785	7,27
50 – 54	112.599	6,72
55 – 59	95.059	5,68
60 – 64	75.610	4,52
65 - 69	49.100	2,93
70 - 74	25.185	1,5
>=75	38.071	2,27
JUMLAH	1.674.358	100,00

Sumber Data : Dispendukcapil, Semester II 2019

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs

sederajat, SLTA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SLTA / sederajat sebesar 26,86 %. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 12,765 %, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 3,37 % dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 9,39 %. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

**JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASAR PENDIDIKAN TAHUN 2019**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Tidak / belum sekolah	433.219	25,87%
2	Tidak / belum tamat SD	264.772	15,81%
3	Tamat SD/MI sederajat	98.711	5,90%
4	SLTP/MTs / sederajat	210.919	12,60%
5	SLTA/MA/ sederajat	449.708	26,86%
6	Diploma I / II / III	5.294	0,32%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	51.107	3,05%
8	Diploma IV/Strata I	144.956	8,66%
9	Strata II	14.838	0,89%
10	Strata III	834	0,05%
J U M L A H		1.674.358	100,00

Sumber: Dispendukcapil, Semester I 2019)

Berdasarkan mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Kota Semarang bekerja sebagai karyawan swasta (28,40%), mengurus rumah tangga (12,83%), wiraswasta (4,68%) dan PNS/TNI/POLRI (3,01%). Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2019**

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
1	Belum/TidakBekerja	467.379	27,9139	46	Juru Masak	43	0,0026
2	Mengurus Rumah Tangga	213.531	12,7530	47	Promotor Acara	9	0,0005
3	Pelajar/Mahasiswa	247.499	14,7817	48	Anggota DPR RI	4	0,0002
4	Pensiunan	14.979	0,8946	49	Anggota DPD	2	0,0001
5	Pegawai Negeri Sipil	37.701	2,2517	50	Anggota BPK	0	0,0000
6	Tentara Nasional Indonesia	4.757	0,2841	51	Presiden	0	0,0000
7	KepolisianRI	5.655	0,3377	52	Wakil Presiden	0	0,0000
8	Perdagangan	1.075	0,0642	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0,0000
9	Petani/Pekebun	9.601	0,5734	54	Anggota Kabinet/ Kementerian	0	0,0000
10	Peternak	11	0,0007	55	Duta Besar	0	0,0000
11	Nelayan/Perikanan	1.658	0,0990	56	Gubernur	1	0,0001
12	Industri	193	0,0115	57	Wakil Gubernur	0	0,0000
13	Konstruksi	131	0,0078	58	Bupati	0	0,0000
14	Transportasi	118	0,0070	59	Wakil Bupati	0	0,0000
15	Karyawan Swasta	487.083	29,0907	60	Walikota	1	0,0001

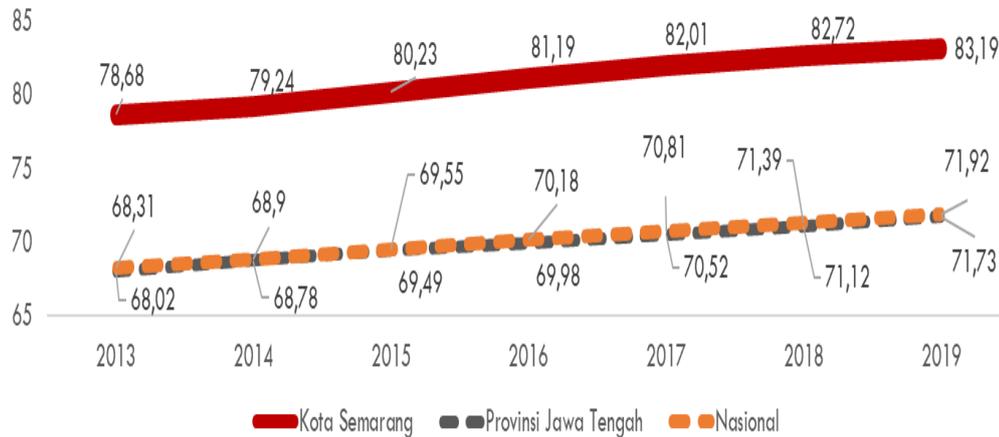


NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
16	Karyawan BUMN	5.504	0,3287	61	Wakil Walikota	1	0,0001
17	Karyawan BUMD	676	0,0404	62	Anggota DPRD Provinsi	14	0,0008
18	Karyawan Honorer	1.263	0,0754	63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	13	0,0008
19	Buruh Harian Lepas	14.861	0,8876	64	Dosen	3.643	0,2176
20	Buruh Tani/Perkebunan	35.457	2,1176	65	Guru	14.022	0,8375
21	Buruh Nelayan/Perikanan	58	0,0035	66	Pilot	15	0,0009
22	BuruhPeternakan	15	0,0009	67	Pengacara	165	0,0099
23	PembantuRumahTangga	681	0,0407	68	Notaris	120	0,0072
24	Tukang Cukur	29	0,0017	69	Arsitek	105	0,0063
25	Tukang Listrik	35	0,0021	70	Akuntan	40	0,0024
26	Tukang Batu	369	0,0220	71	Konsultan	139	0,0083
27	Tukang Kayu	91	0,0054	72	Dokter	2.827	0,1688
28	Tukang Sol Sepatu	10	0,0006	73	Bidan	570	0,0340
29	Tukang Las/ Pandai Besi	75	0,0045	74	Perawat	2.580	0,1541
30	Tukang Jahit	198	0,0118	75	Apoteker	273	0,0163
31	Tukang Gigi	0	0,0000	76	Psikiater/Psikolog	33	0,0020
32	Penata Rias	51	0,0030	77	Penyiar Televisi	2	0,0001
33	Penata Busana	24	0,0014	78	Penyiar Radio	13	0,0008
34	Penata Rambut	38	0,0023	79	Pelaut	465	0,0278
35	Mekanik	277	0,0165	80	Peneliti	9	0,0005
36	Seniman	109	0,0065	81	Sopir	862	0,0515
37	Tabib	10	0,0006	82	Pialang	7	0,0004
38	Paraji	1	0,0001	83	Paranormal	4	0,0002
39	Perancang Busana	10	0,0006	84	Pedagang	10.963	0,6548
40	Penterjemah	6	0,0004	85	Perangkat Desa	6	0,0004
41	Imam Mesjid	4	0,0002	86	Kepala Desa	1	0,0001
42	Pendeta	353	0,0211	87	Biarawati	157	0,0094
43	Pastor	47	0,0028	88	Wiraswasta	78.720	4,7015
44	Wartawan	181	0,0108	89	Lainnya	6.694	0,3998
45	Ustadz/Mubaligh	31	0,0019				
JUMLAH						1.674.358	100,00

Sumber Data : Dispendukcapil, Semester II 2019

Dari aspek kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM disusun dari indikator komposit Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli. Di tahun 2019, diperkirakan nilai IPM Kota Semarang meningkat menjadi 82,59.

GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA SEMARANG TAHUN 2019



Sumber : BPS Kota Semarang, 2019 (data diolah)

Catatan: Angka tahun 2019 adalah angka proyeksi sementara

F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kota Semarang yakni “Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang”.

Permasalahan utama pembangunan Kota Semarang tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
 - a) Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan
 - b) Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
 - c) Tingginya tingkat pengangguran
 - d) Masih belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - e) Masih tingginya beban pengeluaran warga miskin
 - f) Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan
 - g) Masih rendahnya peranan pemuda dalam pembangunan
 - h) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan

2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - a) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan public
 - b) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah
 - a) Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
 - a) Masih diperlukan peningkatan pengelolaan tata ruang
 - b) Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang berkualitas
 - c) Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal
 - d) Masih terjadinya genangan banjir dan rob
 - e) Belum optimalnya ketangguhan bencana
 - f) Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan-kawasan strategis
4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.
 - a) Kurang berkontribusinya sektor-sektor lainnya dalam perekonomian daerah
 - b) Masih belum optimalnya nilai investasi
 - c) Kontribusi kategori-kategori pada sektor perdagangan dan jasa-jasa perlu dioptimalkan
 - d) Ketahanan pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan

Isu Strategis Pembangunan Daerah

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan, yaitu :

- a) Peningkatan Kualitas Pendidikan
- b) Peningkatan Kualitas Kesehatan

- c) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- d) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
- e) Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
- f) Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
- g) Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup
- h) Penanganan Banjir dan Rob
- i) Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan
- j) Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

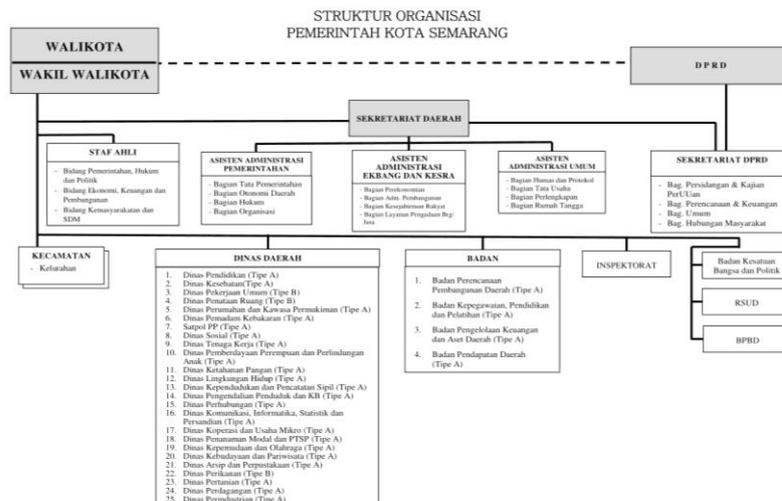
G. STRUKTUR ORGANISASI

a. Struktur Organisasi

Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh seorang Wakil Walikota dan perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang dibentuk melalui peraturan daerah kota Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Semarang. Adapun perangkat daerah Kota Semarang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari 12 Bagian
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Inspektorat
- d. Satpol PP
- e. RSUD
- f. Dinas.
- g. Badan.
- h. Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun secara lengkap struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

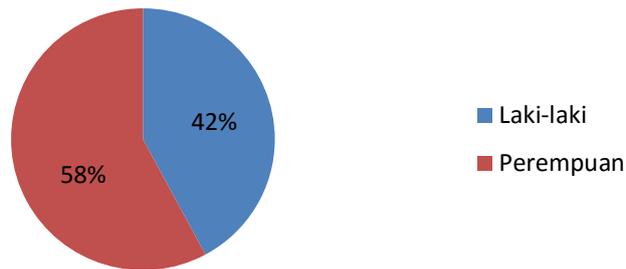


b. Sumber Daya Aparatur

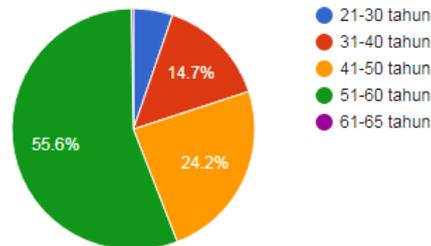
Pemerintah Kota Semarang memiliki PNS sebanyak 10.605 orang dengan perimbangan laki laki sebanyak 4.469 orang dan perempuan sebanyak 6.136 yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam grafik berikut:

JUMLAH PNS BERDASARKAN GENDER

Komposisi Gender

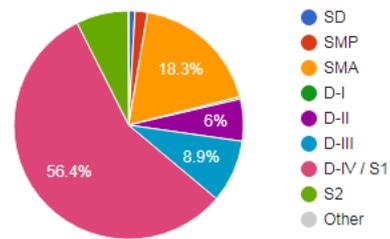


Komposisi Usia



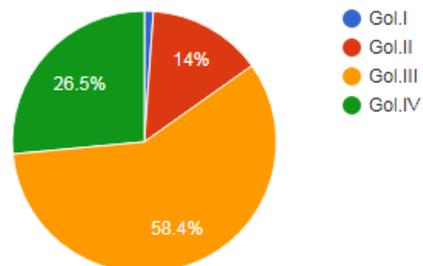
RANGE USIA	JUMLAH
21-30 Th	555 (5,2)
31-40 Th	1.560 (14,7)
41-50 Th	2.564 (24,2)
51-60 Th	5,896 (55.6)
61-65 Th	Other

Komposisi Pendidikan



PENDIDIKAN	JUMLAH
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	-
2. Tamat SD atau Sederajat	95 (0,9%)
3. SMP dan Sederajat	187 (1,8%)
4. SMA dan Sederajat	1,946 (18,3%)
5. Akademi DI	32 (0,3%)
6. Akademi DII	632(6%)
7. Akademi DIII	941(8,9%)
8. Sarjana (S1/D-IV)	5.985 (56,4%)
9. Magister (S2)	780(7,4%)
10. Doktor (S3)	Other

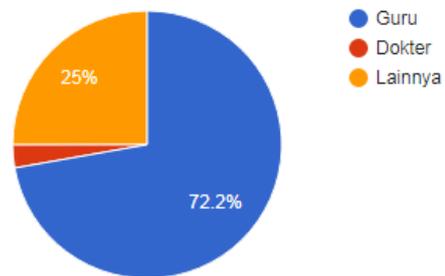
Komposisi Golongan



GOLONGAN	JUMLAH
1. Golongan I	116(1,1%)
2. Golongan II	1.487(14%)
3. Golongan III	6.192(58,4%)
4. Golongan IV	2.808(26,5%)



Komposisi Tipe Jabatan Fungsional



TIPE JABATAN FUNSIONAL	JUMLAH
1. Guru	4.187 (72,2%)
2. Dokter	161 (2,8%)
3. Lainnya	1.451 (25%)



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan akan terwujud pada akhir periode perencanaan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu. Visi akan menjadi arahan bagi keseluruhan kebijakan yang diambil dan dijalankan. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021, visi Kota Semarang adalah : **“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

HEBAT, mengandung arti masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. **SEJAHTERA**, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan “Bergerak Bersama Membangun Semarang”.

Slogan tersebut diartikan sebagai satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat terhadap kotanya.



Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Visi Kota Semarang, selanjutnya dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

2. **Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. **Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. **Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, maka disusun agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema



pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahun 2017: Penyiapan infrastruktur untuk mendukung Kota Metropolitan yang sejahtera dan melayani
2. Tahun 2018: Pengembangan infrastruktur untuk memecahkan masalah besar perkotaan dan daya saing SDM
3. Tahun 2019: Penguatan struktur ekonomi didukung oleh peningkatan sektor perdagangan dan jasa
4. Tahun 2020: Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Tangguh, Melayani dan Berdaya Saing
5. Tahun 2021: Perwujudan Semarang Hebat

B. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

SASARAN adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Hasil rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang sebagai berikut:

Misi Pemerintah Kota Semarang	Tagline	Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas	SEMARANG SEHAT DAN CERDAS	1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			2 Tingkat Kearifan Budaya Lokal
		2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3 Tingkat Pengangguran Terbuka
			4 Angka Kemiskinan
			5 Tingkat partisipasi masyarakat
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	SEMARANG MELAYANI	3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	6 Indeks Reformasi Birokrasi
		4 Terwujudnya kondusivitas wilayah	7 Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban
Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan	SEMARANG TANGGUH	5 Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan	8 Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan
Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif	SEMARANG BERDAYA SAING	6 Meningkatnya Produktivitas ekonomi lokal	9 Laju Pertumbuhan Ekonomi



C. RENCANA STRATEGIS KOTA SEMARANG 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
MISI 1: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS													
SEMARANG SEHAT DAN CERDAS													
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		point	80,23	81,19	81,61	82,00	82,40	82,80	83,23	83,23	
		1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,33	14,70	14,77	14,85	14,92	15,00	15,07	15,07
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,20	10,49	10,60	10,70	10,79	10,88	10,96	10,96	
			Angka Harapan Hidup	Tahun	77,20	77,21	77,22	77,23	77,23	77,25	77,26	77,26	
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal				Persen	17,92	20,35	25,56	39,45	49,70	59,90	69,22
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	17,92	20,35	25,56	39,45	49,70	59,90	69,22	69,22		
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	5,77	5,48	5,37	5,17	4,97	4,77	4,57	4,57	
		3	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,96	66,96	68,07	68,96	69,63	70,08	70,30	70,30
				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen		60	65	70	80	85	90	90
		Angka Kemiskinan				Persen	4,97	4,85	4,82	4,76	4,67	4,60	4,53
		4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang)	%	20,82	20,82	19,95	19,07	18,19	17,32	16,45	16,45
				Persentase Penanganan PMKS	Persen	83	85	88	91	94	96	98	98
		Tingkat Partisipasi Masyarakat				%	74	75,45	79,32	80,25	81,17	81,95	83,17
5	Meningkatnya kapasitas	Persentase Tingkat partisipasi	%	74	75,45	79,32	80,25	81,17	81,95	83,17	83,17		



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	masyarakat Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,62	96,04	96,41	96,73	97,00	97,24	97,56	97,56	
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK													
SEMARANG MELAYANI													
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai	56,10	62,42	> 64	> 66	> 68	> 70	> 72	> 72	
		6	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	75,642	78	79	81	83	85	87	87
			Opini BPK	Opini / Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	52,42 /CC	55,94/ CC	57/ CC	60 / B	> 60 /B	> 70 / BB	> 80 / A	> 80 / A	
			Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,234 3 /ST	>3 /ST	>3 /ST	>3 /ST	>3 /ST	>3 /ST	>3 /ST	>3 /ST	
4	Terwujudnya kondusivitas wilayah	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban		Persen	20,3	40,5	41,4	43,0	44,8	46,8	48,8	48,8	
		7	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	kejadian	2.792	2.085	2.053	1.997	1.934	1.866	1.793	1.793



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SEMARANG TANGGUH													
5	Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan	Persentase Wilayah Kota yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan		Persen		63,69	68,63	75,61	82,17	86,36	91,77	91,77	
		8	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna	Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	Persen		13	24	46	65	77	96	96
				Persentase kesesuaian tata ruang	Persen		79	81	82	83	84	85	85
		9	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota	Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	5,34	5,02	4,69	4,37	4,05	3,73	3,40	3,40
				Jumlah titik/ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet		8	6	5	4	3	2	2
		10	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai indeks	45,38	44,84	47	49	51	53	55	55
11	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen		91,17	92,43	95,17	97,90	100	100	100		
		12	Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai indeks	184	184	172,96	161,92	150,88	139,84	128,80	128,80



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
MISI 4: MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF													
SEMARANG BERDAYA SAING													
6	Meningkatnya Produktivitas ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,80	5,69	5,81	5,98	6,16	6,33	6,50	6,50	
		13	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Nilai investasi	Juta Rupiah	9.570.413	10.500.000	15.935.000	17.506.000	18.699.000	20.543.000	21.924.000	21.924.00
				Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	30,63	30,87	31,13	31,2	31,27	31,34	31,41	31,41
				Nilai Ekspor	US\$	1.155.342.967	1.218.036.901	1.277.890.977	1.339.164.982	1.400.434.987	1.461.712.992	1.522.987.000	1.522.987.000
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6,5	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9
		14	Meningkatnya Produk Unggulan Daerah	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	26,31	25,82	27,38	27,42	27,46	27,50	27,54	27,54
				Jumlah wilayah produk unggulan daerah (Sentra/Kecamatan)	Jumlah	0	0	2	5	6	7	7	7



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	5,69	5,81	5,98	6,16	6,33	6,50	6,50
2	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	30,63	30,87	31,13	31,2	31,27	31,34	31,41	31,41
3	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	26,31	25,82	27,38	27,42	27,46	27,50	27,54	27,54
4	Jumlah nilai investasi	Rp (dlm juta)	9.570.413	10.500.000	15.935.000	17.506.000	18.699.000	20.543.000	21.924.000	21.924.000
5	Persentase kawasan banjir dan rob	%	5,34	5,02	4,69	4,37	4,05	3,73	3,40	3,40
6	Indeks Pembangunan Manusia	nilai indeks	80,23	81,19	81,61	82,00	82,40	82,80	83,23	83,23
7	Indeks Pembangunan Gender	nilai indeks	95,62	96,04	96,41	96,73	97,00	97,24	97,56	97,56
8	Angka Kemiskinan	%	4,97	4,85	4,82	4,76	4,67	4,60	4,53	4,53
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,77	5,48	5,37	5,17	4,97	4,77	4,57	4,57
10	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai indeks	56,10	62,42	>64	>66	>68	>70	>72	>72
11	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	74	75,45	79,32	80,25	81,17	81,95	83,17	83,17
12	Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	20,3	40,5	41,4	43,0	44,8	46,8	48,8	48,8
13	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	%	-	63,69	68,63	75,61	82,17	86,36	91,77	91,77



E. PERJANJIAN KINERJA KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Poin	82,40
		1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,92
			2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,79
			3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,23
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen	49,70
2.	Meningkatnya kearifan budaya lokal	4.	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	%	49,70	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen	4,97
		3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,63
			6.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	80,00
		Angka Kemiskinan			Persen	4,67
		4. Menurunnya angka kemiskinan	7.	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang)	%	18,19
			8.	Persentase Penanganan PMKS	%	94,00
		Tingkat Partisipasi Masyarakat			Persen	81,17
		5. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	9.	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	81,17
			10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	97,00
		3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi		
6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	11.			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	83
	12.			Opini BPK	Opini / Predikat	WTP
	13.			Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>60/ B



NO	TUJUAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	
			14.	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3 /ST	
4	Terwujudnya kondusivitas wilayah	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban			Persen	44,8	
		7.	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	15.	Angka Kriminalitas	kejadian	1.934
5	Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan			Persen	82,17	
		8.	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna	16.	Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	Persen	65
				17.	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	83
		9.	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota	18.	Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	4,05
				19.	Jumlah titik/ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	4
		10.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai indeks	51
		11.	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	21.	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	97,90
		12.	Meningkatnya ketangguhan bencana	22.	Indeks Resiko Bencana	Nilai indeks	150,88
6	Meningkatnya Produktivitas ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	6,16	
		13.	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	23.	Nilai investasi	Juta Rupiah	18.699.000
				24.	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,27
				25.	Nilai Ekspor	US\$	1.400.434.987
				26.	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	8



NO	TUJUAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019
		14. Meningkatnya Produk Unggulan Daerah	27.	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,46
			28.	Jumlah wilayah produk unggulan daerah (Sentra/Kecamatan)	Jumlah	6

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2019
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.16
2	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,27
3	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,46
4	Jumlah nilai investasi	Rp (dln juta)	18.699.000
5	Persentase kawasan banjir dan rob	%	4,05
6	Indeks Pembangunan Manusia	nilai indeks	82,40
7	Indeks Pembangunan Gender	nilai indeks	97,00
8	Angka Kemiskinan	%	4,67
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,97
10	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai indeks	>68
11	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	81,17
12	Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	44,8
13	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	%	82,17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

LKjIP Kota Semarang Tahun 2019 ini menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran LKjIP Kota Semarang Tahun 2019 juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2018 yang dibiayai dari dana APBD Kota Semarang.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (*Performance Plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2019 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*Performance Gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan pijakan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

A. RINGKASAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Bagian ini akan menguraikan ringkasan pencapaian kinerja indikator kinerja utama sebagai berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019				REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,16 %	6,86 %*	105,84	Sangat Tinggi	5,64 %
2	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	31,27	30,74	98,31	Sangat Tinggi	31,80
3	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	27,46	27,44	99,93	Sangat Tinggi	26,74
4	Jumlah Nilai investasi	18.699.000	36.534.709,11	195,38	Sangat Tinggi	27.549.279,90
5	Persentase kawasan banjir dan Rob	4,05	1,27	168,64	Sangat Tinggi	4,37
6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,40	82,72*	103,89	Sangat Tinggi	82,01
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	95,55	98,51	Sangat Tinggi	95,69
8	Angka Kemiskinan	4,67 %	3,98 %	114,78	Sangat Tinggi	4,14 %
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97 %	4,54 %	108,65	Tinggi	5,29 %
10	Indeks Reformasi Birokrasi	> 68	68,86*	101,26	Sangat Tinggi	68,86
11	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	81,17	82,17	101,23	Sangat Tinggi	84,64 %
12	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	44,80 %	44,17 %	98,59	Sangat Tinggi	46,32 %
13	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	82,17 %	96,15 %	117,01	Sangat Tinggi	78,32 %

1. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), capaian pada 2019 mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Posisi laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,86. Angka tersebut lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,66 dan nasional 5,02. “Artinya, apa yang disampaikan pengusaha, ini sebagai indikator kami untuk mengeluarkan kebijakan,”
2. Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada koordinasi bidang ekonomi keuangan dan industri perdagangan, peningkatan Produk Unggulan Daerah dan Penguatan Kelembagaan Perekonomian dalam kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah. Pertumbuhan perdagangan dapat dilihat dari kontribusi PDRB kategori perdagangan dan jasa terhadap PDRB dimana pada tahun 2019 sebesar 30,74%.
3. Pembangunan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB dimana pada tahun 2019 sebesar 27,44%.
4. Pada tahun 2019, investasi di Kota Semarang sampai dengan bulan Desember mencapai sebesar Rp. 36.534.709,11.- atau sudah melebihi target yang sudah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu mencapai 195,38% sebanyak Rp. 18.699.000.-



5. Terkait dengan penanganan rob dan banjir, Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 4,05%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada berkurangnya kawasan banjir dan rob di Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir, pembangunan sistem polder kali banger, operasional sistem polder kali semarang serta pembangunan embung.
6. Di tahun 2019, diperkirakan nilai IPM Kota Semarang meningkat menjadi 82,72. Pengukuran IPM dilihat dengan menggunakan metode pengukuran yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi Per Kapita, mulai dari tahun 2014 digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli.
7. Target Indek Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2019 sebesar 97,00 poin terealisasi sebesar 95,55 poin atau 98,50 Prosen. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
8. Capaian positif Kota Semarang dalam upaya membangun kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2019 antara lain dapat dilihat dari keberhasilan Penurunan Angka Kemiskinan menjadi 3,98 dari sebelumnya 4,14 pada tahun 2018 (sesuai dari Data BPS Kota Semarang). Adapun hasil verifikasi validasi Basis Data Terpadu (BDT) untuk warga miskin Kota Semarang pada Tahun 2019, untuk indikator kinerja Persentase penduduk miskin menurun sebesar 13,80% dari yang ditargetkan 18,19%, hal ini juga menurun jika dibandingkan dari capaian tahun 2018 sebesar 16,81%.
9. Pada tahun 2019, terdapat capaian kinerja positif Pemerintah Kota Semarang dalam upaya penurunan dan penanganan angka pengangguran. Jumlah angkatan kerja harus diimbangi jumlah lowongan pekerjaan, investasi dengan penyerapan angkatan kerja lokal, yang berdampak pada turunnya jumlah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja)

bergerak turun, pada tahun 2018 sebesar 5,29% menjadi sebesar 4,54% pada tahun 2019.

Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (rasio perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja) pada tahun 2018 sebesar 65,56% naik menjadi 66,42%. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok angkatan kerja dan berkurangnya penduduk usia kerja pada kelompok bukan angkatan kerja.

10. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 sebesar 68,86. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
11. Pada tahun 2019 capaian Persentase Tingkat partisipasi masyarakat sebesar 82,17% melebihi dari target yang ditentukan yaitu 81,17 Persentase Tingkat partisipasi masyarakat .
12. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diwilayah Kota Semarang pada tahun 2019 persentase penurunan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 44,80 % dimana pada tahun 2019 telah tercapai yaitu sebanyak 44,17% dari angka 2.966 kejadian yang meliputi 1.815 gangguan ketertiban umum dan 1.151 angka kriminalitas.
13. Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan pada tahun 2019 tercatat lebih meningkat tajam dari yang diharapkan yaitu capaiannya sebesar 96,15 % dari target yang ditentukan sebesar 82,17 %.
14. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP) dari yang ditargetkan B terealisasi B, atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
A	Perencanaan Kinerja	30	21,08	21,02
B	Pengukuran Kinerja	25	18,44	18,41
C	Pelaporan Kinerja	15	9,32	9,42
D	Evaluasi Internal	10	6,23	6,27
E	Capaian Kinerja	20	12,85	13,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,92	68,12
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang Semarang memperoleh nilai 68,12 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 sebesar 67,92.



B. RINGKASAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
MISI I				
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS				
TUJUAN 1				
MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA				
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,40	82,72*	103,89	82,01
Rata-rata Capaian Sasaran	82,40	82,72*	103,89	Sangat Tinggi
SASARAN 1 :				
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT				
Angka Harapan Lama Sekolah	14,92	15,50*	103,89	15,20
Rata-Rata Lama Sekolah	10,79	10,51*	97,41	10,50
Angka Harapan Hidup	77,23	77,23*	100,00	77,21
Rata-rata Capaian Sasaran			100,43	Sangat Tinggi
SASARAN 2 :				
MENINGKATNYA KEARIFAN BUDAYA LOKAL				
Tingkat Kearifan Budaya Lokal	49,70	84,75	170,52	73,95
Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	49,70	84,75	170,52	73,95
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	170,52	Sangat Tinggi
TUJUAN 2				
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97 %	4,54 %	108,65	5,29
Rata-rata Capaian Sasaran	4,97 %	4,54 %	108,65	Sangat Tinggi
SASARAN 3 :				
MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING TENAGA KERJA				
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,63	66,42	95,39	65,56
Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	80,00	87,50	109,38	68,00
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	102,39	Sangat Tinggi
SASARAN 4 :				
MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN				
Angka Kemiskinan	4,67 %	3,98 %	114,78	4,14 %
Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang)	18,19	13,80	124,13	17,51
Persentase Penanganan PMKS	94,00	100,00	106,38	83,94
Rata-rata Capaian Sasaran			115,10	Sangat Tinggi
SASARAN 5 :				
MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN				
Tingkat Partisipasi Masyarakat	81,17	82,17	101,23	84,64
Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	81,17	82,17	101,23	84,64
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	95,82*	98,78	95,69
Rata-rata Capaian Sasaran			100,41	Sangat Tinggi
MISI 2				
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.				
TUJUAN 3				
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI				
Indeks Reformasi Birokrasi	> 68	68,86*	101,26	67,18
Rata-rata Capaian Sasaran	> 68	68,86*	101,26	Sangat Tinggi
SASARAN 6				
TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI				
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	83,83	101,00	83,25
Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP
Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara-raan Pemerintahan Daerah	60/B	68,12/B	113,20	67,92/B
Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	> 3 / ST	3,4000 / ST	113,20	3,4142 / ST
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	106,85	Sangat Tinggi



TUJUAN 4				
TERWUJUDNYA KONDUSIVITAS WILAYAH				
Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	44,80 %	44,17 %	98,59	46,32 %
Rata-rata Capaian Sasaran	44,80 %	44,17 %	98,59	Sangat Tinggi
SASARAN 7				
MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT				
Angka Kriminalitas	1934	1151	140,49	1.443
Rata-rata Capaian Sasaran	1934	1151	140,49	Sangat Tinggi
MISI 3				
MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.				
TUJUAN 5				
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KOTA YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN				
Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	82,17 %	96,09 %	116,94	78,32 %
Rata-rata Capaian Sasaran	82,17 %	96,09 %	116,94	Sangat Tinggi
SASARAN 8				
TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG BERDAYA GUNA				
Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	65,00	65,00	100,00	46,00
Persentase kesesuaian tata ruang	83,00	95,00	114,46	82,00
Rata-rata Capaian Sasaran			107,23	Sangat Tinggi
SASARAN 9				
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA				
Persentase kawasan banjir dan rob	4,05	1,27	168,64	4,37
Jumlah titik/ruas rawan macet	4	4	100,00	5
Rata-rata Capaian Sasaran			134,32	Sangat Tinggi
SASARAN 10				
TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	51,00	62,88	123,29	51,94
Rata-rata Capaian Sasaran	51,00	62,88	123,29	Sangat Tinggi
SASARAN 11				
TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN YANG BERKUALITAS				
Persentase lingkungan permukiman sehat	97,90	96,67	98,74	94,92
Rata-rata Capaian Sasaran	97,90	96,67	98,74	Sangat Tinggi
SASARAN 12				
MENINGKATNYA KETANGGUHAN BENCANA				
Indeks Resiko Bencana	150,88	130,60	113,44	130,60
Rata-rata Capaian Sasaran	150,88	130,60	113,44	Sangat Tinggi
MISI IV				
MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF				
TUJUAN 6				
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS EKONOMI LOKAL				
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,16 %	6,52 %*	105,84	5,64 %
Rata-rata Capaian Sasaran	6,16 %	6,52 %*	105,84	Sangat Tinggi
SASARAN 13				
MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DAN JASA UNGGULAN				
Nilai investasi	18.699.000	36.534.709,11	195,38	27.549.279,90
Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	31,27	31,19*	99,74	31,80
Nilai Ekspor	1.400.434.987,00	1.101.478.622,00	78,65	1.163.718.499,18
Persentase peningkatan kunjungan wisata	8,00	26,62	332,75	8,60
Rata-rata Capaian Sasaran			176,63	Sangat Tinggi
SASARAN 14				
MENINGKATNYA NILAI PRODUK UNGGULAN DAERAH				
Kontribusi Katagori Industri Pengolahan terhadap PDRB	27,46	27,88*	101,53	26,74
Jumlah Wilayah Produk unggulan Daerah (Sentra / Kecamatan)	6	6	100,00	4
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	100,77	Sangat Tinggi

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**MISI I :****MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS****TAGLINE : SEMARANG SEHAT DAN CERDAS****TUJUAN 1 :****MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,40	82,72*	103,89	82,01

Di tahun 2019, diperkirakan nilai IPM Kota Semarang meningkat menjadi 82,72. Pengukuran IPM dilihat dengan menggunakan metode pengukuran yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi Per Kapita, mulai dari tahun 2014 digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli.

SASARAN 1 :**MENINGKATNYA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan tiga indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,43% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Angka Harapan Lama Sekolah	14,92	15,50*	103,89	15,20
Rata-Rata Lama Sekolah	10,79	10,51*	97,41	10,50
Angka Harapan Hidup	77,23	77,23*	100,00	77,21
Rata-rata Capaian Sasaran			100,43	Sangat Tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. Dari tabel di atas, didapat realisasi angka HLS sebesar 15,51 tahun, serta realisasi RLS sebesar 10,52 tahun, sehingga didapatkan prosentase capaian sebesar 103,95 % untuk HLS dan 97,50 % untuk RLS.

2. Capaian kinerja pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah dari 15,20 meningkat menjadi 15,50 dengan Capaian sebesar 103,89 %
3. Indikator kinerja Angka Harapan Hidup Kota Semarang tahun 2019 adalah 77,25 tahun artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2019 akan dapat hidup sampai 77 atau 78 tahun lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Indonesia yaitu 71,20 tahun. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator AHH adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

TABEL ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG

NO	TAHUN	AHH
1.	2015	77.20
2.	2016	77.21
3.	2017	77,21
4.	2018	77,23
5.	2019	77,25

Sumber Data : <https://semarangkota.bps.go.id/>
Update Terakhir : 27 Januari 2020

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

1. Bidang Pendidikan

Guna mewujudkan Misi 1 RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu: “Kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas” dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui tujuan: “Meningkatnya SDM yang berkualitas” dan sasaran: “Meningkatnya aksesibilitas pendidikan” dengan indikator 2 (dua) sasaran, yaitu: (i) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan (ii) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Perkembangan indikator sasaran HLS dan RLS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,92 Tahun	15,51 Tahun	104,02	15,50 Tahun
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,79 Tahun	10,52 Tahun	95,81	10,51 Tahun
JUMLAH					

Dari tabel di atas, didapat realisasi angka HLS sebesar 15,51 tahun, serta realisasi RLS sebesar 10,52 tahun, sehingga didapatkan prosentase capaian sebesar 104,02 % untuk HLS dan 95,81 % untuk RLS.

Capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Semarang pada tahun 2019 meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun hasil kinerja pelaksanaan urusan wajib pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

a) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	APK PAUD 3-6 tahun	80 %	83,01 %	103,76	84,72 %
2	Jumlah lembaga PAUD holistik integratif	156 Lembaga	177 Lembaga	113,46	177 Lembaga
3	Jumlah lembaga PAUD berakreditasi B	150 Lembaga	208 Lembaga	138,67	167 Lembaga
4	Jumlah PAUD/TK Negeri baru yang terbangun	12 Satpen	8 Satpen	40	7 Satpen

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD dilayani dengan satuan pendidikan/lembaga Taman Kanak-kanak (TK) atau yang sejenis (Raudhatul Athfal/RA dan Busthanul Athfal/BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD sejenis (SPS). TK/RA/BA merupakan PAUD formal, sementara KB/TPA/SPS merupakan PAUD nonformal.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan PAUD diukur dari 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun, realisasinya sebesar 83,01 % telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 80 % sehingga prosentase capaiannya 103,76 %.
- 2) Jumlah lembaga PAUD holistik integratif, realisasinya 177 lembaga dimana targetnya adalah 156 lembaga, sehingga didapatkan prosentase capaian sebesar 113,46 %. PAUD holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua

aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan pusat.

- 3) Jumlah lembaga PAUD berakreditasi B, realisasinya 208 lembaga dimana targetnya adalah 150 lembaga, sehingga didapatkan prosentase capaian sebesar 138,67 %.
- 4) Jumlah PAUD/TK Negeri baru yang terbangun realisasinya hanya 8 satpen sehingga tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 12 satpen, sehingga prosentase capaiannya hanya 40 %. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya lahan untuk pembangunan TK Negeri di 4 lokasi yang sebelumnya telah direncanakan, yaitu di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan.

b) Program Wajar Dikdas 9 (Sembilan) Tahun

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018	
	Target	Realisasi	%		
1	Persentase SD berakreditasi A	65,25 %	61,39 %	94,08	58,10%
2	Persentase SMP berakreditasi A	86,50 %	61,75 %	71,39	57,14%
3	Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi	64 Satpen	195 Satpen	304,69	189 Satpen
4	Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi	55 Satpen	184 Satpen	334,55	66 Satpen
5	Jumlah SD e-pembelajaran	80 Satpen	80 Satpen	100	64 Satpen
6	Jumlah SMP e-pembelajaran	50 Satpen	60 Satpen	120	60 Satpen
7	Jumlah siswa SD penerima beasiswa prestasi/miskin	11.393 Orang	2.845 Orang	24,97	2945 Orang
8	Jumlah siswa SMP penerima beasiswa prestasi/miskin	8.004 Orang	2.858 Orang	35,71	3600 Orang
9	Jumlah SD inklusi	24 Satpen	43 Satpen	179,17	16 Satpen
10	Jumlah SMP inklusi	12 Satpen	24 Satpen	200	10 Satpen
11	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	94,90 %	87,84 %	92,56	82,82%
12	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	98,90 %	93,09 %	94,13	90,49%
13	Jumlah SMP Negeri baru yang terbangun	2 Satpen	0	0	-

Keberhasilan penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 (Sembilan) Tahun dapat diukur dari 13 (tiga belas) indikator kinerja, dimana 6 indikator sudah tercapai targetnya, yaitu indikator:

1. Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi; dengan prosentase realisasi sebesar 304,69 %, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
2. Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi; dengan prosentase realisasi sebesar 334,55 %, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
3. Jumlah SD e-pembelajaran; dengan prosentase realisasi sebesar 100 % dimana realisasinya 80 Satuan Pendidikan sesuai dengan target yang telah.
4. Jumlah SMP e-pembelajaran; dengan prosentase realisasi sebesar 120 %, sama dengan capaian tahun lalu.
5. Jumlah SD inklusi; dengan prosentase realisasi sebesar 179,17% dimana terdapat 43 satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dari target 25 satuan pendidikan.
6. Jumlah SMP inklusi; dengan prosentase realisasi sebesar 200%, dimana terdapat 24 satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dari target 12 satuan pendidikan.

Terdapat 3 indikator yang sudah tercapai, namun realisasi capaiannya belum 100 %, yaitu:

1. Persentase SD berakreditasi A, dengan realisasi capaiannya 94,08 %
2. Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik, dengan realisasi capaiannya 92,56 %.
3. Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik, dengan realisasi capaiannya 94,13%.

Namun masih ada 4 indikator yang realisasi capaiannya masih di bawah 75 %, yaitu:

1. Persentase SMP berakreditasi A; dengan prosentase realisasi sebesar 71,39 % dikarenakan banyak sekolah yang sarana dan prasarannya belum terpenuhi, seperti UKS, perpustakaan, laboratorium computer dan WC.
2. Jumlah siswa SD penerima beasiswa prestasi/miskin realisasi capaiannya hanya 24,97% dikarenakan terdapat indikasi adanya dobel dengan anggaran dengan anggaran di PKH dan PIP, sehingga untuk beasiswa warga miskin tidak dicairkan sedangkan untuk beasiswa warga miskin berprestasi tetap di cairkan.
3. Jumlah siswa SMP penerima beasiswa prestasi/miskin realisasi capaiannya hanya 35,71% dikarenakan terdapat indikasi adanya dobel dengan anggaran dengan anggaran di PKH dan PIP, sehingga untuk beasiswa warga miskin

tidak dicairkan sedangkan untuk beasiswa warga miskin berprestasi tetap di cairkan.

4. Jumlah SMP Negeri baru yang terbangun; dengan prosentase realisasi sebesar 0 % dikarenakan SMPN 45 dan SMPN 46 yang rencananya dibangun di tahun 2019 belum bisa terlaksana. SMP N 45 baru terbangun strukturnya dan *finishing*-nya akan dilaksanakan di tahun 2020, sedangkan untuk SMP N 46 di tahun 2019 ini baru berupa dokumen perencanaan yaitu masterplan, DED, Amdal dan FS.

c) Program Pendidikan NonFormal (PNF)

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018	
	Target	Realisasi	%		
1	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,97 %	99,96 %	99,99	99,96%
2	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) rujukan	3 Lembaga	4 Lembaga	133,33	4 Lembaga
3	Jumlah kelurahan vokasi	23 Kelurahan	17 Kelurahan	73,91	17 Kelurahan
4	Jumlah kelembagaan PKBM yang berakreditasi minimal B	11 Lembaga	18 Lembaga	163,64	12 Lembaga
5	Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	20 Orang	20 Orang	100	15 Orang

Program PNF diselenggarakan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal serta pendidikan *life skill*.

Keberhasilan penyelenggaraan PNF dapat diukur dari 5 (lima) indikator kinerja. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (99,96 %), jumlah LKP rujukan (4 lembaga), jumlah kelembagaan PKBM yang berakreditasi minimal B (18 lembaga) dan jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi (20 orang) telah memenuhi target yang ditetapkan. Sementara jumlah kelurahan vokasi (17 kelurahan), belum memenuhi target indikator.

d) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018	
	Target	Realisasi	%		
1	Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD	93 %	80,44%	86,49	71,63%
2	Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI	100 %	90,6 %	90,60	88,21%



Indikator Kinerja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018	
	Target	Realisasi	%		
3	Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs	100 %	86,98 %	86,98	85,15%
4	Persentase Guru TK Bersertifikasi	97 %	97 %	100	97%
5	Persentase Guru SD Bersertifikasi	97 %	98 %	101,03	98%
6	Persentase Guru SMP Bersertifikasi	97 %	97 %	100	97%
7	Persentase Guru yang memiliki Indek Kinerja Minimal Baik	99 %	99 %	100	99%
8	Persentase Kepala Sekolah Sesuai Ketentuan	100 %	90 %	90	100%
9	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional	4 Orang	4 Orang	100	4 Orang
10	Persentase Pengawas Sekolah dan Penilik Sesuai Ketentuan	95 %	90 %	94,74	90%
11	Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru TK	96 %	90 %	93,75	83,33%
12	Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru SD	97 %	96 %	98,97	96%
13	Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru SMP	97 %	95 %	97,94	95%
14	Rasio Guru Terhadap Murid (SD)	544,61 (1:18)	544,61	100	544,61 (1:18)
15	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (SD)	1,702 (1:20:32)	1,7	100	1,702 (1:20:32)
16	Rasio Guru Terhadap Murid (SMP)	700,71 (1:17)	700,71	100	700,71 (1:17)
17	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (SMP)	2,366 (1:17:30)	2,37	100	2,366 (1:17:30)

Peningkatan mutu PTK diarahkan pada mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan melalui: (i) penambahan jumlah SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan kompetensi, dan/atau (ii) peningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan melalui bimbingan teknis/bintek serta pelatihan-pelatihan, dan (iii) pendidikan/penyesuaian untuk memenuhi kualifikasi, khususnya guru SD. Kualitas dan rasio guru dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai; dan (iii) kematian pegawai.

Keberhasilan penyelenggaraan Peningkatan Mutu PTK dapat diukur melalui 17 (tujuh belas) indikator kinerja, dimana 9 indikator telah terpenuhi targetnya, yaitu indikator:

1. Persentase guru TK bersertifikasi; dengan prosentase realisasi sebesar 100%.
2. Persentase guru SD bersertifikasi; dengan prosentase realisasi sebesar 101,03 %



3. Persentase guru SMP bersertifikasi; dengan prosentase realisasi sebesar 100%
4. Persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik; dengan prosentase realisasi sebesar 100%
5. Jumlah guru dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi/nasional (4 orang); dengan prosentase realisasi sebesar 100%
6. Rasio guru terhadap murid (SD) (1:18); dengan prosentase realisasi sebesar 100%
7. Rasio guru terhadap murid perkelas (SD) (1:20:32); dengan prosentase realisasi sebesar 100 %
8. Rasio guru terhadap murid (SMP) (1:17); dengan prosentase realisasi sebesar 100 %
9. Rasio guru terhadap murid perkelas (SMP) (1:17:30); dengan prosentase realisasi sebesar 100 %.

Sedangkan indikator yang tidak memenuhi target ada 8, yaitu indikator:

1. Guru berkualifikasi S1/D-IV jenjang PAUD; dengan prosentase realisasi sebesar 86,49 %
2. Guru berkualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI; dengan prosentase realisasi sebesar 90,60 %
3. Guru berkualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTs; dengan prosentase realisasi sebesar 86,96 %
4. Persentase kepala sekolah sesuai ketentuan; dengan prosentase realisasi sebesar 90 %
5. Persentase pengawas sekolah dan penilik sesuai ketentuan; dengan prosentase realisasi sebesar 94,74 %
6. Persentase kenaikan jenjang karier guru TK; dengan prosentase realisasi sebesar 93,75 %
7. Persentase kenaikan jenjang karier guru SD; dengan prosentase realisasi sebesar 98,97 %
8. Persentase kenaikan jenjang karier guru SMP; dengan prosentase realisasi sebesar 97,94 %.

e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Target	Realisasi	%	
1	APM SD/MI	90,70 %	96,1 %	105,95	98,23 %
2	APK SD/MI	100 %	110,59 %	110,59	112,76 %
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01 %	0,01 %	100	0,01 %



	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Target	Realisasi	%	
4	APM SMP/MTs	80,50 %	84,88 %	105,44	83,57 %
5	APK SMP/MTs	100 %	114,41 %	114,41	116,21 %
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,06 %	0,02 %	166,67	0,03 %
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100 %	103,14 %	103,14	106,10 %
8	Rasio APM P/L SD/MI	100 %	93,40 %	93,40	92,96 %
9	Rasio APM P/L SMP/MTs	100 %	93,22 %	93,22	93,17 %
10	Angka Kelulusan SD/MI	100 %	99,98 %	99,98	99,98 %
11	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,85 %	99,94 %	100,09	99,95 %
12	Cakupan Layanan Pendidikan	100 %	100 %	100	100 %

Keberhasilan penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Pendidikan dapat diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja. Dari tabel di atas, terdapat 9 indikator yang tercapai targetnya, yaitu APM SD/MI (105,95 %), APK SD/MI (110,59 %), Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (100 %), APM SMP/MTs (105,44 %), APK SMP/MTs (114,41 %), Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (166,67 %), Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (103,14), Angka Kelulusan SMP/MTs (100,09 %). Cakupan Layanan Pendidikan (100 %). Sedangkan indikator yang targetnya tidak tercapai ada 3, yaitu Rasio APM P/L SD/MI (93,40 %), Rasio APM P/L SMP/MTs (93,22 %), Angka Kelulusan SD/MI (99,98 %).

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI SASARAN

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE (%)
1.	Dinas Pendidikan	375.592.367.000	330.074.708.999	87,88
	JUMLAH	375.592.367.000	330.074.708.999	87,88

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang di tahun anggaran 2019 adalah:

1. Pembangunan 4 TK Negeri yang telah direncanakan tidak tercapai dikarenakan belum ditemukannya lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pendirian TK Negeri.
2. Masih terdapat guru, baik di jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, yang belum lulus S1/D-IV
3. Jumlah pengawas sekolah dan penilik PNF sesuai ketentuan yang belum memenuhi rasio dibandingkan jumlah sekolah yang ada.
4. Masih terdapat bangunan satuan pendidikan, terutama di sekolah dasar, yang kondisinya kurang baik dan memprihatinkan sehingga kadang mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Perkembangan peringkat nilai US/UN dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Rekapitulasi Peringkat UN SMP/MTs Kota Semarang
terhadap Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah
Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2018/2019

Kab./Kota	Peringkat UN SMP/MTs					
	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Kota Magelang	1	1	1	1	2	2
Kota Salatiga	3	2	2	2	1	1
Kota Surakarta	7	3	3	3	3	3
Kab. Magelang	11	5	4	4	5	5
Kota Semarang	4	4	6	5	4	4

Rekapitulasi Peringkat US SD/MI Kota Semarang
terhadap Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah
Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2016/2017

Kab./Kota	Peringkat US SD/MI			
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Kota Salatiga	1	1	4	1
Kab. Karanganyar	2	5	2	2
Kota Magelang	3	3	1	3
Kab. Temanggung	8	8	6	4
Kab. Magelang	12	13	10	5
Kota Semarang	26	22	23	18

Catatan : untuk jenjang SD/MI sejak tahun pelajaran 2017/2018 sampai sekarang sudah tidak ada pemeringkatan hasil US

Disamping mutu pendidikan, permasalahan tahunan yang dihadapi pendidikan adalah sekolah/lembaga terdampak bencana/banjir di wilayah-wilayah tertentu yang belum terselesaikan dengan baik, dilihat dari aspek bangunan fisik maupun akses dari/ke sekolah/lembaga terdampak

SOLUSI

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan TK Negeri baru sesuai perencanaan.
2. Peningkatan kompetensi guru dengan menambah beasiswa bagi guru untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang S1/D-IV.
3. Menambah jumlah pengawas sekolah dan penilik PNF dengan mengadakan seleksi tingkat Kota Semarang.
4. Pembangunan/rehabilitasi sekolah/lembaga yang kondisinya kurang baik dan terkena bencana sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.

PRESTASI

Insan pendidikan di Kota Semarang telah menunjukkan prestasinya dengan perolehan sebanyak 42 juara/medali, 29 juara/medali tingkat provinsi dan 13 juara/medali tingkat nasional.



Prestasi dan penghargaan insan pendidikan di Kota Semarang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	JENJANG	PROVINSI = 29			NASIONAL = 13			TOTAL
		I	II	III	I	II	III	
1	TK	1	1	-	-	1	-	3
2	SD	11	3	3	5	1	1	24
3	SMP	2	3	3	2	2	1	13
4	PTK	1	-	1	-	-	-	2
5	PNF	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	15	7	7	7	4	2	42
		29			13			

2. Bidang Kesehatan

Indikator kinerja Angka Harapan Hidup Kota Semarang tahun 2018 adalah 77,23 tahun artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2018 akan dapat hidup sampai 77 atau 78 tahun lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Indonesia yaitu 71,20 tahun. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator AHH adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

TABEL ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG

NO	TAHUN	AHH
1.	2015	77.20
2.	2016	77.21
3.	2017	77,21
4.	2018	77,23

Sumber Data : <https://semarangkota.bps.go.id/>
Update Terakhir : 27 Januari 2020

Capaian kinerja secara lebih lengkap urusan wajib kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan anak, dengan indikator sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah Kematian Ibu Maternal	27	18	150	19
2	Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani	100	100	100	100
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	98,7	100	101,32	100
4	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	99	100	101,01	100
5	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99	100	101,01	100
6	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98	99,98	102,02	100
7	Kunjungan ibu hamil K-4	97	100	103,09	100



NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
8	Kunjungan nifas	87	99,59	114,47	99,54
9	Puskesmas PONED	6	5	83,33	6
10	Persalinan oleh Nakes di Faskes	95	100	105,26	-

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak pada tahun 2019 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan seluruh indikator kinerja daerah urusan kesehatan dari target tahun 2019.

Capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan yang terkait program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yaitu indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4), cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir berhasil meningkatkan capaian indikator kinerja menjadi 100 %, atau berhasil melebihi target 99 % untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin sedangkan target cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 98 %. Hal ini meningkat dibandingkan rata-rata capaian SPM Bidang kesehatan terkait program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak tahun 2018 sebesar 97,5 %

Indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita tersebut berhasil dicapai antara lain karena :

1. Persalinan normal telah mencapai 100%, hal ini disebabkan semua persalinan sudah di fasilitas kesehatan, tidak ada yang dengan dukun didukung juga dengan adanya UHC dan promosi kesehatan yang baik.
2. Kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama kali (K1), kunjungan pemeriksaan kehamilan 4 kali (K4) dan kunjungan nifas sesuai standar sudah di akses semua ibu hamil.
3. Kualitas ANC pendampingan dan persalinan yang lebih baik berpengaruh berpengaruh pada outcome bayi yang dilahirkan.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yang telah dilaksanakan, yaitu

1. Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan KB dengan target petugas surveilan KIA dan terlaksananya monev petugas surveilan KIA,
2. Kegiatan pembinaan program kesehatan Ibu dan KB dengan target peningkatan kapasitas bidan, pengkajian kasus kematian maternal, pendampingan RS Ponek, evaluasi data KIA dan KB.
3. Strategi program GIAT (Gerakan Ibu dan Anak Sehat) 4 Sekawan dikembangkan menjadi SANG PISANG (sayangi dan dampingi ibu dan anak Semarang) dengan 5 strategi yaitu :
 - a) DKK di masyarakat melalui pendampingan gasurkes, ambulan hebat, UHC, optimalisasi pendampingan dengan FKK, dan program Jampersal

- b) DKK dengan organisasi profesi :
 - a) IBI : pertemuan BPM
 - b) POGI : pembinaan obsgyn oleh POGI
 - c) IDAI
- c) DKK dengan puskesmas
 - a) Supervisi fasilitatif
 - b) Pembinaan puskesmas PONEK oleh RS PONEK
 - c) Pembinaan Bikor
- d) Pembinaan Rumah sakit ponek ke puskesmas rawat inap. Feedback laporan pasien dari rumah sakit. Punishment rumah sakit
- e) DKK dengan Perusahaan
Peningkatan kesehatan bagi pekerja perempuan. Contoh kegiatan kelas bumil di perusahaan atau tempat kerja , penyuluhan pekerja peningkatan klinik kesehatan.

b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program ini diarahkan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, dengan indikator sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah Kematian Bayi	189	146	129	160Kasus
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup (%)	92	99,39	108,03%	99,09 %
3.	Cakupan Kunjungan Bayi	98,8	100	101%	100,09%
4.	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,06	6,15	131%	6,38per 1000 KH
	Angka Kematian Balita (AKaBa)		7,29	111%	7,46 per 1000 KH
5.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	94,5	100	105%	100,3 %
6.	Cakupan kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	94,6	98,64	104%	98,49%
7.	Cakupan Neonatal Komplikasi yang di tangani	76,5	100%	130,72%	82,88%
8.	Cak Penjaringan Kesehatan siswa SD	100	100	100%	100%
9.	Cak Penjaringan Kesehatan siswa SMP	88	100	114%	100%
10.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100%	100%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita pada tahun 2019 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan seluruh indikator kinerja daerah urusan kesehatan dari target tahun 2019 dengan rata-rata capaian kinerja 107%.

Capain kinerja SPM Bidang Kesehatan yang terkait program Pelayanan Kesehatan Anak Balita yaitu indikator cakupan pelayanan kesehatan balita berhasil meningkatkan capaian indikator kinerja menjadi 99,25%, atau berhasil melebihi target 94,5 % .

Indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita tersebut berhasil dicapai antara lain karena :

- a. Adanya pendampingan petugas Gasurkes KIA selama ibu hamil, pelayanan kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan dan kader, dan persalinan sudah di lakukan pada fasilitas kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi.
- b. Adanya kegiatan kunjungan neonatus dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita dengan target pelacakan kasus kematian neonatus ke RS/BPM, pengkajian pembahasan kasus kematian oleh tim audit AMP dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam rangka penurunan AKI dan AKB,
2. Kegiatan pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas dengan target kinerja terlaksananya pertemuan koordinator UKS, pertemuan petugas remaja puskesmas.

c. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program ini diarahkan untuk Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan indikator sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Incident Rate (IR) , Demam Berdarah, Dengue (DBD)	23	26,37	87,22%	6,23 Per 100.000 penduduk
2.	Angka Bebas Jentik (ABJ)	87	91,88	105,61%	
3	Kasus Demam Berdarah yang dilakukan PE ≤ 48 jam	66	99,55	150,83%	92,01 %
4	Kasus Demam Berdarah yang di fogging sesuai standart ≤ 5 hari	82	100	121,95%	100 %
5	Case Fatality Rate Demam Berdarah (CFR)	1,5	3,18	212,00%	0.97
6	Penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100,00%	100 %
7	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	79	101,74	128,78%	107,3 %
8	Angka keberhasilan pengobatan TB	88	99,04	112,54%	83,50%
9	Penemuan penderita pneumonia balita(cakupan)	93	74,2	79,78%	106 %
10	Angka kematian Diare	< 1	1	100%	-
11	Penderita yang selesai pengobatan Kusta (RFT)	80	73,1	91,38%	92,9 %
12	Persentase ODHA yang aktif minum ARV	55	55,1	100,18%	52,80 %
13	Cakupan kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100	100	100,00%	100%
14	AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 th	2	9	450 %	2,9
15	Kelurahan mengalami KLB PD3I dan keracunan makanan yang ditangani< 24 jam	100	100	100,00%	100 %
16	Ketepatan laporan penyakit tidak menular	80	100	125,00%	85 %



NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
17	Kelengkapan laporan penyakit tidak menular	90	100	111,11%	100 %
18	Cakupan BIAS	98	98,8	100,82%	98,6 %
19	Cakupan imunisasi CJH	100	100	100,00%	100 %
20	Cakupan pelacakan K3JH	100	100	100,00%	100 %
21	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	106,00	106,00%	106,60 %
22	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	103,8	103,80%	103 %
23	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	103,25	103,25%	100,95 %
24	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	97,51	97,51%	95,41 %
25	Persentase ODHA yang aktif minum ARV	55	55,1	100,18%	52,80 %
26	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DM	100	97,49	97,49%	164,23 %
27	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	119,70	119,70%	100 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan sebagian besar indikator kinerja Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dari yang ditargetkan pada tahun 2019 menjadi rata-rata realisasi capaian kinerja 100,33 %, atau berhasil mencapai 19 target indikator kinerja program pencegahan dan peningkatan penanggulangan penyakit dari 28 indikator kinerja.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular memiliki 8 indikator yang termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah urusan Kesehatan, SPM bidang Kesehatan. Terdapat 4 indikator kinerja yang berhasil mencapai realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indikator kinerja :

1. Kelurah *Universal Child Immunization* (UCI) pada tahun 2019 menargetkan seluruh kelurahan mencapai 100% UCI atau menargetkan seluruh bayi di desa/kelurahan memperoleh imuniasasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan Campak.
2. Penemuan dan penanganan penderita DBD
Realisasi penemuan dan penanganan penanganan penderita DBD telah mencapai sesuai target 100 %. hal ini disebabkan karena semua kasus DBD yang ditemukan mendapatkan penanganan sesuai standar.
3. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.
Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Tahun 2019 realisasi kinerja indikator ini berhasil mencapai 103,80%.
4. AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 th telah mencapai 100%. Hal ini disebabkan kegiatan AFP digunakan sebagai screening kasus polio. Untuk

membuktikan bebas polio harus menemukan kasus AFP dan telah dilakukan screening terhadap 9 orang yang ditemukan, dan dinyatakan bukan sebagai positif AFP .

Definisi Operasioal AFP rate per 100.000 penduduk adalah kegiatan screening anak usia 0 sampai dengan kurang dari 15 th yang mengalami tanda dan gejala penurunan tonus otot, dimana awalnya anak tersebut mampu jalan menjadi tidak bisa jalan yang bukan disebabkan oleh rudapaksa.

5. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat terdapat perubahan definisi operasional dari provinsi. Dulu semua yang ditangani dinilai bisa 100%. Tapi sekarang mengikuti estimasi prevalensi provinsi, dengan estimasi ODGJ Kota Semarang sebesar 4172 jiwa. Target sasaran Kota Semarang tahun 2019 adalah 50% dari estimasi ODGJ Kota Semarang.
6. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TB dinilai dari persentase jumlah terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Target terduga TBC yang ditetapkan adalah sebesar 13.901 terduga TBC, namun yang berhasil dilayani sebanyak 14.735 terduga TBC. Jadi cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebesar 105.9 %.
7. Angka Keberhasilan Pengobatan TB adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TBC semua tipe yang menyelesaikan pengobatan (sembuh dan pengobatan lengkap) terhadap pasien TBC yang tercatat dan diobati. Target nasional dari angka keberhasilan pengobatan pasien dengan TBC adalah sebesar 90 % dan untuk Kota Semarang ditetapkan sebesar 88 %, sedangkan capain dari Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebesar 99,04 % dari target Dinas Kesehatan Kota Semarang. Angka ini didapat dari pasien TBC yang tercatat dan diobati di tahun 2018 sebanyak 3.333 kasus, dari jumlah tersebut sebanyak 3.301 dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap. Oleh karena itu, pantauan pada pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan harus dipantau dengan ketat. Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan (IPT anak \leq 5 tahun = 510).

Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/ tidak menular dengan kegiatan pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,
- b. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik,
- c. Kegiatan peningkatan imunisasi,
- d. Kegiatan pencegahan, penularan penyakit tidak menular,
- e. Operasional komisi penanggulangan AIDS kota semarang,
- f. Kegiatan penanggulangan KLB,
- g. Kegiatan pelayanan pengendalian penyakit HIV, AIDS dan IMS.

Kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih serius dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular antara lain dapat dilihat pada :

1. Pencapaian indikator kinerja Incident rate (IR) DBD dalam kurun waktu 3 tahun mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Realisasi capaian kinerja IR DBD tahun 2016 sebesar 25,22 per 100.000 penduduk, tahun 2017 sebesar 18,10 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2018 realisasi capaian IR DBD sebesar 6,23 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019 realisasi capaian IR DBD mengalami penurunan yaitu sebesar 26,37per 100.000 penduduk. Permasalahan dalam pengendalian DBD tahun 2019 adalah :
 - a) Kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN secara mandiri masih kurang. Masyarakat cenderung menunggu adanya pemantauan jentik dari pihak lain (kader, gasurkes, kelurahan, kecamatan dan puskesmas)
 - b) Partisipasi masyarakat untuk melakukan PSN serentak masih belum massive. Jadi gerakan PSN serentak belum dilaksanakan diseluruh wilayah Kota Semarang, hanya beberapa tempat saja;
 - c) Untuk program Sicientik, masih ada sekolah yang belum melaksanakan program tersebut dengan berbagai alasan
 - d) Program celana panjang untuk siswa, sirine penanda PSN dan papan PSn belum optimal;
 - e) Masih ada rumah sakit yang memberikan persepsi kurang tepat kepada keluarga pasien mengenai diagnosa dan pengendalian DBD;
 - f) Perlu optimalisasi lagi tim pokjanal DBD mulai tingkat kota sampai dengan kelurahan

- g) Tupoksi gasurkes yang tidak fokus di DBD seperti tahun-tahun sebelumnya;
- h) Kegiatan tenaga P2TVZ puskesmas overload sehingga tidak bisa fokus untuk penanggulangan DBD;
- i) Kurangnya pelatihan teknis mengenai DBD baik dari pusat maupun provinsi
- j) Program pemberdayaan masyarakat melalui SEMATIK tidak berjalan seperti sebelumnya.

Rekapitulasi Penderita DBD (DBD+DSS) Tahun 2019
Data Kumulatif 1 Januari sampai 31 Desember 2019

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Total		IR PER 100.000 Penduduk 2019	CFR	IR PER 100.000 Penduduk 2018
			P	M			
1	Tembalang	178.830	122	0	68,22	0,00%	7,42
2	Candisari	80.490	36	3	44,73	8,33%	11,00
3	Banyumanik	139.927	42	1	30,02	2,38%	12,15
4	Semarang Selatan	69.375	20	0	28,83	0,00%	1,33
5	Gajah Mungkur	60.146	17	1	28,26	5,88%	13,09
6	Pedurungan	192.798	51	0	26,45	0,00%	9,48
7	Ngaliyan	138.618	34	2	24,53	5,88%	5,09
8	Gunung Pati	93.866	21	0	22,37	0,00%	5,53
9	Mijen	73.479	16	3	21,77	18,75%	1,37
10	Genuk	114.252	17	0	14,88	0,00%	9,30
11	Gayamsari	73.954	11	0	14,87	0,00%	4,12
12	Semarang Utara	125.795	17	1	13,51	5,88%	1,67
13	Semarang Barat	159.018	20	2	12,58	10,00%	1,86
14	Semarang Tengah	61.073	6	1	9,82	16,67%	3,28
15	Semarang Timur	73.491	7	0	9,52	0,00%	4,09
16	Tugu	33.466	3	0	8,96	0,00%	3,03
KOTA SEMARANG		1.668.578	440	14	26,37	3,18%	6,23

Dirangking berdasarkan Incidence rate

Keterangan :

- a. Jumlah kasus DBD (DBD & DSS) sesuai kriteria WHO 1997 : 440 kasus
- b. Jumlah kasus Demam Dengue (DD)/ Non DBD : 3625 kasus
- c. Jumlah data tidak sesuai kriteria WHO : 27 kasus
- d. Sumber data penduduk berdasarkan dispenduk capil 31 Desember 2018

$$IR = \frac{\text{Penderita}}{\text{jumlahpenduduk}} \times 100.000$$

$$CFR = \frac{M}{P} \times 100.000$$

- 2. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita belum mencapai target 93% disebabkan dalam perhitungan target menggunakan angka estimasi dimana angka estimasi tersebut mengabaikan upaya yang dilakukan. Perhitungan cakupan penemuan penderita pnemonia dihitung dengan membagi jumlah capaian (kasus pnemonia) dengan jumlah estimasi penderita pneumonia.

3. Capaian kinerja cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum mencapai target 100 % disebabkan terjadi peningkatan target estimasi sasaran yang sebelumnya menggunakan riskesdas th 2013 sebesar 26,4% dari jumlah penduduk Kota Semarang usia 15 th ke atas, sedangkan ditahun 2019 menggunakan riskesdas tahun 2018 dengan prevalensi meningkat menjadi 37%.
4. Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DM
Realisasi capaian kinerja pelayanan kesehatan penderita DM pada tahun 2019 sebesar 97,49%. hal ini disebabkan terjadi peningkatan prevalensi pada kasus DM dari 1,1% pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,1% pada tahun 2019 sesuai riskesdas tahun 2018. Indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja tersebut gagal dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/ tidak menular dengan kegiatan pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
5. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat belum mencapai target 100 % dikarenakan ada perubahan DO dari provinsi . Dulu semua yang ditangani dinilai bisa 100%. Tapi sekarang mengikuti estimasi prevalensi provinsi.

d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Kelompok usia lanjut aktif	94	99,59	106	100
2.	Persentase Posyandu Balita	85	100	118	100
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80	99,87	125	99,83

Pencapaian indikator kinerja kelompok usia lanjut aktif sebesar 99,59% telah melampaui target kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 94%. Target Posyandu balita sebanyak 1592 telah dicapai di tahun 2019 ini. Hal ini meningkat dari target tahun 2018 sebesar 80% atau sebanyak 1592 posyandu balita aktif.

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai telah berhasil meningkatkan indikator kinerja cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dari yang ditargetkan 80%. menjadi 99,87% , atau berhasil mencapai 125%. Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 958,455 orang sedangkan jumlah semua penduduk berusia 60

tahun keatas yang ada di wilayah Kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 959.660

Indikator kinerja program peningkatan pelayanan kesehatan lansia yang masuk dalam indikator kinerja daerah urusan kesehatan yaitu cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kegiatan pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan dengan target kinerja pembinaan pengelolaan program lansia, evaluasi puskesmas santun lansia, lomba senam lansia, sosialisasi gizi lansia dan pedoman gizi seimbang bagi kader posyandu lansia, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan lansia dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat di dalam masyarakat

e. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Capaian kinerja pada urusan wajib kesehatan program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Presentase penerapan penggunaan obat rasional	84,5	87	102,96	85
2	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	86	89,19	103,71	86
3	Ketersediaan Obat & Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100	100	100,00	100
4	Penerapan Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas	92	92	100,00	90
5	Persentase Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang sesuai standart	76	77	101,32	72

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan keseluruhan indikator kinerja program obat dan perbekalan kesehatan dari yang ditargetkan di tahun 2019 menjadi lebih dari 100% realisasi tahun 2019.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan capaian indikator kinerja sebesar 2,5%.

Indikator kinerja proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar merupakan indikator kinerja utama. Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 89,19% meningkat dari realisasi tahun 2018 sebesar 86%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pendistribusian obat dan logistik,

2. Program obat dan perbekalan kesehatan dengan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan obat 37 puskesmas, sarana prasarana instalasi farmasi dan tersedianya obat dan reagen untuk pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
3. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit dengan target kinerja pembinaan atau monitoring pelayanan kefarmasian di puskesmas.
4. Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan bertujuan tersedianya alat kesehatan di puskesmas, instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan.

f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja pada urusan wajib kesehatan program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Respon Time Unit Reaksi Cepat Layanan kesehatan (Ambulan Hebat/ Si Cepat) sesuai SOP	60	100	166,67	100
2	Persentase puskesmas Branding	60	100	166,67	40
3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,28	0,21	75	0,201
4	Rasio Fasilitas Kesehatan Dasar / 100.000 penduduk	28	21	75	20,08
5	Rasio dokter per satuan Penduduk x 1.000	1,99		1,99	1,653
6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1.000	2,35		2,35	2,594
7	Rasio rumah sakit per satuan penduduk x 1000	0,02	0,02	100,00	0,016
8	Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/ 1000 penduduk	2,24	3,06	136,61	3,07
9	Cakupan puskesmas (%)	243,8	231,25	94,85	231,25
10	Cakupan pembantu Puskesmas	22,6	21,46	94,96	20,9
11	proporsi puskesmas yang telah melakukan kegiatan kesehatan tradisional	20	100	500,00	-
12	Presentase Rumah Sakit yang memenuhi standar Permenkes No 56 Tahun 2014	62,07	100	161,11	62,07
13	Presentase klinik utama yang memenuhi standar	83	86,6	104,34	83
14	Presentase laboratorium klinik swasta yang memenuhi standar	83	87,5	105,42	83

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja persentase puskesmas branding dari yang ditargetkan 60 % menjadi 100 %, atau berhasil mencapai kinerja sebesar 166,67 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 40%. Jumlah puskesmas branding pada tahun 2019 sebanyak 22 puskesmas yaitu:



1. Puskesmas Poncol dengan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
2. Puskesmas Halmahera dengan program VCT Terpadu
3. Puskesmas Mangkang dengan program Infeksi Menular Seksual (IMS)
4. Puskesmas Lebdosari program VCT Terpadu
5. Puskesmas Karangdoro program WUS, CATIN
6. Puskesmas Karang Malang : SAYANG IBU
7. Puskesmas Lebdosari (IMS=Infeksi Menular Seksual)
8. Puskesmas Bugangan (TB)
9. Puskesmas Tlogosari Kulon (Kesehatan Tradisional)
10. Puskesmas Gunungpati (Kesehatan Indra dan IPWL)
11. Puskesmas Mijen (Kesehatan Haji)
12. Puskesmas Srandol program TB
13. Puskesmas Miroto dengan RAMAH ANAK
14. Puskesmas Pandanaran : Fisioterapi
15. Puskesmas Ngemplak Simongan : VCT Terpadu
16. Puskesmas Gayamsari : HATRA
17. Puskesmas Genuk : ANAK SEKOLAH
18. Puskesmas Bangetayu : PONED
19. Puskesmas Tlogosari Wetan : TUNTAS TB
20. Puskesmas Kedung Mundu : Akupuntur dan AKupresur
21. Puskesmas Ngesrep : PEDULI IBU DAN ANAK
22. Puskesmas Padangsari : SIK HOLISTIK

Terdapat 2 indikator kinerja daerah urusan wajib kesehatan pada program upaya kesehatan masyarakat yang telah berhasil mencapai target yaitu :

1. Rasio rumah sakit persatuan penduduk x 1000 dari yang ditargetkan sebesar 0,02% menjadi 0,02%.

Tahun 2019 jumlah rumah sakit di Kota Semarang sebanyak 29 rumah sakit. Penduduk Kota Semarang pada triwulan I tahun 2019 sebanyak 1.670.379. Perhitungan rasio rumah sakit persatuan penduduk adalah membagi jumlah rumahsakit (numerator) dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 (denominator) dikali 1000.

2. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/ 1.000 penduduk dari yang ditarget tahun 2019 sebesar 2,24 menjadi 3,06. Peningkatan jumlah TT disebabkan adanya penambahan 1 (satu) rumah sakit swasta di tahun 2018. Tahun 2019 jumlah tempat tidur (TT) rumah sakit sebanyak 5118 TT. Perhitungan rasio jumlah TT rumah sakit per 1000 penduduk adalah membagi jumlag TT rumah sakit (numerator) dengan jumlah penduduk kota semarang tahun 2019 (denominator) dikali 1000.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan revitalisasi sistem kesehatan .
2. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan,
3. Kegiatan penyediaan dana kegiatan 37 puskesmas kota Semarang, instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan,
4. Kegiatan penyediaan dana bantuan operasional kesehatan 37 puskesmas
5. Pengeloan bantuan operasional kesehatan
6. Kegiatan pelayanan kesehatan rujukan
7. Kegiatan pengembangan kemitraan

g. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Prosentase promosi kesehatan melalui media elektronik	100	100	100	90
2.	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	70	96	137	94,64
3.	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik	5	100	2000	4
4.	Jumlah penyuluhan melalui media cetak	5	100	2000	5
5.	Jumlah penyuluhan diluar gedung	6	100	1667	6
6.	Jumlah kegiatan dialog interaktif bidang kesehatan	2	100	5000	15

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan :

1. Indikator kinerja prosentase promosi kesehatan melalui media elektronik dari yang ditargetkan 100% menjadi 100%, atau berhasil mencapai 100%.
Hal ini meningkat dengan realisasi tahun 2018 sebesar 90
2. Indikator kinerja prosentase rumah tangga PHBS dari yang di targetkan 70 % menjadi 96%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 94,64 %.
3. Bentuk penyuluhan melalui media cetak dilakukan dengan cara membuat leaflet, poster, koran, booklet dan roll banner.
4. Penyuluhan luar gedung dilakukan berupa pemetaan PHBS, pelatihan PHBS, penyuluhan kesorga pada jamaah haji.
5. Kegiatan dialog interaktif bidang kesehatan sebanyak 2 yang dilakukan oleh stakeholder.
6. Beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan, yaitu :
 1. Presentase promosi kesehatan melalui media elektronik realisasi di

tahun 2019 sebesar 100%. Kegiatan promkes melalui media elektronik diwujudkan dalam pembuatan iklan layanan masyarakat dengan berbagai tema kesehatan dan materi edukasi melalui radio. Penayangan iklan layanan masyarakat melalui video jaringan yang terdapat di setiap puskesmas di Kota Semarang dan dapat diakses pada website resmi Dinas Kesehatan Kota Semarang

2. Perkembangan PHBS dari tahun ke tahun telah menunjukkan kecenderungan peningkatan hal ini dapat dilihat indikator Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2018 sebesar 94,64 % dan realisasi di tahun 2019 tercapai sebesar 96%. keberhasilan dalam pencapaian realisasi dari tahun ke tahun ini disebabkan saat melaksanakan survey rumah tangga sehat tidak hanya melibatkan petugas kesehatan saja tetapi juga melibatkan peran serta TPPKK dan hal ini menjadi kinerja pokja IV TPPKK.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan target kinerja terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan terlaksananya pembuatan media promosi,
2. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan target kinerja terlaksananya pertemuan perencanaan pemetaan PHBS RT oleh TP PKK kecamatan dan kelurahan dan terlaksananya pengelolaan kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
3. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan target kinerja orientasi peningkatan peran generasi muda (SMA dan SMK) di bidang kesehatan dalam pencegahan penyakit (kesehatan reproduksi, KIA, peningkatan konsumsi Fe), orientasi anggota FKK dalam deteksi dini faktor resiko hamil risti, kematian ibu dan bayi dan gizi buruk, kegiatan saka bhakti husada dan orientasi anggota FKK di bidang kesehatan dalam Germas Hidup Sehat.
4. Kegiatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dengan target kinerja sosialisasi Germas dan Pencegahan penyakit.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan kemitraan dengan tujuan orientasi germas terhadap gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP).

h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Tercapainya Swasti Saba Wistara	100	100	100	75
2.	Presentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	90	100	111	100
3.	Cakupan air bersih	94,4	82	87	94,2
4.	Kualitas air minum memenuhi syarat	85	91,13	107	75
5.	Kualitas air bersih memenuhi syarat	80	88,92	111	75
6.	Penduduk yang memanfaatkan jamban	96,3	100	104	100
7.	Rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah	89,5	87,67	98	86
8.	Tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan	92,9	87,67	94	88
9.	Tempat pengelolaan Pestisida sehat	98,6	100	101	100
10.	Institusi yang di bina	82,9	88,57	107	82,8
11.	Tempat Pengelolaan Makanan Sehat	82,9	81	98	85,86

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan :

1. Tercapainya swastisaba dari target 100% menjadi 75%.
Tahun 2019 seluruh kelurahan di Kota Semarang yaitu sebanyak 177 kelurahan telah terverifikasi swastisaba wistara.
2. Di Kota Semarang presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tahun 2018 sebesar 100 % dan naik pada tahun 2019 realisasi capaian kinerjanya dapat dipertahankan sebesar 100 % dari target sebesar 90 % hal ini disebabkan karena didukung oleh kegiatan Hibah Intensif Kota/Daerah (HIK/HID) yang mewajibkan kelurahan untuk melaksanakan STBM. Kelurahan yang telah melakukan STBM (minimal pemukiman 1 dusun).

Presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu

1. Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat dengan target kinerja pemetaan kawasan kota sehat, verifikasi STBM, kajian kota sehat, penguatan kawasan kota sehat,
2. Kegiatan penyehatan lingkungan dengan pembangunan sarana IPAL untuk puskesmas, peningkatan inspeksi kualitas lingkungan dan inspeksi kualitas petugas, monitoring 5 pilar STBM.

i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Prevalensi balita gizi buruk	0,36	0,33	120%	0,38 %
2	Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center	80	100	125%	62,16 %
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100%	100 %
4	prevalensi balita stunting	< 9,9	2,57	385,2%	2.50
5	Bayi mendapat ASI Eksklusif	65,6	69,39	106%	68,2 %
6	Balita (0-59 bl yang datang & ditimbang (D/S)	81,5	83,94	103%	83.77 %
7	Balita (0-59 bl yang naik berat badannya (N/D')	89,4	92,47	103%	92,66 %
8	Balita bawah garis merah (BGM)	2,5	1,11	225,2%	1,08%
9	Prevalensi gizi kurang balita	<4,8	2,33	206%	2,43%
10	Ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	97,4	100	103%	100%
11	Balita (12-59 bl) mendapat 2 kali/th vit A	100	100	100%	100%
12	Bayi (6-11 bl) mendapat 1 kali/th vit A	100	100	100%	100%
13	Ibu nifas dapat vit A	94	100	106%	100%
14	prevalensi Anemi ibu hamil	<19,5	15,05	129,57%	17,24%
15	Ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	5,2	7,89	66%	5.66%
16	Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bl dari keluarga miskin	100	100	100%	100%
17	Keluarga sadar gizi	82	82,3	100%	85,12%
18	Kelurahan dengan garam beriodium	98,2	99,25	101%	99,20

Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dari hasil penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu.

1. Realisasi capaian prevalensi status gizi buruk tahun 2019 mencapai 0,30% atau sebanyak xx balita dari xx balita, mengalami penurunan dari 23 kasus di tahun 2018. Gizi buruk terjadi bukan hanya karena permasalahan kurangnya konsumsi gizi, tetapi dapat disebabkan karena faktor sosial ekonomi yang masih kurang, pola asuh yang kurang baik, lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat, juga adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung bawaan anak, dan penyakit infeksi seperti TBC sebanyak 11 anak
2. Capaian puskesmas yang memiliki gizi center telah mencapai 100 % dari target 80%, hal ini mengalami peningkatan di dibandingkan tahun 2018. Puskesmas yang memiliki gizi center pada tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan sebagai puskesmas gizi center dan kesepuluh puskesmas tersebut juga telah memiliki ruang konseling gizi dan ruang ASI yaitu Puskesmas Gunung Pati, Sekaran, Karangmalang, Mangkang, Ngaliyan, Manyaran, Miroto, Bandarharjo, Tlogosari Kulon dan Puskesmas Candilama. Di tahun 2019 terjadi penambahan puskesmas yang

memiliki gizi center yaitu puskesmas.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan :

1. Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin,
2. Kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya,
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

j. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT	88	98,34	111,75	86
2	Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan	91	100	109,89	100

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase industri pangan yang menerapkan CPP PIRT dan persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan sesuai dengan yang ditargetkan , atau berhasil mencapai 100 %. Persentase industri rumah tangga yang menerapkan CPP BIRT dan persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan merupakan indikator Kinerja yang berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga dengan output terlaksananya kegiatan penyuluhan keamanan pangan, pengawasan peredaran pangan hasil IRTP dan pembinaan/ monitoring sarana produksi industri rumah tangga pangan

k. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi	60	100	166,67	100
2	Persentase puskesmas yang telah di reakreditasi	35	29,7	84,86	5
3	Pendampingan pasca akreditasi	90	100	111,11	100

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Indikator kinerja prosentase puskesmas yang telah terakreditasi dari yang ditargetkan 60% menjadi 100%, atau berhasil mencapai 166,67 %.

Hal ini sama dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100 %. Hasil kinerja pada tahun 2019 seluruh puskesmas di Kota Semarang sebanyak 37 puskesmas telah terakreditasi.

Realisasi indikator pendampingan pasca akreditasi sebesar 100% dikarenakan seluruh puskesmas di Kota Semarang sebelum maupun setelah akreditasi selalu mendapatkan pendampingan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Indikator kinerja pendampingan pasca akreditasi baru ada di tahun 2018.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan revitalisasi sistem kesehatan. Target kinerjanya adalah terlaksananya pembinaan akreditasi puskesmas
3. Pendampingan Kegiatan akreditasi puskesmas

Indikator kinerja puskesmas yang telah direakreditasi belum berhasil mencapai target 35% atau sama dengan 13 puskesmas ter-reakreditasi. Capaian kinerja ini baru berhasil melakukan kegiatan reakreditasi 11 puskesmas atau sebesar 29,7%, masih terdapat 2 puskesmas yang belum melakukan reakreditasi ditahun 2019, yaitu Puskesmas Pandanaran dan Puskesmas Mijen, disebabkan karena Puskesmas Pandanaran belum menempati gedung yang representatif, masih berada pada gedung sementara di Tri Lomba Juang rencana untuk pindah menempati gedung baru di tahun 2020. Puskesmas Mijen mengalami peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit kelas D.

1. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase puskesmas perspektif Gender	50	78,38	156,76	51,00
2	Pengembangan puskesmas perspektif gender	20	20	100,00	54,05
3	Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014	20	-	0,00	-

Hasil kinerja pada tahun 2019 adalah Persentase puskesmas yang sudah perspektif gender sebanyak 78,38 % atau 29 puskesmas. Terjadi penambahan jumlah puskesmas persepektif gender sebanyak 10 puskesmas. Kriteria untuk puskesmas perspektif gender yaitu : (1). memisahkan tempat duduk (ruang tunggu), pembedaan toilet laki-laki dan perempuan, terdapat ruang laktasi dan pemisahan ruang perawatan (rawat inap) minimal setiap puskesmas harus memiliki 2 kriteria tersebut.

Indikator kinerja pengembangan puskesmas perspektif gender merupakan indikator baru dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2018. Diharapkan dengan penambahan indikator ini mampu meningkatkan pengembangan puskesmas perspektif gender.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1). pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, (2). rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu, (3). rehabilitasi sedang/ berat puskesmas, (4). rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas puskesmas.

m. Program Informasi Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah Rumah Sakit yang Terkoneksi	10	15	150 %	10 unit
2.	Database pelayanan kesehatan terpadu	5	11	220 %	5 data
3	Persentase ketersediaan data /Informasi Bidang Kesehatan akurat dan tepat waktu (profil)	85	90	105,88 %	85%
4	Persentase Puskesmas yang mengisi data / informasi yang lengkap dan valid di Bank Data Kesehatan	100	100	100,00 %	100%
5	Pengembangan system informasi kesehatan	4	5	125,00 %	4 sistem
6	Persentase Permasalahan sistem informasi yang selesai di tangani	90	95	105,56 %	90%
7	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi	4000	93161	2329,03 %	167.626

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja Database pelayanan kesehatan terpadu dari yang ditargetkan 5 data menjadi 11 data, atau berhasil mencapai 220%. Hal ini meningkat dari realisasi tahun 2018 sebesar 5 data. Database pelayanan kesehatan terpadu yaitu;

NO	NAMA DATABASE	NO	NAMA DATABASE
1.	SIMPUS	7.	SIP
2.	SIP Dokter	8.	Sigaspol
3.	HRIS	9.	SI Klinik
4.	HEWS	10.	Sayang Bunda
5.	Ambulan Hebat	11.	Sikempling
6.	Dashboard		

Perhatian puskesmas terhadap pentingnya data kesehatan semakin meningkat, hal ini dapat dilihat oleh adanya peningkatan presentase puskesmas yang mengisi data/informasi yang lengkap dan valid di bank data kesehatan. Realisasi pencapaian kinerja persentase puskesmas yang mengisi data/ informasi yang lengkap dan valid di bank data kesehatan meningkat dari tahun 2018 sebesar 85% menjadi 100% di tahun 2019.

Realisasi pengembangan sistem informasi kesehatan meningkat di tahun 2019 menjadi 5 sistem dari target 4 sistem. Sistem yang dikembangkan pada tahun 2019 adalah :

1. Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan
2. Sikempling yaitu sistem kesehatan lingkungan
3. Sistem Informasi Puskesmas versi 2019
4. Sistem PIS-PK Kota Semarang.

Upaya promotif dan preventif ditingkatkan melalui promosi dengan media cetak, media elektronik dan media sosial lebih diutamakan sehingga pencapaian indikator kinerja jumlah masyarakat yang mendapat informasi meningkat signifikan dari target tahun 2019 yaitu sebanyak 93.161 jumlah permohonan informasi.

Indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi merupakan indikator kinerja utama dinas kesehatan. Pada tahun 2019 indikator ini sudah mencapai 15 rumah sakit yang terkoneksi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui Health Record Information System meningkat dari realisasi tahun 2018 yaitu sebanyak 10 rumah sakit. Hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik dengan Rumah Sakit. RS yang telah terkoneksi di tahun 2019 yaitu RS Kariadi, RSWN, RS Tugurejo, RS Sultan Agung, RS Panti Wilasa Dr Cipto, RSND, RS Panti wilasa Citarum, RS Elisabeth, RS Permata Medika, RSIA Bunda, RS Roemani, RS Banyumanik, RS Hermina Pandanaran dan RS Hermina Banyumanik.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu kegiatan manajemen informasi kesehatan.

n. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Nilai Kinerja BLUD Puskesmas	81	92,73	114,5	81,15

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase nilai kinerja BLUD puskesmas dari yang ditargetkan 81% menjadi 92,73 %, atau berhasil mencapai 114,4 %.

Hal ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 81,15%. persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas merupakan pencapaian seluruh puskesmas yang telah melaksanakan atau mengelola aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD dari aspek keuangan, aspek kepatuhan pengelolaan keuangan dan aspek pelayanan

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu kegiatan pelayanan BLU

Puskesmas Poncol, Miroto, Bandarharjo, Bulu Lor, Halmahera, Bugangan, Karang Doro, Pandanaran, Lamper Tengah, Karangayu, Lebdosari, Manyaran, Krobokan, Ngemplak Simongan, Gayamsari, Candilama, Kagok, Pegandan, Genuk, Banget Ayu, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, Kedungmundu, Rowosari, Ngesrep, Padangsari, Srongol, Pudak Payung, Gunungpati, Mijen, Karangmalang, Tambak Aji, Purwoyoso, Ngaliyan, Mangkang, Karanganyar, Sekaran,

o. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan Kesehatan	100	100	100	100
2.	Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan	100	94,79	94,79	95,47
3	Cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN-KIS	100	100	100	100

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan dari yang ditargetkan 100% menjadi 94,79 %, atau berhasil mencapai 94,79%. Jumlah penduduk Kota Semarang yang di daftarkan dalam program JKN oleh pemerintah kota Semarang tahun 2018 sebesar 291.592 jiwa sedangkan di tahun 2019 sebanyak 291.592 jiwa.

Penurunan persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan sebesar 94,79% merupakan dampak Surat Keputusan Mensos No.79 tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta PBI jaminan Kesehatan. Mensos menonaktifkan 5.227.852 jiwa peserta PBI.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya .
2. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan kegiatan integrasi jamkesmaskot ke JKN-KIS dan kegiatan pendampingan jamkesmaskot di tahun 2019 berupa pembiayaan kesehatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di RSUD Kota Semarang.

a. HASIL CAPAIAN INDIKATOR RSUD

Pengukuran kinerja tahun anggaran 2019 didahului dengan penetapan indikator kinerja berupa input, output, outcome, benefit dan impact. Selanjutnya dilakukan penetapan target kinerja untuk tiap indikator tersebut. target kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang ingin dicapai yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya sehingga diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya sasaran yang ditetapkan telah dapat diwujudkan / dicapai. Secara rinci hasil pengukuran kinerja disajikan dalam lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan	73,00	73,00	100	72,00
2.	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	73,50	93,15	126,7	85,01
3.	Nilai Kinerja BLUD Sehat	80,00	70,20	87,75	73,30

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Terpenuhinya Peralatan Kesehatan RS Type B Pendidikan dari yang ditargetkan 72,00 menjadi 73,00 atau berhasil mencapai target 101,4 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 72,00.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Pembangunan Rumah Sakit; (2) Pengadaan Alat – Alat Kesehatan; (3) Dana Bantuan Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Peralatan Rujukan (DAK).

Pada tahun 2019 Indikator kinerja Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS dari yang ditargetkan 73,50 mencapai 93,15 atau berhasil melebihi target 126,7 %.

Pada tahun 2019 Indikator kinerja Nilai Kinerja BLUD Sehat targetnya adalah 80,00 dan realisasinya 70,20 atau berhasil mencapai target 87,75 %. Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 73,30

Adapun Indikator Capaian Kinerja untuk Pelayanan pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro adalah sebagai berikut :

a) Nilai Kinerja Keuangan

No	INDIKATOR	BOBOT NILAI	TAHUN 2019	
			HAPER	NILAI RIIL
1	Retrun on Invesment (ROI)	2	(5.00)	0.20
2	Rasio Kas (Cash Ratio)	3	1.43	0.00
3	Rasio Lancar (Current Ratio)	3	196.25	3.00
4	Periode Penagihan Piutang (Collection Periode)	3	148.05	2.10
5	Perputaran Persediaan (PP)	3	15.52	3.00
6	Total Asset Turn Over (TATO)	3	49.19	1.20
7	Ratio Total Modal Sendiri terhadap Total Total Asset (TMS terhadap TA)	3	93.29	1.80
	Jumlah	20		11.30



b) Nilai Kinerja Pelayanan

No	INDIKATOR	BOBOT NILAI	TAHUN 2019	
			HAPER	NILAI RIIL
A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS				
1	Rata-rata kunjungan Rawat Jalan/hari	2	0.75	0.00
2	Rata-rata kunjungan Rawat Darurat/hari	2	1.11	1.20
3	Pertumbuhan Pasien Rawat Inap	2	0,96	0,80
4	Pemeriksaan Radiologi / hari	1,5	0.97	0,60
5	Pemeriksaan Laboratorium / hari	1,5	1.03	0.60
6	Rata-rata operasi / hari	1	0.89	0.20
7	Rata-rata rehab medik / hari	1	0.81	0.00
B. EFISIENSI PELAYANAN				
1	Rasio pasien Rawat Jalan dengan Dokter	1	16.35	0.50
2	Rasio pasien Rawat Jalan dengan Perawat	1	19.42	0.50
3	Rasio pasien Rawat Darurat dengan Dokter	1	13.73	0.50
4	Rasio pasien Rawat Darurat dengan Perawat	1	4.12	0.50
5	Rasio pasien Rawat Inap dengan Dokter	1	7.00	0.25
6	Rasio pasien Rawat Inap dengan Perawat	1	1.42	0.25
7	B O R	2	68.42	1.50
8	A V L O S	2	4.95	1.50
9	B T O	2	65.75	1.00
10	T O I	2	1.73	1.50
C. PERTUMBUHAN DAYA SAING				
1	Sales Growth (SALG)	1	0.40	0.00
D. PENGEMBANGAN SDM				
1	Program Pendidikan dan Latihan	2	Ada Program semua dilaksanakan	2.00
2	Penghargaan dan Sanksi	1	Ada Program semua dilaksanakan	1.00
E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Pengembangan produk baru bidang pelayanan	2	Melaksanakan sepenuhnya	2.00
2	Pengembangan sistem manajemen	1	Melaksanakan sepenuhnya	1.00
3	Peningkatan Penguasaan Teknologi	1	Ada Program semua terlaksana	1.00
F. ADMINISTRASI				
1	Rancangan RBA	2	Tepat Waktu	2.00
2	Laporan Triwulan (Ketepatan)	2	Tepat Waktu	2.00
3	Laporan Tahunan (Ketepatan)	2	Tepat Waktu	2.00
Total Indikator Kinerja Operasional		40		24.40

c) Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat

No	INDIKATOR	BOBOT NILAI	TAHUN 2019	
			HAPER	NILAI RIIL
A. MUTU PELAYANAN				
1	Emergency response time	3	5 Menit	3,00
2	Angka kematian di gawat darurat	3	0,56 %	3,00
3	Angka kematian \geq 48 jam	3	10,33 %	3,00
4	Angka pasien rawat inap yang dirujuk	3	0, %	3,00
5	Post Operative Death Rate	3	1,37 %	2,00
6	Angka infeksi nosokomial	3	0,13 %	3,00
7	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	3	30 Menit	2,00
8	Waktu tunggu sebelum operasi	3	2 Hari	2,00
B. EFISIENSI PELAYANAN				
1	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain	1	Ada program dilaksanakan semua	1,00
2	Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	1	Ada program dilaksanakan	1,00



No	INDIKATOR	BOBOT NILAI	TAHUN 2019	
			HAPER	NILAI RIIL
			semua	
3	Rasio tempat tidur kelas III	1	61,71 %	1,00
4	Pemanfaatan TT (BOR) kelas III	1	66,10 %	0,50
5	Prosentase pasien tidak mampu	1	29,46 %	0,50
C. KEPUASAN PELANGGAN				
1	Prosentase complain	2	komplain ditindak lanjuti	1,00
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	2	30-60	1,50
3	Kemudahan pelayanan	2	Ada Petunjuk lengkap	2,00
D. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN				
1	Kebersihan lingkungan	2,5	SOP sudah dilaksanakan seluruh	2,50
2	Hasil Uji AMDAL	2,5	Ada tindak lanjut, sampai selesai	2.50
	Total Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat	40	-	34.50

Dari 3 tabel Indikator Kinerja Rumah Sakit BLUD diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI
1	Nilai Kinerja Keuangan	11.30
2	Nilai Kinerja Pelayanan	24.40
3	Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	34.50
	JUMLAH	70.20

Total Score dari ketiga Nilai Indikator tersebut adalah $11.30 + 24.40 + 34.50 = 70.20$ **Total Score** di atas dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dikategorikan **SEHAT** dalam pengelolaan keuangan dengan Nilai **A** ($65 > TS \leq 80$).

Keterangan

➤ **Kinerja BLUD**

Evaluasi kinerja BLUD dilakukan dan disusun setiap tahun dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.209 / MENKES/ SK/ I / 2011 tentang Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan indikator keberhasilan dibagi dalam 3 aspek penilaian yaitu :

- Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%
- Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 40%
- Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat 40%

➤ **Penetapan Predikat RSD**

Tingkat kesehatan RSD ditetapkan berdasarkan total skor yang didapat dari penjumlahan indikator tiap perspektif, predikat tingkat kesehatan RSD digolongkan menjadi:

SEHAT, yang terdiri dari :

- **A++** Apabila total skor (TS) lebih besar dari 95;
- **A+** Apabila TS lebih besar dari 80 atau kurang/ sama dengan 95;
- **A** Apabila TS lebih besar dari 65 atau kurang/ sama dengan 80.

KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

- **B++** Apabila TS lebih besar dari 50 atau kurang/ sama dengan 65;
- **B+** Apabila TS lebih besar dari 40 atau kurang/ sama dengan 50;
- **B** Apabila TS lebih besar dari 30 atau kurang/ sama dengan 40.

TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :

- **C++** Apabila TS lebih besar dari 20 atau kurang/ sama dengan 30;
- **C+** Apabila TS lebih besar dari 10 atau kurang/ sama dengan 20;
- **C** Apabila TS lebih kecil dari 10

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Pada tahun 2019 realisasi capaian IR DBD mengalami penurunan yaitu sebesar 26,37 per 100.000 penduduk. Permasalahan dalam pengendalian DBD tahun 2019 adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN secara mandiri. Masyarakat cenderung menunggu adanya pemantauan jentik dari pihak lain (kader, gasurkes, kelurahan, kecamatan dan puskesmas). Walaupun Kota Semarang mengalami peningkatan IR DBD namun peningkatan ini tidak hanya terjadi di Kota Semarang saja. Hal ini juga terjadi di tingkat Provinsi, Nasional dan Asia Tenggara. Di tingkat Provinsi angka IR DBD mencapai 26,37 per 100.000 penduduk , sedangkan di tingkat nasional mencapai 46,6 per 100.000 penduduk. Tahun 2019 Kota Semarang menduduki peringkat ke 19 dari 34 Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah.
2. Kebijakan nasional terkait cleaning data penonaktifan peserta PBI Non APBN yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Efek munculnya Perpes 75/ 2019 beban pembiayaan menjadi lebih tinggi, kebijakan kenaikan iuran memungkinkan menimbulkan peningkatan kebutuhan penganggaran jaminan kesehatan .
3. Nilai kinerja BLUD RSUD KRMT Wongsonegoro pada Tahun Anggaran 2019 Nilai Indeks 70,20 mengalami penurunan dibanding pada Tahun Anggaran 2018 dengan nilai indeks 73,30 dikarenakan adanya penurunan jumlah pasien yang disebabkan oleh peraturan BPJS yang mengatur tentang

rujukan berjenjang sehingga pasien BPJS tidak bisa langsung dilayani di RSUD KRMT Wongsonegoro.

4. Sistem Pembayaran pengajuan Klaim ke BPJS yang mengalami keterlambatan sehingga membuat Kinerja Keuangan BLUD yang mengalami penurunan.

D. SOLUSI

Solusi dan tindak lanjut terhadap hambatan serta permasalahan yang ada adalah

1. Penurunan IR DBD dilakukan dengan cara :
2. Memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat melalui PKK, FKK;
 - a. Tupoksi gasurkes lebih ditingkatkan kembali termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan gerakan PJN;
 - c. Peningkatan keterlibatan seluruh sekolah dalam program Sicientik.
3. Rebudgeting digunakan sebagai solusi atas kebijakan nasional terkait *cleaning data* penonaktifan peserta PBI Non APBN. Meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi pasien dan keluarganya tentang pelayanan diRS terkait dengan pelayanan rujukan berjenjang dari BPJS.
4. Meningkatkan mutu pelayanan RS.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI SASARAN

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1.	DINAS KESEHATAN	258.673.891.000	250.956.005.269	97.02
2.	RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	299.524.157.000	266.649.941.183	89.02
	JUMLAH	558.198.048.000	517.605.946.452	92,72

E. PRESTASI / PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Internasional yang diperoleh pada tahun 2019:

1. Juara I Asuhan Mandiri Tingkat Provinsi
2. Penghargaan dari “MarkPlusInc kategori “Public Service of The Year 2019”
3. Penghargaan Inovasi Terbaik ke-2 kategori ICT Kesehatan Indo HCF
4. Penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara
5. Penghargaan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Tahun 2019
6. Penghargaan di bidang Inspiring & Innovative figure dari Seven Media Asia dr. Susi Herawati, M.Kes sebagai Best Of The Best BUMD Of the year 2019 Inspiring & Innovative

7. Penghargaan di Bidang Public Service Of The Year Jawa Tengah 2019 dari Markplus, inc
8. Penghargaan di Bidang Inovasi Perubahan dari 7Sky Media Sebagai Top 50 Srikandi Pembawa Perubahan Indonesia 2019
9. Penghargaan dibidang Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
10. Penghargaan Pelayanan Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
11. Penghargaan Pembagian Buah dan Sayur dalam rangka memeriahkan HUT RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang ke-29 dari Lembaga Prestasi Indonesia - Dunia (LEPRID)
12. Penghargaan dalam Pelayanan Publik dari Komisi Pelayanan Publik

SASARAN 2 : MENINGKATNYA KEARIFAN BUDAYA LOKAL

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kearifan budaya lokal dengan dua indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 170,52% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kearifan budaya lokal disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Tingkat Kearifan Budaya Lokal	49,70	84,75	170,52	73,95
Meningkatnya kearifan budaya lokal	49,70	84,75	170,52	73,95
Rata-rata Capaian Sasaran			170,52	Sangat Tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Capaian indikator kinerja tingkat kearifan Budaya local pada tahun 2018 sebesar 73,95 Prosen sedangkan pada tahun 2019 mengalami secara drastic yaitu sebesar 84,75 prosen. Sedangkan capaian kinerja Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal mengalami peningkatan secara drastis yaitu sebesar 84,75 prosen pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 sebesar 73,95 prosen.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Capaian kinerja pada urusan kebudayaan, yaitu dengan indikator kinerja tingkat pelestarian warisan budaya dan persentase apresiasi terhadap kesenian local, diharapkan meningkatkan kearifan budaya lokal. Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut perlu ditingkatkan dengan upaya yang dapat meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam mengenal lebih dalam budaya

lokal, menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan seni budaya yang lebih atraktif dan kreatif, serta pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat dengan mengoptimalkan gedung atau tempat pertunjukan seni budaya.

Peningkatan kinerja pada Urusan Wajib Kebudayaan didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya	60	86,59	144,31	51,38

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase apresiasi pelaku seni budaya dari yang ditargetkan 60% menjadi 86,59%, atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 60%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 51,38%.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan apresiasi pelaku seni budaya dalam menyelenggarakan event seni budaya tradisional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Adapun kegiatan unggulan yang menjadi prioritas yaitu wayang kulit, sesaji rewanda, gebyuran bustaman dan dugderan. Wayang kulit merupakan kegiatan yang dapat melestarikan warisan budaya tradisional. Sesaji rewanda adalah salah satu kegiatan yang melestarikan prosesi tradisi legenda Gua Kreo. Gebyuran bustaman adalah salah satu prosesi membersihkan diri menjelang bulan puasa ramadhan, bersih badan, bersih hati dan bersih pikiran. Dugderan adalah kegiatan yang melestarikan adat budaya prosesi pembacaan sukuf kholakoh/pengumuman dari Pemerintah Kota Semarang awal akan dimulainya puasa.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah melalui kegiatan :

1. Wayang kulit yang diselenggarakan di Balaikota pada tanggal 25 Januari 2019.
2. Sesaji Rewanda diselenggarakan di Gua Kreo Gunungpati pada tanggal 9 Juni 2019.
3. Gebyuran Bustaman diselenggarakan di Kampung Bustaman pada tanggal 28 April 2019.

4. Penyelenggaraan upacara tradisional dugderan, yang diselenggarakan di Simpang lima, Balaikota Semarang, Masjid Kauman dan Masjid Agung Jawa Tengah pada tanggal 30 April – 4 Mei 2019.

2) Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	66,66	150	225	150
2.	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	67	50	74,62	50
3.	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	75	76,5	102	65,07

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase situs cagar budaya yang dilestarikan dari yang ditargetkan 66,66% menjadi 150% atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 66,66%. Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 150%. Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari yang ditargetkan 67% menjadi 50% atau tidak berhasil mencapai target 2019 sejumlah 67%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 50%. Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan dari yang ditargetkan 75% menjadi 76,5% atau berhasil mencapai target 2018 sejumlah 65,07%. Persentase kawasan cagar budaya tidak tercapai dari yang ditargetkan hal ini dikarenakan adanya penyelenggaraan kegiatan prioritas intangible yaitu penyelenggaraan tradisi Ki Ageng Pandanaran dengan kegiatan pengajian akbar “Haul Sunan Pandanaran” dan “Kirab Budaya Pusaka Sunan Pandanaran”.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan pelestarian cagar budaya. Cagar budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan melalui proses penetapan. Dengan pemanfaatan cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian dapat meningkatkan kunjungan wisata.

Kegiatan yang menjadi unggulan dari ini program ini antara lain inventarisasi bangunan cagar budaya dan penyelenggaraan tradisi Ki Ageng Pandanaran. Inventarisasi bangunan cagar budaya merupakan kegiatan inventarisasi atau *up dating* data bangunan cagar budaya sejumlah 36 bangunan cagar budaya.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Pengelolaan dan

Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, melalui kegiatan :

1. Inventarisasi bangunan cagar budaya sejumlah 36 bangunan cagar budaya.
2. Penyelenggaraan tradisi Ki Ageng Pandanaran yang diselenggarakan di Masjid Sunan Pandanaran pada tanggal 13-14 September 2019. Adapun pengajian akbar “Haul Sunan Pandanaran pada tanggal 13 September 2019 dan Kirab Budaya Pusaka Sunan Pandanaran pada tanggal 14 September 2019.

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	60	86,96	144,93	54,92
2.	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	70	95,73	136,75	66

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya dari yang ditargetkan 60% menjadi 86,96%, atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 60%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 54,92%. Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal dari yang ditargetkan 70% menjadi 95,73%, atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 70%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 66%.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan apresiasi terhadap kegiatan seni budaya, dengan menumbuhkan minat generasi muda dalam berkegiatan seni budaya yang lebih atraktif dan kreatif melalui lembaga sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar/kelompok seni budaya.

Adapun kegiatan unggulan yang menjadi prioritas antara lain Semarang Night Carnival dan Festival Semarang Jelajah Musik. Semarang Night Carnival merupakan event seni budaya yang mengapresiasi karnaval modern dengan peserta dari anggota APEKSI Pemerintah Kota se-Indonesia, delegasi luar negeri, delegasi luar daerah, pelajar dan kelompok/sanggar seni budaya yang merupakan agenda wisata dalam rangka HUT Kota Semarang. Adapun Festival Semarang Jelajah Musik diselenggarakan dalam rangkaian acara HUT RI ke 74.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, melalui kegiatan wayang kulit Jumat Kliwon sebanyak 10 kegiatan yang diselenggarakan di Taman

Budaya Raden Saleh (TBRS) setiap Jumat Kliwon, wayang orang sebanyak 5 kegiatan yang diselenggarakan di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) dan Gedung Pandanaran dan kethoprak sebanyak 1 kegiatan yang diselenggarakan di Taman Indonesia Kaya.

- 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni, melalui kegiatan International Semarang Night Carnival, festival Semarang jelajah musik, Semarang chant festival, sastra pelataran, Semarang photography marathon, kucingan musik malam pertama, pentas akhir tahun dan gema religi serta festival seni dan budaya.
- 3) Penyelenggaraan Pentas Seni dalam rangka penyambutan tamu acara seremoni kegiatan Pemerintah Kota Semarang dan kegiatan misi seni budaya internasional.
- 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian, melalui kegiatan gelar seni kelompok kesenian, workshop SNC dan workshop film.
- 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat, melalui kegiatan atraksi budaya sebanyak 8 kegiatan yang diadakan di daya tarik wisata, warung keroncong sebanyak 10 kegiatan yang diadakan di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), atraksi budaya sedekah laut dan atraksi budaya sedekah bumi serta pagelaran atraksi budaya.

4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1 kerjasama

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati dari yang ditargetkan 1 kerjasama menjadi 1 kerjasama, atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 100%. Hal ini sama seperti capaian tahun 2018 sebesar 100%.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan kerjasama yang disepakati dalam pengelolaan seni budaya. Kota Semarang memiliki potensi seni budaya yang berlatar belakang dari 4 (empat) pilar seni budaya masa lalu yang membentuk peradaban seni budaya Kota Semarang yaitu Jawa, Cina, Arab dan Belanda yang dikelola dan dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisata.

Adapun kegiatan unggulan yang menjadi prioritas yaitu pentas duta seni. Dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya bangsa untuk meningkatkan kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menjalin kerjasama untuk

mempromosikan seni budaya Kota Semarang bersama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan menampilkan potensi seni budaya tradisi Kota Semarang di Anjungan Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta, melalui kegiatan parade tari dan pameran seni budaya dan paguyuban Kota Semarang di Anjungan TMII Jakarta pada tanggal 14 April 2019.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9.802.175.500	9.538.902.074	97,31
	JUMLAH	9.802.175.500	9.538.902.074	97,31

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya tempat pagelaran seni budaya yang representative sehingga sering menggunakan fasilitas umum dan penutupan jalan yang berakibat mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya.
2. Terbatasnya sarana pendukung pentas seni budaya di fasilitas umum seperti taman, open theatre dan daya tarik wisata sehingga mengurangi minat kelompok/sanggar seni budaya untuk tampil di fasilitas umum.
3. Terbatasnya fasilitasi kelompok/sanggar seni budaya dalam menampilkan potensi seni budaya.
4. Kurang berkembangnya atraksi seni budaya truthuk Semarangan.
5. Kurangnya minat generasi muda terhadap permainan seni budaya tradisional.

SOLUSI

Dalam menghadapi hambatan serta permasalahan terdapat solusi dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Dibangunnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang cukup luas dan besar baik indoor dan outdoor dengan sarana pendukung yang dapat digunakan sebagai tempat pagelaran event seni budaya dengan kapasitas ribuan penonton beserta area parkir sehingga tidak perlu menutup jalan jika ada pertunjukan seni budaya.
2. Fasilitas umum seperti taman, open theatre dan daya tarik wisata dibangun dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pertunjukan seni budaya seperti listrik, sound system, panggung, ruang ganti dan toilet.

3. Lebih mengoptimalkan fasilitasi pertunjukan seni budaya bagi kelompok/sanggar seni budaya.
4. Mengadakan pelatihan, workshop dan sosialisasi atraksi seni budaya thurutuk Semarangan di ruang publik.
5. Meningkatkan minat generasi muda dengan cara workshop dan pergelaran permainan seni tradisional ke sekolah dan di daya tarik wisata.

PRESTASI

Prestasi dan penghargaan yang diterima yaitu sebagai berikut :

1. Rekor LEPRID HUT Kota Semarang, peserta terbanyak dalam rangka Joget Bareng Goyang Semarang.
2. Penyaji Terbaik 1 Lomba Atraksi Budaya dalam acara bersama KEDUNGSEPUR.
3. Penyaji Terbaik 1 dalam Pelaksanaan Event Bersama dan penampilan Keenam Penyaji Terbaik EksKaresidenan Se-Jawa Tengah.
4. Pemrakarsa Rekor Pembuatan Warak Terbesar dengan tinggi 6 meter.
5. Penyaji Unggulan Kirab Festival Budaya dalam rangka Pawai Budaya Nusantara Dalam Rangka HUT TMII ke 44.
6. Penyaji Terbaik II Parade Seni Jawa Tengah.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING TENAGA KERJA

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja dengan tiga indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 106.42% dengan kategori predikat“Sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97	4,54	108,65	5,29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	81,17	82,17	101,23	84,64
Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	80,00	87,50	109,38	70
Rata-rata Capaian Sasaran			106.42	Sangat Tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2019 sebesar 95,39%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Adapun unsur pendukung angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,97%	4,54%	108,65%	5,29%
	- Angkatan kerja		951.135 (org)		921.551 (org)
	• Bekerja		907.937 (org)		872.827 (org)
	• Pengangguran		43.198 (org)		48.724 (org)
	- Bukan angkatan kerja		480.859 (org)		484.053 (org)
	• Sekolah		174.979 (org)		166.175 (org)
	• Mengurus rumah tangga		245.101 (org)		268.388 (org)
	• Lainnya		60.779 (org)		49.490 (org)
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,63%	66,42%	95,39%	65,56%
	- Pend.Usia Kerja (15 th keatas)		1.431.894 (org)		1.405.604 (org)
	• Angkatan kerja		951.135 (org)		921.551 (org)
	• Bukan Angkatan kerja		480.859 (org)		484.053 (org)
3.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	80%	66,25%	82,81%	81,25%

Jumlah angkatan kerja harus diimbangi jumlah lowongan pekerjaan, investasi dengan penyerapan angkatan kerja local, yang berdampak pada turunnya jumlah pengangguran. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja) bergerak turun, pada tahun 2018 sebesar 5,29% menjadi sebesar 4,54% pada tahun 2019.

Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (rasio perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja) pada tahun 2018 sebesar 65,56% naik menjadi 66,42%. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok angkatan kerja dan berkurangnya penduduk usia kerja pada kelompok bukan angkatan kerja.

Tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dari 80 peserta sebanyak 53 peserta dinyatakan lulus (kompeten) dan 27 peserta dinyatakan tidak lulus atau realisasinya sebesar 66,25% dari yang ditargetkan sebesar 80% dengan capaian target sebesar 82,81%. Dengan memperoleh sertifikat kompetensi diharapkan para peserta mudah terserap pada pasar kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase tenaga kerja terampil	50 %	69,38%	138,76%	85,11%

Pada Tahun 2019 jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang sebanyak 460 dari 663 orang jumlah pendaftar atau realisasinya sebesar 69,38% dari yang ditargetkan sebesar 50% dengan capaian target sebesar 138,76%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, kegiatan tersebut dalam wujud pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang. Dari lulusan pelatihan tersebut 189 orang berhasil ditempatkan di perusahaan dan 212 orang berwirausaha.

b) Program Peningkatan Peningkatan Kesempatan Kerja

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1. Persentase penempatan tenaga kerja (AKAL, AKAD, AKL)	85%	33,31%	39,19%	59,17%
2. Persentase peluang kerja mandiri	70%	82,05%	117,21%	82,42

Pada Tahun 2019 sebanyak 5.548 orang pencari kerja berhasil ditempatkan dari jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 16.657 orang atau realisasinya sebesar 33,31% dari yang ditargetkan sebesar 85% dengan capaian target sebesar 39,19%. Sementara itu jumlah peserta pelatihan kewirausahaan untuk peluang kerja mandiri sebanyak 480 orang dari 585 orang jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan atau realisasinya sebesar 82,05% dari yang ditarget sebesar 70% dengan capaian target sebesar 117,21%. Keterampilan yang didapatkan selama mengikuti pelatihan merupakan salah satu modal bagi peserta untuk berwirausaha khususnya usaha kuliner yang tengah marak melalui pelatihan olahan makanan atau boga.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan, kegiatan tersebut dalam wujud pelatihan keterampilan wirausaha.
2. Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) Dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri, kegiatan tersebut dalam wujud pelatihan keterampilan wirausaha.
3. Pemberdayaan Purna TKI/TKW, kegiatan tersebut dalam wujud pelatihan keterampilan wirausaha bagi purna TKI/TKW.
4. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, kegiatan tersebut dalam wujud pelaksanaan bursa kerja.
5. Informasi Pasar Kerja, kegiatan tersebut dalam wujud pemberian akses penyebaran lowongan dan pemberian informasi kerja yang ada pada perusahaan kepada masyarakat.



c) Program Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial Serta Jaminan Sosial

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase penyelesaian Hubungan Industrial / PHK	65%	55,33%	85,12%	50%
2	Cakupan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan	62,5%	78,00%	124,8%	79,33%

Pada Tahun 2019 penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial / PB yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 83 kasus dari 150 kasus yang tercatat atau realisasinya sebesar 55,33% dari yang ditargetkan sebesar 65% dengan capaian target sebesar 85,12%. Sementara itu, realisasi cakupan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan yaitu sebanyak 78 perusahaan telah membentuk sarana Hubungan Industrial (HI) dalam wujud Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) dari 100 jumlah perusahaan peserta bintek/sosialisasi ketenagakerjaan atau realisasinya sebesar 78% dari yang ditargetkan sebesar 62,5% dengan capaian target sebesar 124,8%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kegiatan tersebut diantaranya dalam wujud mediasi penyelesaian hubungan industrial.
2. Peningkatan kapasitas serikat pekerja/buruh, kegiatan tersebut diantaranya dalam wujud bimtek bagi SP/SB tentang implementasi peraturan ketenagakerjaan.
3. Fasilitasi dan pembinaan tripartite, kegiatan tersebut diantaranya dalam wujud bintek PP/PKB.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	URUSAN WAJIB TENAGA KERJA	7.964.556.000	7.401.450.401	92,93
1.	DINAS TENAGA KERJA	7.964.556.000	7.401.450.401	92,93
	JUMLAH	7.964.556.000	7.401.450.401	92,93

PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program/kegiatan dimaksud terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Pemberi kerja / perusahaan belum sepenuhnya menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja.

2. Lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan minat pencari kerja.
3. Tingkat keberhasilan peserta pelatihan dalam mengaplikasikan teori dan praktek dan kendala peserta pasca pelatihan sebagai pelaku usaha pemula.
4. Masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha tentang implementasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.

SOLUSI

Solusi dalam penyelesaian permasalahan dimaksud adalah :

1. Meningkatkan monitoring terhadap penempatan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan rekrutmen.
2. Peningkatan keanekaragaman bidang usaha perusahaan pemberi kerja pada pelaksanaan job fair.
3. Pendampingan peserta pelatihan melalui pengawasan, monitoring dan evaluasi selama dan pasca pelatihan.
4. Pelaksanaan bintek dan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan

SASARAN 4 : MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 115,45% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Angka Kemiskinan	4,67	3,93	115,85	4,14
Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang)	18,19	13,80	124,13	16,81
Persentase Penanganan PMKS	94	100	106,38	99,8
Rata-rata Capaian Sasaran			115.45	Sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja Urusan Sosial untuk indikator kinerja Angka Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 3,93% dari yang ditargetkan 4,67%, hal ini menurun dari capaian tahun 2018 sebesar 4,14% sesuai dari Data BPS Kota Semarang.

Adapun hasil verifikasi validasi Basis Data Terpadu (BDT) untuk warga miskin Kota Semarang pada Tahun 2019 untuk indikator kinerja Persentase penduduk miskin menurun sebesar 13,80% dari yang ditargetkan 18,19%, hal ini juga menurun jika dibandingkan dari capaian tahun 2018 sebesar 16,81%.

Untuk capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat sebesar 100% dari yang ditargetkan 94%, hal ini meningkat dari capaian tahun 2018 sebesar 99,8%,

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Untuk indikator kinerja Dinas Sosial lainnya dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hal ini bisa dicapai dikarenakan telah berhasil melaksanakan program sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Cakupan PMKS yang ditangani	94%	100%	106,38%	99,8%

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan *Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani* dari yang ditargetkan 94% menjadi 100%, atau berhasil mencapai target sejumlah 106,38%. Hal ini meningkat jika dibandingkan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 99,8%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a) Program Keluarga Harapan (PKH).

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah kegiatan pendampingan dan peningkatan pendamping PKH	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	100%

- b) Verifikasi validasi Basis Data Terpadu (BDT).

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Verifikasi validasi Basis Data Terpadu (BDT)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	-

- c) Fasilitasi dan pendampingan bantuan sosial santunan kematian fakir miskin.

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Fasilitasi dan pendampingan bantuan sosial santunan kematian fakir miskin pada tahun berkenaan	12 bulan	12 bulan	100%	100%

d) Fasilitasi pendampingan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 bulan	12 bulan	100%	100%

e) Pembinaan dan fasilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Pembinaan dan fasilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	12 bulan	12 bulan	100%	100%

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,31%	68,47%	1.587%	17,9%

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dari yang ditargetkan sebesar 4,31% menjadi 68,47%, atau berhasil mencapai target 1.587%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2019 sebesar 17,9%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan kejadian Luar Biasa.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Dilaksanakannya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	100%	100%
2 Persentase korban bencana alam yang ditangani dan memperoleh bantuan sosial	100% (166 orang)	100% (166 orang)	100%	100%

b) Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial pada tahun berkenaan	12 bulan	12 bulan	100%	100%
2 Persentase korban bencana sosial yang ditangani dan memperoleh bantuan sosial	100% (626 orang)	100% (626 orang)	100%	100%

c) Peningkatan kualitas pembinaan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Peningkatan kualitas pembinaan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun berkenaan	12 bulan	12 bulan	100%	100%

d) Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	12 bulan	12 bulan	100%	100%

3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Cakupan Disabilitas yang ditangani	94%	100%	106,38%	100%

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Disabilitas yang ditangani dari yang ditargetkan 94% menjadi 100%, atau berhasil mencapai target 106,38%. Hal ini sama dibandingkan capaian realisasi Tahun 2018 sebesar 100%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma pada tahun berkenaan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	100%

b) Fasilitasi Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Fasilitasi pembinaan penyandang cacat dan eks trauma	12 bulan	12 bulan	100%	100%

4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1 Persentase Panti Sosial yang mendapat bantuan	58,8%	50,98%	86,7%	43%

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai masih belum bisa meningkatkan Persentase Panti Sosial yang mendapat bantuan dari yang ditargetkan 58,8%, hanya tercapai 50,98%, atau berhasil mencapai target 86,7% (hal ini disebabkan

karena masih banyak Panti Sosial yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan). Hal ini meningkat dibandingkan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 43%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a) Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Panti Sosial.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Operasional pengelolaan dan bantuan sosial panti sosial pada tahun berkenaan	12bulan	12 bulan	100%	100%
2	Sosialisasi program bantuan sosial panti sosial	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%

b) Fasilitasi bagi panti asuhan/ panti jompo.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Fasilitasi bagi panti asuhan / panti jompo pada tahun berkenaan	12 bulan	12 bulan	100%	100%
2	Kegiatan pelatihan bagi penghuni panti	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan PSKS yang terfasilitasi	83,3%	66,67%	80	66,67%

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai masih belum bisa meningkatkan Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi dari yang ditargetkan 83,3% hanya tercapai 66,67%, atau berhasil mencapai target 80%.

Hal ini masih sama dengan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 66,67%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a) Operasional Panti Khusus Among Jiwo.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Operasional Panti Khusus Among Jiwo pada tahun berkenaan	12 bulan	12 bulan	100%	100%

- b) Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan pada tahun berkenaan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	100%

- c) Pemberdayaan dan Pengembangan Karang Taruna.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Dilaksanakannya pemberdayaan Karang Taruna pada tahun berkenaan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	100%

- d) Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Fasilitasi terhadap organisasi sosial pada tahun berkenaan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	100%

- e) Pemberdayaan dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Pemberdayaan dan pengembangan peerja sosial masyarakat pada tahun berkenaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%

- f) Penumbuhan dan pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Semarang.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Penumbuhan dan pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kota Semarang pada tahun berkenaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%

- g) Penguatan Kompetensi Sosial Masyarakat.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Penguatan kompetensi sosial masyarakat Kota Semarang pada tahun berkenaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%

- h) Pembinaan dan fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (Kube) fakir miskin perkotaan.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Pembinaan dan fasilitasi kelompok usaha bersama (Kube) fakir miskin perkotaan pada tahun berkenaan	12 bulan	12 bulan	100%	100%

- i) Pembinaan dan fasilitasi bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti.

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Pembinaan dan fasilitasi bagi lanjut usia potensial luar panti	12 bulan	12 bulan	100%	100%

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	URUSAN WAJIB SOSIAL	16.454.199.000	15.478.362.476	94,07
1.	DINAS SOSIAL	16.454.199.000	15.478.362.476	94,07

PERMASALAHAN

1. Masih belum tercapainya indikator Persentase Panti Sosial yang mendapat bantuan dari yang ditargetkan 58,8% hanya tercapai 50,98%. Hal ini disebabkan karena masih banyak Panti Sosial yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
2. Masih belum tercapainya indikator Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi dari yang ditargetkan 83,3% hanya tercapai 66,67%, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kemauan dan tekad sosial/kesadaran sosial/jiwa sosial dari masyarakat untuk menjadi salah satu relawan/anggota dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

SOLUSI

1. Pihak Instansi Dinas Sosial untuk dapat turun langsung ke lapangan untuk menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial dan kebutuhan-kebutuhan sosial yang ada di lapangan agar selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya.
2. Lebih ditingkatkannya kembali pembinaan atau sosialisasi untuk memotivasi masyarakat turut serta dalam pemberdayaan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

SASARAN 5 : MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100.32% dengan kategori predikat "sangat tinggi".

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Tingkat Partisipasi Masyarakat	81,17	82,17	101,23	84,64
Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	81,17	82,17	101,23	84,64
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	95,55	98,51	95,82
Rata-rata Capaian Sasaran			100.32	sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. Indikator Tingkat Partisipasi masyarakat dan Persentase Tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2019 sebesar 82,14% .sedangkan target yang ditentukan sebesar 81,17%.
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2019 sebesar 95,55poin. IPG merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan membedakan capaian antara laki-laki dan perempuan

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

- 2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	6.8%	7.6%	111.8	7%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dari yang ditargetkan 6.8% menjadi 7.6%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 7%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Seminar tentang Caleg Perempuan Responsif Gender; (2) Sosialisasi PMBRG Angkatan I-V; (3) Seminar Dalam Rangka Mendukung Raperda PUG dilaksanakan.
2. Makanan Tambahan Anak Sekolah dengan kegiatan : Pelatihan Memasak Makanan Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Februari 2019 bertempat di Aula Disdalduk & KB Kota Semarang. Adapun peserta

berjumlah 50 Orang dari Pengelola Kantin SD dan TP PKK Kelurahan di Kota Semarang. Sedangkan Narasumber yaitu dari anggota DPRD Kota Semarang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Praktisi Memasak.

3. Pengembangan Kota Layak Anak dengan kegiatan sebagai berikut :
(1) Sosialisasi Sekolah Ramah Anak; (2) Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA); (3) Sosialisasi Pesantren Ramah Anak; (4) Workshop Sekolah Ramah Anak; (5) Evaluasi Sekolah Ramah Anak Tingkat Kota Semarang; (6) Rakor Jejaring KLA (Penguatan APSAI).
4. Peningkatan Kualitas Anak dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Lomba - Lomba dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN); (2) Talkshow dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN); (3) Terselenggaranya Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 Tingkat Kota Semarang.
5. Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (PPUEP) dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Pembuatan Cairan Pembersih; (2) Kegiatan Rias Artis; (3) Kunjungan Kerja Kegiatan Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (PPUEP) ke PT. Martina Berto (Sari Ayu), Jakarta; (4) Kegiatan Boga yang diikuti oleh 25 orang yang berasal dari Perempuan Korban KDRT, Perempuan Rentan Ekonomi, dan Kepala Keluarga Perempuan; (5) Kunjungan Kerja Kegiatan Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (PPUEP) ke CV. Kajeye Food Malang.
 - Pemberdayaan Generasi Muda Perempuan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Masa Depan dengan kegiatan sebagai berikut: (1) Kegiatan Pembinaan Bagi Generasi Muda Pelajar Perempuan (PBGMP); (2) Kunjungan Studi Pembinaan Bagi Generasi Muda Pelajar Perempuan (PBGMP); (3) Semarang City Government With Heart Roadshow (SCG-WHR) di 17 SLTA dan Kampus PT di Kota Semarang.

3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4 organisasi	4 organisasi	100	4 organisasi

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 4 Organisasi. Hal ini sama dengan capaian tahun 2018 yaitu 4 organisasi. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Kunjungan studi ke Kabupaten Wonosobo, dengan peserta



- berjumlah 35 Orang dari Organisasi Perempuan dan OPD terkait di Kota Semarang; (2) Bintek bagi Pengurus Dasa Wisma Kecamatan Pembinaan Masyarakat Berbasis Responsif Gender (PMBRG); (3) Advokasi dan Fasilitasi Dawis PMBRG; (4) Rakor PUG (Pengarusutamaan Gender) Merumuskan IPM-IPG bersama BPS Guna Pencapaian APE 2020.
- b. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan; (2) Sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
 - c. Pemberdayaan Organisasi Perempuan (PKK)
Berikut tabel tentang hasil dari fasilitasi kegiatan PKK :

**DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TAHUN 2018-2019**

NO	DATA UMUM PKK	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Tim Penggerak PKK Kelurahan	177	177
2	Kelompok PKK RW	1.578	1.598
3	Kelompok PKK RT	10.068	10.180
4	Dasa Wisma	21.492	21.672
5	Jumlahkader PKK :		
	a. Anggota tim penggerak PKK	3.824	3.725
	b. Umum	149.371	109.132

**DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
TIM PENGGERAK PKK TAHUN2019**

NO	JENIS DATA KEGIATAN	TAHUN 2019
1.	Jumlah Kader :	
	Kader PPBN	1.968
	Kader Kadarkum	-
	Kader Pola Asuh	2.017
2.	Jumlah Kelompok Simulasi :	
	Kelompok Simulasi PPBN	355
	Kelompok Simulasi Kadarkum	5.175
	Kelompok Simulasi Pola Asuh	465
3.	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan :	
	Pelaksanaan Penyuluhan PPBN	177
	Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum	16
	Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh	177

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK
TAHUN 2018-2019**

NO	JENIS KELOMPOK KEGIATAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	Kerja Bakti	17.144	17.144
2	Rukun Kematian	8.252	8.257
3	Keagamaan/Rohani	5.037	5.038
4	Jimpitan	10.214	10.214
5	Arisan	12.068	12.068

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK
TAHUN 2018-2019**

NO	JENIS KADER DAN KEGIATAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Jumlah Kader :		
	Pangan	5.538	5.540
	Sandang	2.603	2.495
	Perumahan	3.029	3.029
2	Pemanfaatan Pekarangan :		
	Peternakan	28.869	27.979
	Perikanan	5.057	5.048
	Warung Hidup	35.750	37.611
	TOGA	27.028	27.008
	Tanaman Keras	65.317	65.307
3	Jumlah Industri Rumah Tangga :		
	Pangan	22.777	21.698
	Sandang/Konveksi	0	0
	Jasa	24.400	24.400

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK TIM
PENGGERAK PKK TAHUN 2018-2019**

NO	JENIS KADER DAN KEGIATAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Jumlah Kader :		
	Posyandu	13.828	15.970
	Gizi	5.718	5.583
	Kesehatan Lingkungan	5.272	5.121
2	Jumlah POSYANDU :		
	Pratama	70	44
	Madya	262	154
	Purnama	555	591
	Mandiri	711	808

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun kegiatan dari PKK diantaranya sebagai berikut : (1) Terlaksananya Rapat Konsultasi (Rakon) PKK dengan peserta berjumlah 300 Orang dari Dinas Terkait. TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan; (2) Sosialisasi Kantin Sehat; (3) Kegiatan Temu Kader Pos PAUD; (3) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pendamping Keluarga; (4) Terlaksananya Seleksi Kader Teladan; (5) Sosialisasi PAAR dan Narkoba dalam rangka TMMD; (6) Terlaksananya Orlat TP PKK se Kota Semarang; (7) Pelatihan Olahsan Pangan Berbahan Dasar Umbi Non Bersa Non Terigu; (8) Seminar Kesehatan, dengan peserta berjumlah 200 orang. Sedangkan Narasumber yaitu DR.dr. Tan Shot Yen dan Ketua TP PKK Kota Semarang; (9) Terlaksananya Temu Kader PKK se Kota Semarang; (10) Pelatihan pemasaran melalui on line bagi pengrajin batik; (11) Terlaksananya Peringatan HKG PKK; (12) FGD Pengembangan Pos PAUD; (12) Terlaksananya Bimbingan Mental (Bintal) I.II.III. (13) Terlaksananya Pertemuan Forum Posyandu; (14) Lomba Administrasi Dawis; (15) Lomba Menghias Sayur dan Buah; (16) Lomba Tertib Administrasi PKK; (17) Evaluasi dan Lomba 10 Program Pokok PKK;

(17) Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kelurahan; (18) Bintek UP2K PKK; (19) Terlaksananya Pembinaan TP PKK Kecamatan; (20) Terlaksananya Pembinaan Dasa Wisma; (21) Pelatihan PMT-AS; (22) Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi; (23) Terlaksananya Sarasehan KB dan Kesehatan; (24) Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sampah; (25) Terlaksananya Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni.

Selain kegiatan sebagaimana tersebut di atas, kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Pemberdayaan Organisasi Perempuan (GOW) dengan kegiatan diantaranya melalui terlaksananya (1) kegiatan donor darah pada tanggal 27 Maret 2019 di PMI Kota Semarang; (2) terselenggaranya kegiatan peringatan Hari Kartini; (3) terselenggaranya kegiatan HUT GOW ke 56; dan (4) terlaksananya MUSKOT GOW.
2. Pemberdayaan Organisasi Perempuan (Dharma Wanita) dengan kegiatan diantaranya melalui terselenggaranya : (1) Pengajian Majelis Taklim DWP setiap Jumat Legi di Ruang Rapat DWP; (2) terlaksananya pelatihan membuat tas dari kain; (3) terselenggaranya TMMD; (4) terselenggaranya donor darah pada tanggal 16 April 2019 di Gedung Balaikota; (5) terlaksananya Bintek Meningkatkan Kompetensi Guru-Guru TK Pertiwi.
3. Pemberdayaan Organisasi Perempuan (GOP TKI) dengan kegiatan diantaranya : (1) penyelenggaraan HUT GOP TKI ke-62; (2) terlaksananya lomba 5M; dan (3) terselenggaranya Rakor GOP TKI.
4. Penyebarluasan Informasi Gender dan Anak dengan kegiatan sebagai berikut: (1) FGD Kajian Pemetaan Daerah Rawan Kekerasan; (2) Pembinaan Jejaring Petugas Sistem Informasi Online Data Kekerasan dengan materi Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi Berbasis Android; (3) Tersusunnya Kajian Pemetaan Daerah Rawan Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2019; (4) Diseminasi Kajian Pemetaan Daerah Rawan Kekerasan di Kota Semarang; (5) Tersedianya Aplikasi Sistem E-PKK Kota Semarang; dan (6) Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Website.
5. Pengelolaan Data Informasi Anak dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Tersusunnya Laporan Profil Gender Kota Semarang Th. 2019; dan (2) Diseminasi Profil Gender Kota Semarang Tahun 2019. yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Lantai 2 Gedung Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dengan peserta berjumlah 70 Orang dari OPD terkait. 16 Kecamatan. Lembaga Vertikal. TP. PKK. Yayasan dan perguruan

tinggi yang concern terhadap gender.. Adapun Narasumber dari kegiatan tersebut yaitu Dr. Indra Kertati. M.Si (PT. ICDE);

6. Pengelolaan Data Informasi Anak dengan kegiatan sebagai berikut : (1) FGD Sistem Informasi Online Data Kekerasan Berbasis Website; (2) Perluasan Jejaring dan Mitra Sistem Informasi Online Data Kekerasan Berbasis Website/Android tahap I;

4) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	100	100%
Jumlah petugas perlindungan di kecamatan	16 orang	16 orang	100	16 orang
Jumlah kelurahan ramah/layak anak	8 kelurahan	26 kelurahan	325	12 kelurahan

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sejumlah 100%. Hal ini sama dengan capaian tahun 2018 yaitu 100%. Sedangkan untuk Jumlah Petugas Perlindungan di Kecamatan juga berhasil mencapai target sejumlah 16 Petugas. Hal ini sama dengan capaian tahun 2018 yaitu 16 Petugas. Dan untuk Jumlah Kelurahan Ramah / Layak Anak berhasil meningkatkan menjadi 26 Kelurahan dari yang ditargetkan yang telah ditetapkan yaitu 8 Kelurahan. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 12 Kelurahan.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak; (2) Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik UPTD PPA Kota Semarang; (2) Rapat Koordinasi Jejaring Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang.
- b. Pelatihan bagi Pelatih (tot) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Bimbingan Teknis Penyuluhan Catin Bagi Tokoh/Pemuka Agama; (2) Bimbingan Teknis Perlindungan Diri Dari Pelecehan Seksual Bagi Siswa Pondok; (3) Pelatihan Kesiapan Bencana Bagi Perempuan dan Anak di Daerah Rawan Bencana; (4) Bimbingan Teknis Penanganan Kekerasan Terhadap Anak; (5) Sosialisasi Pencegahan Bullying Bagi Siswa Pondok.

- c. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dengan kegiatan : Fasilitasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT. Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak. Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum.

**RINCIAN KASUS YANG DITANGANI DP3A
KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI TAHUN 2019**

No.	Kasus	2018		2019	
		Jumlah Kasus	Tertangani	Jumlah Kasus	Tertangani
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	175	175	142	142
2	Kekerasan Dalam Pacaran	11	11	4	4
3	Kekerasan Terhadap Anak	83	83	50	50
4	Kekerasan Terhadap Perempuan	33	33	22	22
5	Anak Berhadapan Dengan Hukum	8	8	8	8
	JUMLAH	310	310	226	226

- d. Fasilitasi Lembaga / Organisasi Perlindungan Anak dengan kegiatan : Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPA, dengan peserta dari kegiatan tersebut yaitu Babinkamtibmas, Penyuluh Agama, 16 orang Tenaga Fulltimer PPT Kecamatan, dan POKJA I PKK Kota Semarang.

- 5) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan program pengarusutamaan gender	76%	97%	127.6	96%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Program Pengarusutamaan Gender dari yang ditargetkan 76 % menjadi 97%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 96 %.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Berbasis Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Pemantapan Kader OBP; (2) Rakor Organisasi Berbasis Perempuan (OBP).



2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dengan kegiatan : Pameran memperingati Hari Kartini di Taman Indonesia Kaya
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan kegiatan sebagai berikut :
(1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tahun 2019 serta Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2020;
(2) Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019 serta Proyeksi Inovasi Kegiatan Tahun 2020 dan 2021.
4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Terlaksananya Penilaian Lomba PAAR Tingkat Nasional;
(2) Terlaksananya Seminar Hari Kartini, dengan tema “Memaknai Peran Wanita dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga” dan “Mewujudkan Kualitas Keluarga untuk Semarang Hebat”; (3) Terlaksananya Apel Peringatan Hari Kartini Ke 140; (4) Terlaksananya Seminar Ketahanan Keluarga; (5) Terlaksananya Pertemuan Sinkronisasi Program Organisasi Berbasis Gender; (6) Terlaksananya Penilaian Lomba GSIB Tk Prov Jawa Tengah; (7) Terlaksananya Penilaian Lomba IVA TEST Tk Prov Jawa Tengah; (8) Terselenggaranya Seminar Inkubasi PME 2019; (9) Terlaksananya Apel Peringatan Hari Ibu Ke 91.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.997.709.000	7.557.308.942	94.49

PERMASALAHAN

1. Belum diikutsertaannya/dilibatkan Forum Anak secara optimal sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik;
2. Belum optimalnya pemahaman terhadap perencanaan anggaran responsif gender dan anak di OPD;
3. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam upaya pencegahan kasus kekerasan;
4. Belum adanya PERDA untuk upaya percepatan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender. peningkatan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kota Layak Anak (KLA).

SOLUSI

1. Meningkatkan peran aktif Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan.pembangunan. melalui keterlibatan Forum Anak pada Musrenbang;
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam perencanaan anggaran responsif gender;
3. Perlu meningkatkan peran JPPA dalam upaya-upaya pencegahan kasus kekerasan;
4. Mengajukan permohonan ke DPRD Kota Semarang untuk menerbitkan Perda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Perda tentang Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Perda tentang Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan yang responsive gender dan menunjang peningkatan penghargaan kategori APE dan Kota Layak Anak menjadi Utama.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Meningkatnya Perolehan Kategori Evaluasi Kota Layak Anak dari **MADYA** menjadi **NINDYA**;
2. PKK mendapatkan Pakarti Utama I Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Tingkat Nasional yang diwakili oleh Kelurahan Gisikdrono. Semarang Barat;
3. PKK mendapatkan Penghargaan Pelaksana Terbaik I Lomba PHBS Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kelurahan Patemon. Gunungpati;
4. PKK mendapatkan Penghargaan Pelaksana Terbaik I Lomba Asupan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur Tingkat Provinsi Jawa Tengah di ASPOL Kelurahan Barusari. Semarang Selatan;
5. PKK mendapatkan Penghargaan Pelaksana Terbaik I Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Posyandu Merah Putih RW IX. Kelurahan Gajahmungkur;
6. PKK mendapatkan Penghargaan Pelaksana Terbaik II Lomba LBS Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kelurahan Tlogosari Kulon. Pedurungan.



MISI 2 :

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.

TAGLINE : SEMARANG MELAYANI

TUJUAN 3 :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Indeks Reformasi Birokrasi	> 68	68,86*	101,26	68,86

SASARAN 6 : TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Melayani dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101,26% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,81	100	83,25
Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP
Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	60/B	68,12/B	113,20	67,92/B
Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	> 3 / ST	3,4142 / ST	113,81	>3 /ST
Rata-rata Capaian	-	-	107.45	Sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mempertahankan pada peringkat baik dengan indeks nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 83,81, Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pemerintah Kota Semarang Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendapat nilai B (67,92) sedangkan target yang ditentukan B. Indikator Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) pada tahun 2019 yang dicapai dengan nilai >3 /ST

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

1. Bagian organisasi

a) Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018	
	TARGET	REALISASI	%		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,81	100	83,25
2	Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang	60	60	100	40
3	Perangkat daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	24 OPD	24 OPD	100	20 OPD
4	Persentase tersusunnya Analisis beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah	60	65	108	45
5	Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah Yang Susunan Kelembagaannya Telah Sesuai Kebutuhan	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	100	12

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dari yang ditargetkan 83 menjadi 83,81 atau berhasil melebihi target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sejumlah 101%. Sedangkan capaian tahun 2018 dengan nilai indeks 83,25 atau sebesar 102,78% dari target nilai indeks 81. Kemudian untuk indikator tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang, indikator Perangkat Daerah yang menerapkan standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berhasil mencapai realisasi 100%. Sedangkan indikator persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah berhasil mencapai realisasi 108% dan indikator Jumlah Unit Kerja / Perangkat Daerah Yang Susunan Kelembagaannya Telah Sesuai Kebutuhan mencapai 100%.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
BAGIAN ORGANISASI	760.973.000	695.942.000	91,45
BAGIAN ORGANISASI	760.973.000	695.942.000	91,45

PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan mendasar pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Terbitnya Permenpan No. 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sehingga menjadi prioritas untuk direalisasikan dan kebutuhan anggaran digeserkan dari kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- b. Sudah melaksanakan internalisasi Budaya Kerja pada OPD namun setelah dilakukan evaluasi belum siap untuk melaksanakan Gelar Budaya Kerja dan anggaran yang telah disediakan dialihkan untuk melaksanakan kegiatan FGD Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Workshop Pembinaan Budaya Kerja dan sebagian anggaran digeserkan ke Kegiatan Pendayagunaan Aparatur untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis.

- c. Kurang siapnya perangkat daerah menyajikan data dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah dalam penghitungan kematangan kelembagaan;
- d. Adanya perubahan regulasi yang mengatur beberapa perangkat daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang mengharuskan melakukan penyesuaian baik nomenklatur maupun tugas dan fungsi pada perangkat daerah.
- e. Adanya penyesuaian terhadap perubahan regulasi yang menjadi pedoman penyusunan SOP dimana belum seluruhnya terlaksana pada OPD.
- f. Terbitnya PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan mewajibkan penerbitan perizinan berusaha melalui lembaga OSS maka kegiatan Eksibisi Mall Pelayanan Publik batal dilaksanakan, akan tetapi sebagian anggaran dialihkan untuk menyelenggarakan kegiatan Coaching Clinic Inovasi.

SOLUSI

Solusi atau Tindak lanjut bagian Organisasi sebagai berikut :

1. Internalisasi kegiatan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada OPD untuk membentuk kembali kelompok budaya kerja dan melakukan penilaian mandiri terhadap masing-masing kelompok budaya kerja dilingkungan OPD tersebut.
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam rangka peningkatan kematangan kelembagaan;
3. Melaksanakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan Kementerian/Lembaga ataupun perangkat daerah terkait dalam rangka melakukan evaluasi terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah yang akan dilakukan perubahan..
4. Diperlukan adanya asistensi dan sosialisasi mengenai perubahan Peraturan Walikota tentang penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur.
5. Melakukan perubahan pada Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019.
6. Melakukan perubahan regulasi yang mengatur delegasi kewenangan dalam proses perizinan menyesuaikan PP Nomor 24 Tahun 2018.

2. INSPEKTORAT

Capaian pada Fungsi Penunjang Pengawasan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	2	3	100	3
Jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan : - BPK (81.95%) - Inspektorat Propinsi Jawa Tengah (100%) - Inspektorat Kota Semarang (86.76%)	81%	89.57%	110.58	88.94%
Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	100	WTP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta pemantauan. Level maturitas terdiri dari enam tingkat yaitu :

- 1) Tingkat 0 (belum ada nilai),
- 2) Tingkat 1 (rintisan),
- 3) Tingkat 2 (berkembang),
- 4) Tingkat 3 (terdefinisi),
- 5) Tingkat 4 (terkelola dan terukur), dan
- 6) Tingkat 5 (optimum).

Di tahun 2019, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Semarang berada level 3 (terdefinisi) dari yang ditargetkan level 2 (rintisan). Pada tahun 2019 berhasil menyelesaikan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kota Semarang dari yang ditargetkan 81% menjadi 89.57% atau berhasil mencapai target sejumlah 110.58%.

Laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kesesuaian Laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2019, Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK-RI, Pemerintah Kota Semarang berhasil

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018. Adapun rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu agar Pemerintah Kota Semarang agar melakukan inventarisasi terhadap aset tetap bangunan gedung yang nilainya dibawah kapitalisasi, dan permasalahan terkait aset lain-lain yang digunakan untuk mencatat aset tetap jalan yang belum ada aset induknya.

Didalam mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Pemerintah Kota Semarang melalui Inspektorat Kota Semarang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019 telah melakukan pengawasan internal berupa:

1. Pemeriksaan secara berkala (Audit Operasional) di 114 obyek pemeriksaan
2. Pemeriksaan kasus/khusus di 112 obyek pemeriksaan, yang terdiri dari:
 - a) Pemeriksaan Kasus/Checking di 32 obyek pemeriksaan;
 - b) Pemeriksaan Khusus Pekerjaan Infrastruktur di 8 obyek pemeriksaan;
 - c) Pemeriksaan Khusus Administrasi Proyek di 12 obyek pemeriksaan;
 - d) Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik di 17 obyek pemeriksaan;
 - e) Pemeriksaan Khusus atas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Responsif Gender (ARG) di 10 obyek pemeriksaan;
 - f) Pemeriksaan Khusus Audit Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Kampung Tematik di 11 obyek pemeriksaan;
 - g) Audit Kinerja Atas Urusan Wajib Pemerintahan di 4 obyek pemeriksaan;
 - h) Pemeriksaan Khusus lainnya di 18 obyek pemeriksaan.

b) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	100	2

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kapabilitas APIP ditahun 2019 wajib berada pada Level 3, atau 85% APIP sudah

berada di level 3 (Integrated). Sebagai gambaran bahwa kapabilitas APIP dibagi dalam 5 level yakni:

1. Level 1: Initial,
2. Level 2: Infrastructure,
3. Level 3: Integrated,
4. Level 4: Managed, dan
5. Level 5: Optimizing.

Semakin Tinggi Levelnya Maka Semakin Baik Kapabilitasnya APIP. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018 tingkat leveling kapabilitas APIP berada di level 2 (Infrastructure). Pada bulan September Tahun 2019, telah dilakukan penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai level 3 namun masih menunggu hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan Leveling Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Diklat Kapabilitas Inspektorat
2. Melakukan self assessment (penilaian mandiri) atas level kapabilitas untuk menentukan area of improvement dilanjutkan menyusun action plan membangun infrastruktur untuk peningkatan level Kapabilitas APIP.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
INSPEKTORAT	5.087.866.000	4.892.035.191	96.15
JUMLAH	5.087.866.000	4.892.035.191	96.15

PERMASALAHAN

Hambatan atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Urusan Pengawasan antara lain :

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah.
2. Belum efektifnya penerapan SPIP dan belum optimalnya implementasi SPIP pada OPD.
3. Masih belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

SOLUSI

Solusi dan tindak lanjut terhadap hambatan serta permasalahan yang ada, adalah :

1. Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mendorong Obyek Pemeriksaan (Obrik) untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan meningkatkan koordinasi serta pemahaman atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
2. Mendorong Perangkat Daerah untuk menerapkan SPIP secara efektif dan mengoptimalkan implementasi SPIP.
3. Mengoptimalkan Kapabilitas APIP dengan beberapa cara yaitu :
 - a. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat.
 - b. Para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru.
 - c. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dimana pegawai yang pernah mengikuti diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada pegawai lain di kantor.
 - d. Melibatkan semua tenaga pemeriksa dalam perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) guna mengetahui dan menganalisis area kritis mana yang ditemui selama melakukan pengawasan.

PRESTASI

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

3. BAGIAN OTONOMI DAERAH

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKJIP /AMJ, LKjIP, LPPD, ILPPD)	100	100	100	70
Prosentase OPD yang menyusun pelaporan LKJIP/LAKIP benar dan tepat waktu	75	75	100	70
Prosentase koordinasi hubungan antar lembaga dalam rangka Otonomi Daerah	85	100	85	80
Tersedianya pranata tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan Pemkot Semarang	2 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen
Prosentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100

Pada tahun 2019, kinerja yang dicapai adalah tersusunnya Laporan Kinerja pemerintah 100%, atau sesuai dengan target serta berhasil mencapai target tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKjIP, LPPD, ILPPD) sejumlah 4 laporan menjadi 4 laporan, atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Selain itu pada tahun 2019 kinerja yang dicapai pada indikator prosentase perangkat daerah yang mempunyai akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebesar 100% hal ini menunjukkan progress yang sangat bagus ini berarti kesadaran yang tinggi dari OPD untuk mengumpulkan bahan dan data .

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
BAGIAN OTONOMI DAERAH	8.996.575.000	8.724.038.682	96,97
JUMLAH	8.996.575.000	8.724.038.682	96,97

PERMASALAHAN

Belum terintegrasinya penyelesaian Fasilitasi Kepala Daerah Khususnya dalam Hal Pengurusan Perjalanan Dinas Khususnya Walikota Dan Wakil Walikota ;

SOLUSI

Penyusunan Peraturan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah

TUJUAN 4 :

TERWUJUDNYA KONDUSIVITAS WILAYAH

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	44,80 %	44,17 %	98	109%
Rata-rata Capaian	44,80 %	44,17 %	98	Sangat Tinggi

SASARAN 7 :

MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 140% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Angka Kriminalitas	1.934	1.151	140	1.443
Rata-rata Capaian	1.934	1.151	140	sangat tinggi

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Selama tahun 2019, pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menghasilkan kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Angka kriminalitas	1.934	1.151	140	1.443
Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan	1 kejadian	0 kejadian	200	0 kejadian
Tingkat kondusivitas wilayah Kota Semarang terhadap gangguan trantibmas, potensi kerawanan sosial yang bermuatan SARA dan konflik politik	2	3	150	3
Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	44,80 %	44,17 %	98	109%
Rasio Siskamling per jumlah Kelurahan	31,88	31,90	100	100%
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100	100	100	100%
Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	0,92	0,83	90	93%
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	23.3	29.63	%	29.63
Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran	87.33	50.26	%	98.78
Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	65,15 %	65.92 %	101,18 %	64,73 %
Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	60,00 %	40,00 %	66,66 %	40,00 %
Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	85,36 %	85.36 %	100 %	85,00 %
Persentase pemenuhan bagi korban bencana	95,14 %	95,14 %	100 %	100,00 %
Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	91,50%	91,50%	100 %	90,00 %

Tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa, dan mogok kerja merupakan tindakan yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan menurunkan angka kriminalitas dan konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan memiliki peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mampu mendukung iklim berinvestasi yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah Kota Semarang yaitu **“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”**. Upaya meredam konflik sosial dari yang ditargetkan 1 (satu) kejadian hingga mampu menggapai capaian 200%, yaitu 0 (nol) kejadian. Capaian ini tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi dengan semua *stakeholder* terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang.

a) Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap potensi gangguan ipoleksosbudhankam	78 %	78%	100	77

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah “Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap potensi gangguan ipoleksosbudhankam” dari yang ditargetkan 78% tercapai 78% sehingga mampu mencapai hasil yang telah ditargetkan. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang mencapai angka 77%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu (1) Peningkatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik; (2) Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan dan Keramaian Umum; (3) Penguatan Pengamanan Masyarakat terhadap Kerawanan Sosial; dan (4) Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma-Norma dan Aturan Bagi WNA dan Ormas Asing.

b) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah kejadian konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan	1 Kejadian	0 kejadian	200	0 kejadian
Jumlah ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara	70 Organisasi	83 Organisasi	118	74 organisasi
Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun	8 Kejadian	2 Kejadian	175	5 kejadian

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah “Jumlah kejadian konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” dari yang ditargetkan 1 kejadian namun di Kota Semarang tidak terjadi konflik SARA yang meluas (0 kejadian) sehingga dinilai berhasil meminimalisir terjadinya konflik sosial. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2018 lalu, yaitu sebesar 0 kejadian konflik sosial.

Meskipun sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 di Kota Semarang tidak tercatat adanya kejadian konflik sosial namun hal itu tidak berarti tidak diperlukan upaya-upaya untuk meredam meledaknya potensi konflik sosial yang selama ini dinilai patut diwaspadai untuk suatu wilayah yang heterogen seperti Kota Semarang. Keberagaman yang dimiliki Kota Semarang tentunya menambah khazanah budaya namun apabila dikelola dengan baik maka bukannya tidak mungkin justru menimbulkan konflik sosial yang bisa menyebabkan kerugian material maupun *immaterial*.

Jumlah ormas dan lembaga nirlaba yang berada bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara - yaitu ormas dan lembaga nirlaba yang apabila menarik keberadaan, peran maupun fungsinya maka akan menimbulkan

goncangan pelayanan publik dari yang ditargetkan 70 organisasi menjadi 83 organisasi, atau tercapai 118%. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 74 organisasi.

Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun dari yang ditargetkan 8 kejadian, terealisasi 2 kejadian, atau tercapai 175%, yaitu kejadian tawuran antara pelajar SMK 3 dan SMK 5 yang terjadi di kawasan Simpang Sompok pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 lalu dan tawuran antara pelajar SMK 3 dan SMK 5 yang kembali terjadi di kawasan GOR Tri Lomba Juang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 lalu. Capaian kinerja ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian kejadian tawuran selama tahun 2018 dengan jumlah sebesar 5 kejadian.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu: (1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama; (2) Pendayagunaan Potensi Ormas/ LSM; (3) Peningkatan Ketahanan Bangsa bagi Masyarakat; (4) Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal; (5) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan; (6) Fasilitasi Paguyuban PETAMAS; (7) Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; (8) Pengaturan, Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; dan (9) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

c) Program Pendidikan Politik Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila	2.7	2.86	105	2.86
Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu/ pemilukada	67	82.33	123	72.80

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila dari yang ditargetkan 2.7 indeks tercapai 2.86. Capaian ini masih sama dengan capaian pada tahun 2018 lalu. Sistem negara demokrasi yang dianut di negara ini memungkinkan setiap warga negara berperan aktif dalam menentukan arah dan tujuan bangsa ini. Peran serta aktif masyarakat bukan hanya dituntut saat pesta demokrasi tengah digelar namun diharapkan juga pada semua sendi kehidupan demokrasi. Upaya peningkatan peran serta tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu maupun pemilukada namun lebih kepada peningkatan kesadaran dan kesediaan masyarakat untuk mengembangkan demokrasi Pancasila. Dengan membudayakan demokrasi Pancasila, diharapkan perbedaan pendapat dan pandangan politik yang ada – yang merupakan konsekuensi lazim dari suatu sistem demokrasi – tidak

hanya meningkatkan kematangan berdemokrasi masyarakat dengan tetap menjaga kondusivitas sosial dan politik di wilayah

Partisipasi pemilih Kota Semarang pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019 mencapai angka 82.33% dari yang ditargetkan 67%. Peningkatan partisipasi pemilih merupakan wujud dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diamanatkan pasal 434 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan umum, yaitu : pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu (1) Pengelolaan Bantuan Parpol; (2) Pendidikan Politik Kewarganegaraan Bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Partai Politik Dan Generasi Muda; (3) Fasilitasi Pemilu/ Pemilukada; (4) Monitoring dan Evaluasi Parpol/ Ormas/ LSM.

Pada tahun 2019 rasio siskamling mencapai 31,90 % dihitung dari 5.653 siskamling dibagi 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang dengan rasio petugas Linmas mencapai 7.930 orang atau tercapai 83%. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi pada penurunan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban dengan target sebesar 44,80 % dan tercapai 44,17% dari angka 2.966 kejadian yang meliputi 1.815 gangguan ketertiban umum dan 1.151 angka kriminalitas. Sedangkan cakupan penegakan perda mencapai 100 % yaitu sejumlah 889 pelanggaran yang tertangani meliputi 29 Perda.

d) Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	93 %	93%	100	100
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pada kelompok kecamatan) dan pelaksanaan patroli wisata	8.640 kali	8.640 kali	100	100 %
persentase gangguan ketertiban, kenyamanan dan bencana yang ditangani	100	100 %	100	100 %
Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti	5	5	100	100 %
Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum	100	100 %	100	100 %
Persentase pengamanan objek vital dan kegiatan penting pemerintah	100	100 %	100	100 %
Persentase unjuk rasa yang diamankan	100 %	100 %	100	100 %

Program ini menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis pada setiap pelanggaran Perda yang terjadi. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan penjagaan secara intensif terhadap pembangunan pemerintah yang mengarah pada peningkatan kualitas pariwisata Kota Semarang.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

- (1) Pengawasan Pelanggaran Perda Dan Trantibum
- (2) Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan Trantibmas
- (3) Gelar Pasukan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- (4) Pengendalian Data Dan Informasi Tibum, Tranmas, Penegakan Perda Dan Linmas
- (5) Pengamanan Dan Pengendalian Trantibum
- (6) Pengamanan Obyek Vital Dan Kegiatan Penting Pemerintah

e) Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang ditegakkan	29 perda	29 perda	100	100
Cakupan penegakan pelanggaran peraturan daerah	100 %	100 %	100	100 %
Jumlah sosialisasi aturan perda	12 kali	12 kali	100	100 %
Jumlah penyelesaian pelanggaran perda	60 kasus	60 kasus	100	100 %
Jumlah sidang ditempat dan pengiriman sidang	9 kali	9 kali	100	100 %
Jumlah PPNS yang mengikuti pembinaan	90 orang	90 orang	100	100 %
Persentase pengaduan yang tertangani dan terselesaikan	100 %	100 %	100	100 %
Jumlah objek rawan gangguan trantibum dan pelanggaran perda yang teridentifikasi	29 objek	29 objek	100	100 %

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan sejumlah 899 kegiatan penegakan Perda dari pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dengan volume tertinggi pada pelanggaran PKL, PGOT dan Reklame yang berada di jalan protokol, disamping sejumlah penertiban besar yang dilakukan untuk menunjang pembangunan kota seperti penertiban PKL dalam rangka normalisasi Banjir Kanal Timur, penertiban bangunan liar di Tambak Lorok, penertiban pedagang pasar, dll. Pada tahun 2019 dilaksanakan pula penutupan 2 (dua) Lokalisasi/Resosialisasi yaitu Argorejo dan Rowosari.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:



- (1) Penertiban Dan Penindakan
- (2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah
- (3) Penyelidikan, Penyidikan Dan Persidangan Pelanggaran Perda
- (4) Pembinaan Ppns Daerah
- (5) Pengelolaan Pengaduan Dan Gangguan Ketentraman Ketertiban Masyarakat
- (6) Peningkatan Kewaspadaan Dini

f) Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan	4.242 orang	4.974 orang	117	100
Jumlah kegiatan yang melibatkan anggota Satlinmas	49	49	100	100
Jumlah kegiatan patroli keamanan lingkungan dan kenyamanan lingkungan serta tanggap bencana	360	360	100	100
Prosentase kegiatan provinsi / pusat yang diikuti	100	100	100	100
Persentase anggota Satlinmas yang diberi pendidikan dan pelatihan	100	100	100	100
Prosentase anggota Satlinmas yang diberi sarana pakaian	100	100	100	100

Pelaksanaan pengamanan tak langsung PILEG/PILPRES sebanyak 4.507 TPS serta pada 177 Kelurahan dan 16 Kecamatan dapat berlangsung secara lancar dan terkendali tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang berarti. Hal tersebut didukung dengan adanya sejumlah 7.930 anggota Linmas di Kota Semarang yang bertugas menyelenggarakan kenyamanan dan ketentraman lingkungan dan juga membantu penanganan bencana. Dari jumlah tersebut telah terfasilitasi sebanyak 4.974 orang dalam bentuk peningkatan kualitas SDM.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

- (1) Pengerahan Dan Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap Gangguan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
- (2) Fasilitasi, Pembinaan Dan Peningkatan SDM Linmas.

g) Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan Perlindungan masyarakat	76 %	71 %	93	96
Persentase Rukun Tetangga yang memiliki petugas Linmas	92 %	83 %	90	93
Tersedianya data linmas per bulan	12 data	12 data	100	100
Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan	5653 siskamling	5653 siskamling	100	100
Monev siskamling	2 kegiatan	2 kegiatan	100	100

Pada tahun 2019 jumlah Linmas di Kota Semarang sebanyak 7.930 orang dan 5.653 siskamling. Keberadaan linmas dan sistem keamanan lingkungan menjadi salah satu upaya dalam menjaga kenyamanan dan ketentraman lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan membangun sinergitas yang kuat dari semua pihak untuk menangkal kerawanan keamanan yang mungkin terjadi.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

- (1) Data Base dan Aplikasi Linmas;
- (2) Monitoring dan Evaluasi Administrasi Sistem Keamanan Lingkungan

Adapun hasil kinerja lainnya dari pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Semarang pada tahun 2019 adalah tersusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pencapaian hasil-hasil kinerja tersebut di atas diperoleh melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut :

h) Program Penanganan Bencana

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase pemenuhan bagi korban bencana	95,14 %	95,14 %	100,00 %	100,00 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah “Persentase Pemenuhan Bagi Korban Bencana” sebesar 95,14 % dari yang ditargetkan sebesar 95,14 %. Meskipun capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2018 sebesar 100%, namun capain tersebut telah memenuhi target.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan, Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana, Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Tanggap Darurat dan Pusat Pengendalian Operasi. Pusat Pengendalian Operasi yang menjadi ujung tombak BPBD dalam menangani bencana, dimana para personil pusdalops siap siaga 24 jam apabila terjadi bencana.

i) Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	65,15 %	65.92 %	101,18 %	64,73 %
Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh Early Warning System (EWS)	60,00 %	40,00 %	66,66 %	40,00 %
Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	85,36 %	85.36 %	100,%	85,00 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah :

- 1) Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan sebesar 65,92 % dari yang ditargetkan sebesar 95,15 %, Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 64,73 %.
- 2) Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh Early Warning System (EWS) sebesar 40,00 % dari yang ditargetkan sebesar 60,00 %, Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 40,00 %.
- 3) Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana sebesar 85,36 % dari yang ditargetkan sebesar 85,36 %, Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 85,00 %.

Program di atas merupakan upaya mitigasi, preventif dan promotif terjadinya bencana alam di wilayah Kota Semarang. Indikator kinerja program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Rawan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Forum Prb, Kelurahan Siaga Bencana, Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, Peningkatan Sumberdaya Manusia KSB, Early Warning System (EWS), Pelatihan SDM Rescue dan Sinergitas Pembangunan Kelembagaan Bencana. Beberapa kegiatan unggulan yang mendukung capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

- a) Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (PRB BK)
Sosialisasi dan simulasi Sekolah/ Madrasah Aman Bencana di SD Juara Semarang, SMP Semesta 2, dan SMP Al-Azhar 14 Semarang.
- b) Kelurahan Siaga Bencana
Pembentukan dan pembekalan KSB pada Kelurahan Sadeng, Pongangan, Tegalsari, Jabungan, Srandol Wetan dan Gedawang.
- c) Sinergitas pembangunan kelembagaan bencana
Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kebencanaan untuk menyamakan persepsi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Semarang.

j) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	91,50%	91,50%	100,%	90,00 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah “Persentase cakupan pemulihan pasca bencana” sebesar 91,50 % dari yang ditargetkan sebesar 91,50 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 90,00%.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana, Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana, Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana, Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi dan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana. Beberapa kegiatan unggulan yang mendukung capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

- a) Fasilitasi pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi dampak bencana dengan pemberian bantuan mesin jahit untuk 9 kelurahan terdampak bencana, antara lain : Kelurahan Pudak Payung, Tinjomoyo, Jomblang, Lemponsari, Sukorejo, Kemijen, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon dan Mangunharjo
- b) Pengelolaan Bantuan Korban Bencana dengan melakukan dropping bantuan air bersih di beberapa daerah yang mengalami kekeringan pada tahun 2019 diantaranya di kecamatan Pedurungan, Candisari, Tembalang, Gunungpati dan Mijen.

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD. Pada Tahun 2019 berhasil meningkatkan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran sebesar 136.57% dari yang ditargetkan 23.3% menjadi 31.82%.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.605.821.000	10.084.881.331	95,09
2	Satuan Polisi Pamong Praja	18.329.209.000	17.147.525.965	93,55
3	Dinas Pemadam Kebakaran	13.798.069.000	13.784.426.870	99,99
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.150.074.000	5.952.696.639	96,79
	JUMLAH	48.883.173.000	46.969.530.805	96,09

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019, antara lain :

1. Tahun 2019 merupakan tahun politik dimana dua pesta demokrasi berlangsung pada tahun tersebut, yaitu Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal 133 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang disebutkan bahwa **“Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih”**. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang mendorong partisipasi pemilih perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, satu hal yang terlupakan bahwa keberhasilan pesta demokrasi bukan hanya partisipasi pemilih yang tinggi namun juga bagaimana suatu prosesi pemilihan umum berjalan dengan kondusif. Karena alasan itulah maka pemantauan situasi dan kondisi wilayah selama tahapan-tahapan pemilu perlu ditekankan.
2. Selain potensi konflik karena perbedaan pendapat akibat pemilihan umum, potensi konflik sehari-hari di Kota Semarang tidak boleh diabaikan mengingat penduduk Kota Semarang yang *heterogen*. Dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 mencapai 1,6 juta jiwa serta dengan keragaman suku, etnis, budaya, dan agama maka Kota Semarang tidak bisa dibilang aman dari potensi konflik sosial. Berbagai keragaman yang kita miliki memang bisa menjadi modal sosial yang tidak ternilai harganya, namun jika tidak dikelola dengan baik, bukannya tidak mungkin justru menjadi potensi konflik sosial. Oleh karena itu, Penguatan Pengamanan Masyarakat terhadap Kerawanan Sosial tidak bisa dihindari lagi. Masyarakat Kota Semarang harus disadarkan mengenai potensi konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Masyarakat pun perlu diberdayakan, bukan hanya untuk mengenali potensi konflik sosial, namun untuk meminimalisir dampak dari potensi konflik sosial. Pun jika benar-benar terjadi konflik sosial di Kota Semarang, semua aspek masyarakat tanpa terkecuali harus dapat terjangkau oleh *Early Warning System (EWS)*. Hal ini untuk meminimalisir dampak dari konflik sosial apabila konflik sosial benar-benar meledak di Kota Semarang.
3. Meskipun sampai sekarang Kota Semarang dapat dibilang **aman** dari konflik sosial namun pertikaian antar golongan masyarakat, atau yang lazim disebut tawuran, kian meningkat. Pada tahun 2016 lalu hanya terjadi tiga kejadian tawuran pelajar namun pada tahun 2017 terjadi lima kejadian tawuran pelajar. Bukannya tidak mungkin jika tren ini akan semakin meningkat mengingat kian deras arus informasi dan upaya provokasi dari berbagai

media sosial yang semakin mudah diakses. Oleh karena itu, kegiatan yang melibatkan berbagai sekolah perlu lebih digalakkan sehingga persahabatan antar sekolah dapat terwujud.

4. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.
5. Dinamika peraturan perundangan harus ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu untuk ditinjau kembali menyesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru.
6. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
7. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.
8. Kerusakan sarana dan prasarana yang digunakan saat pemadaman kebakaran tidak sebanding dengan pengadaan sarana dan prasarana pengganti.
9. Lonjakan intensitas kebakaran musim kemarau dan waktu kejadian bencana kebakaran yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai respon time 15 menit.

10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
11. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dalam penanggulangan kejadian bencana;
12. Masih rendahnya pengetahuan teknis personil terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana;
13. Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana;
14. Upaya penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara terpadu.

SOLUSI

Dari Solusi yang diambil untuk penyelesaian masalah tersebut adalah :

1. Tahun 2019 adalah tahun politik maka perlu diselenggarakan kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada. Kegiatan tersebut dapat berupa monitoring tahapan-tahapan pemilu di 16 kecamatan, penertiban aribut kampanye pemilu di 16 kecamatan, dan pemasangan baliho bersama sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat luas. Selain itu, kondusivitas selama penyelenggaran pemilihan umum juga tidak kalah pentiongnya. Dilatarbelakangi hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyelenggarakan Kampanye Damai yang mengangkat tajuk “Silaturahmi Akbar Menjelang Pemungutan Suara Pemilu 2019” pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** di Ruang Lokakrida Gedung Mr. Moch. Ichsan Lantai VIII, Jl. Pemuda 148 Semarang. Kegiatan dimaksud menghadirkan 250 orang stakeholder Pemilu 2019 yang terdiri dari unsur :
 - a. Jajaran Pemerintah Kota Semarang beserta seluruh Camat;
 - b. Dandim 0733 BS/Semarang beserta seluruh Danramil;
 - c. Kapolrestabes Semarang beserta seluruh Kapolsek;
 - d. Kajari Semarang;
 - e. Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang beserta seluruh Ketua PPK se-Kota Semarang;
 - f. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Semarang beserta seluruh Ketua Panwascam se-Kota Semarang;
 - g. Pengurus Partai Politik Kota Semarang;
 - h. Tim Kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden;
 - i. Tokoh Agama Kota Semarang;
 - j. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan berbasis massa di Kota Semarang; serta
 - k. Para Relawan Demokrasi Kota Semarang.

- Dalam kegiatan dimaksud, dibacakan ikrar Deklarasi Pemilu Damai 2019 oleh segenap stakeholder Pemilu 2019.
2. Derasnya arus informasi di media sosial dan batasan antar negara yang kian nisbi mampu memunculkan potensi konflik sosial yang apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat berkembang menjadi konflik sosial. Oleh karena itu, peran dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial perlu lebih dimantapkan di tahun 2019, melalui pelatihan mediator konflik sosial, pemetaan area rawan konflik sosial, penelitian indeks potensi konflik, dan penyusunan *Early Warning System (EWS)* konflik sosial.
 3. Perlunya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkembangkan persahabatan antar sekolah untuk menekan angka kejadian tawuran antar pelajar. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tawuran pelajar seringkali karena stigma yang diturunkan secara terus menerus dari senior kepada juniornya. Stigma inilah yang harus diputus melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai sekolah, seperti kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara dan kegiatan pembauran kebangsaan.
 4. Sehubungan dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah maka kegiatan **Komunitas Intelijen Daerah** dan Kegiatan **Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah** dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Sebagai gantinya, disusunlah kegiatan Kewaspadaan Dini di Daerah yang mengakomodir Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Mengingat saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diterbitkan, Rencana Strategis OPD telah dibakukan dalam Peraturan Walikota maka tidak dimungkinkan penambahan nomenklatur kegiatan baru pada tahun 2018. Oleh sebab itu maka Kewaspadaan Dini di Daerah diakomodir menjadi sub giat dari kegiatan yang sejalur, yaitu Kegiatan Peningkatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik.
 5. Dalam rangka menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mengajukan



- penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tertanggal 9 Agustus 2019.
6. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana pemadam kebakaran di tahun 2020.
 7. Peningkatan kesiagaan personil Dinas Pemadam Kebakaran dan mengupayakan penempatan pos pemadam di tiap Kecamatan.
 8. Aktif melaksanakan pengawasan dan sosialisasi pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan membuat surat himbauan kewaspadaan bahaya kebakaran kepada masyarakat melalui Kecamatan.
 9. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tentang Penanggulangan Bencana;
 10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
 11. Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana/pasca bencana.
 12. Metode sosialisasi yang dijalankan mesti berubah sehingga dapat dipahami dan di terapkan;
 13. Pelatihan tanggap bencana yang melibatkan masyarakat daerah rawan bencana.

PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan yang dicapai pada Tahun 2019, antara lain:

1. Juara I Lomba Parade dan Defile Dalam Rangka HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Juara I Lomba Parade dan Defile Dalam Rangka HUT Linmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah
3. Juara I Lomba Penegakan Perda Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
4. Juara I Lomba Tenda pada Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
5. Juara 2 Skill Competition jenis lomba Hose Laying antar petugas Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional dalam rangka HUT Damkar ke-100 di Riau.

MISI 3 :**MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN****TAGLINE : SEMARANG TANGGUH****TUJUAN 5 :****TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KOTA YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan	82,17 %	96,15 %	117,01	78,32 %
Rata-rata Capaian	82,17 %	96,15 %	117,01	Sangat tinggi

SASARAN 8 :**TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG BERDAYA GUNA**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Tata Ruang yang Berdaya Guna dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100.00% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	65,00	65,00	100,00	46,00
Persentase kesesuaian tata ruang	83,00	95,59	100,00	82,00
Rata-rata Capaian			100,00	Sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan kota Semarang pada Tahun 2019 capaiannya sebesar 65,00 prosen sedangkan target yang ditentukan sebesar 65,00 prosen. Sedangkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Penataan Tata Ruang Kota Semarang pada tahun 2019 adalah 95,59 sedangkan capaian pada tahun 2018 sebesar 82,00%.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN**Indikator Bidang Penataan Ruang**

Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran pada Renstra untuk Bidang Penataan Ruang pada Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase kawasan strategis yang tertata	59,09	63,64	107,7	52,27



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase cakupan layanan OPD	100	100	100	100
Persentase bangunan yang ber-IMB	54,25	54,49	100,24	53,98
Persentase kawasan/ bangunan yang dibangun sesuai dengan izin	98	99,96	102	97,89

Pada Tahun 2019, kinerja yang dicapai dalam bidang Penataan Ruang adalah berhasil meningkatkan Persentase kawasan strategis yang tertata, yang ditargetkan 59,09% terealisasi 63,64% atau berhasil mencapai target 107,7%. Hal ini meningkat 11,37% dibandingkan capaian tahun sebelumnya 2018 sebesar 52,27%. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan sasaran pada Renstra untuk meningkatkan kawasan / bangunan yang sesuai dengan peraturan perijinan berhasil meningkatkan Persentase bangunan yang ber-IMB berhasil melebihi dari target 54,25%, yaitu terealisasi 54,49 % atau berhasil mencapai 100,44%. Hal ini meningkat 0,4% dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 53,98%. Persentase Kawasan/bangunan yang dibangun sesuai dengan ijin berhasil melebihi dari target 2019 sebesar 98% terealisasi 99,96%. Hal ini meningkat 2,07% dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 97,89%

Capaian Indikator Kinerja Program untuk meningkatkan persentase Kawasan strategis yang tertata dicapai melalui beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan, antara lain :

a) Program Perencanaan Tata Ruang

Capaian kinerja pada program ini sebagaiberikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	100% (4dok)	525 % (20 dok)	525 %	433,33 (13 dok)

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun dari yang ditargetkan 100% menjadi 525%, atau berhasil melampaui target 2019 sejumlah 525%. Hal ini meningkat 91,67% dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 433,33 %. Dengan tercapainya target tersebut bermfaat pada tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapainya antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Dokumen Business Plan Kawasan Kota Lama (2 Dokumen)
- 2) Kajian Penghapusan Piutang Retribusi Cetak Peta dan Retribusi IMB (1 Dokumen)
- 3) Kajian Akademis Proyeksi Pendapatan Dinas Penataan Ruang (1 Dokumen)
- 4) Pendampingan Review Perda Bangunan Gedung (1 Dokumen)

- 5) Review Standar Operasional Prosedur
- 6) Retribusi Cetak Peta dan Retribusi IMB (1 Dokumen)
- 7) Dokumen Peta Planning Tata Ruang (5 Dokumen)
- 8) Dokumen Nama Rupa Bumi sesuai Peta RTRW (1 Dokumen)
- 9) DED Pengembangan Kawasan (1Dokumen)
- 10) DED Penataan Ruang(1Dokumen)
- 11) DED Ruang Publik (1Dokumen)
- 12) DED Kawasan Startegis (1 Dokumen)
- 13) DED Ruang Terbuka Hijau(1 Dokumen)
- 14) Review DED (3 Dokumen)

b) Program Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun	100% (15 Gedung)	200% (30 Gedung)	200	100 (18 Gedung)

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun dari yang ditargetkan 100% menjadi 200%, atau berhasil melampaui target 2019 sejumlah 200%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 100 %. Dengan meningkatnya capaian tersebut manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang ialah terpenuhinya sarana dan prasarana dasar perkotaan dengan terbangunnya fasilitas publik yang representative.

1. Pembangunan Gedung Pemerintahan Kelurahan, yaitu pembangunan kantor dan balai kelurahan di:
 - a) Pembangunan Balai Kelurahan Gemah
 - b) Pembangunan Balai Kelurahan Pleburan
 - c) Pembangunan Kelurahan Tambangan
 - d) Pembangunan Kantor Kel. Pandansari
 - e) Pembangunan Kantor Kelurahan Kramas
2. Pembangunan Gedung Pemerintahan Kecamatan, yaitu:
 - a. Kantor Kec. Pedurungan
3. Pembangunan Gedung dan Aset Pemerintahan Kota Semarang, yaitu pembangunan :
 - a. Pembangunan Command Room dan Rg. Serba Guna Distaru
 - b. Pembangunan Gedung Perekaman Data Kependudukan Lokasi 1 (Kec. Candisari)
 - c. Gedung Perekaman Data Kependudukan Lokasi 2 (Kec. Tugu)

- d. Gedung Perekaman Data Kependudukan Lokasi 3 : Semarang Tengah
- e. Puskesmas Mijen
- f. Rumah Sakit Type – D
- g. Pembangunan Gudang Reklame
- h. Jalan Lingkungan Balaikota Gedung B,C,D dan E Tahap 1
4. Pembangunan Fasilitas Publik, yaitu pembangunan :
 - a. Pembangunan SDN Cangkiran 01
 - b. Pembangunan SMPN 1
 - c. Pembangunan SMPN 45
 - d. Pembangunan Gedung DKK
 - e. Pembangunan Gedung Parkir Pandanaran
 - f. Pembangunan terminal Kandri Tahap II
 - g. Pembangunan Galeri Sentra Batik di Kampung Malon
 - h. Pembangunan Parkir Terboyo Tahap II
 - i. Pembangunan Kawasan Pasar Johar Tahap III
5. Pembangunan Sport Center, yaitu pembangunan :
 - a. Pembangunan Lapangan Bola Tangan
 - b. Pembangunan Sport Center Kelurahan (4 Paket)
 - c. Pembangunan Lapangan Olahraga Kecamatan (4 Paket)
 - d. Pembangunan Pembangunan Sirkuit Mijen
 - e. Pembangunan Stadion Citarum
6. Pembangunan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok:
 - a. Pembangunan Pos Tambak Lorok

c) Program Perencanaan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Dokumen perencanaan sarpras dasar perkotaan yang tersusun (sesuai di buku RPJMD Perubahan)	100%	83,33%	83.33	105,88

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sarpras dasar perkotaan dari yang ditargetkan 100% terealisasi 83,33%. Capaian penyusunan dokumen perencanaan sarana dan prasarana dasar perkotaan tahun 2019 tidak dapat memenuhi target, Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan.

d) Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase bangunan yang ber-IMB	54,4%	54,49%	100,16	53,98

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase bangunan yang ber-IMB dari yang ditargetkan 54,4% menjadi 54,49%, atau berhasil melampaui target 2019 sejumlah 100,16%. Hal ini meningkat 100,94% dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 53,98 %. Capaian target tersebut bermfaat pada peningkatan jumlah bangunan yang ber-IMB seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketertiban pemilikan IMB. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung dan SLF, Tim pelestari cagar budaya dengan mengeluarkan rekomendasi untuk TABG sebanyak 11 bangunan, SLF sebanyak 23 bangunan dan TACB sebanyak 1 Kawasan dan 7 situs Cagar Budaya.
2. Kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya (10 Bangunan)

e) Program Pengelolaan Reklame

Capaian kinerja pada program ini sebagaiberikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase reklame berizin	64,5%	66,61%	103	41,1

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase reklame yang berizin dari yang ditargetkan 64,5% menjadi 66,61%, atau berhasil melebihi target 2019 sejumlah 103%. Hal ini meningkat 25,51% dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 41,1 %. Capaian target tersebut bermfaat pada peningkatan jumlah reklame yang berizin seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketertiban perijinan reklame yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program / kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan Gedung, yaitu kegiatan rekomendasi surat peringantan (SP1-SP4) sebanyak 828, Rekomendasi segel sebanyak 32, rekomendasi bongkar 8 dengan total pengawasan tata ruang dan bangunan gedung sebanyak 868 rekomendasi
2. Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Reklame, yaitu kegiatan rekomendasi surat peringantan (SP1-SP3 Penempelan Stiker) sebanyak 14,

- segel sebanyak 1 dengan total pengawasan Reklame sebanyak 15 rekomendasi, Pembongkaran di 44 titik dengan luasan 579 meter².
3. Diterbitkannya rekomendasi teknis penyelenggaraan Reklame pada halaman sendiri 687 rekomendasi, pada sarana dan prasarana kota 165 rekomendasi, rekomendasi teknis Bangunan pertandaan 90 Rekomendasi. Dengan diterbitkannya rekomendasi teknis penyelenggaraan reklame dan rekomendasi teknis bangunan pertandaan berdampak pada tercapainya penataan reklame dan peningkatan PAD khususnya yang di tanah kota. Surat Keterangan Terdaftar sebagai penyelenggara reklame 28 surat. Dengan surat keterangan terdaftar maka ter data penyelenggara (biro) reklame di Kota Semarang.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG	258.274.827.000	244.830.464.470	94,79
JUMLAH	258.274.827.000	244.830.464.470	94,79

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Sampai akhir tahun anggaran 2019 rekomendasi persetujuan di tingkat Kementerian/Pemerintah Pusat belum diterbitkan walaupun telah dilakukan konsultasi teknis dan administrasi baik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Dalam Negeri. Dengan belum disahkannya Revisi Perda Tata Ruang dimaksud, mengakibatkan kendala terhadap legalitas pelaksanaan kegiatan Penataan Ruang di Kota Semarang.
2. Kurang optimalnya fungsi fasilitas layanan publik seperti penerangan jalan umum dan ruang terbuka hijau berupa taman. Hal tersebut disebabkan karena perilaku masyarakat dirasa kurang memiliki kesadaran dan kepedulian akan lingkungan sekitar agar memiliki rasa tanggung jawab dan rasa peduli terhadap kepentingan orang lain, serta kurangnya rasa memiliki terhadap fasilitas layanan publik yang tersedia sehingga penataan lingkungan yang dilakukan kurang berfungsi optimal;
3. Permasalahan yang dihadapi terkait infrastruktur sanitasi yaitu ketersediaan lokasi pembangunan sanitasi yang berada di lingkungan permukiman masih terbatas atau sempit sehingga pemerintah sering mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi pembangunan, status kepemilikan lahan yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur sanitasi masih tidak jelas, dan

rencana lokasi pembangunan sanitasi masyarakat yang masih kurang memadai

SOLUSI

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, solusi yang diambil antara lain adalah dengan mengikuti prosedur aturan yang berlaku dalam pengajuan revisi Perda Tata Ruang dan dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Penataan Ruang didasarkan pada Perda RTRW yang masih berlaku.
2. Berkaitan dengan kemampuan masyarakat yang masih belum mampu membangun sanitasi mandiri dan warga berstatus MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang masih belum terlayani sanitasi maka pemerintah memfasilitasi bantuan subsidi untuk membangun sanitasi dalam rumah atau individual. Selain itu, MBR dan/atau masyarakat yang belum terlayani sanitasi yang belum terlayani sanitasi juga dapat memanfaatkan fasilitas Rumah Susun yang telah disediakan pemerintah. Terlayannya sanitasi bagi seluruh masyarakat di Kota Semarang juga dapat mengentaskan permukiman kumuh di Kota Semarang
3. Perlunya melakukan kerjasama kemitraan antara pihak masyarakat, pemerintah maupun swasta sehingga dapat mensosialisasikan pentingnya hidup sehat dengan menjaga prasarana perkotaan berupa sanitasi, serta melakukan kajian-kajian pembangunan layanan sanitasi yang layak dengan menggunakan teknologi terbaru sehingga diharapkan dapat lebih mudah diterima dan dijaga oleh masyarakat.

SASARAN 9 :

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase kawasan banjir dan rob	4,05	4,05	100	4,37
Jumlah titik/ruas rawan macet	4	4	100	5
Rata-rata Capaian			100	Sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Terkait dengan penanganan rob dan banjir, pada tahun 2019 persentase luas genangan banjir dan rob mengalami penurunan menjadi hanya 4,05% dari 4,37% pada tahun 2018. Upaya pengendalian banjir dan rob dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pompa air, operasionalisasi polder seperti polder Kali Banger dan Kali Semarang, serta Pemeliharaan sarana dan prasarana Drainase/gorong-gorong Pengendali Banjir.

Untuk pembanguna di bidang perhubungan, selama tahun 2019 berhasil menurunkan jumlah titik atau ruas macet 4 titik macet upaya yang dilakukan dalam penataan system transportasi antara lain pengoprasian ATCS dan memberlakukan jalan satu arah.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Untuk Capaian Indikator Kinerja untuk Program pada Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

- 1) Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase kawasan banjir.	4,05	4,05	100	4,37
2.	Persentase kawasan rob.	8,30	8,30	100	8,30
3.	Persentase kawasan genangan lokal.	4,00	4,00	100	4,00

Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai adalah mencapai 4,05% untuk persentase kawasan banjir, 8,30% untuk persentase kawasan rob dan 4,00% untuk persentase kawasan genangan lokal. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada berkurangnya kawasan banjir, rob dan genangan lokal di Kota Semarang.

- 1) Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap

Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.	84,85	89,65	105,66%	89,5
2.	Persentase ruang milik jalan yang baik pada kawasan strategis.	76,32	76,32	100%	59,2

Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai yakni sejumlah 89,65% untuk persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan 76,32% untuk persentase ruang milik jalan yang baik pada kawasan strategis. Dengan

tercapainya target tersebut manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang ialah kondisi infrastruktur jalan, jembatan dan ruang milik jalan pada kawasan strategis yang semakin baik.

Capaian pada urusan Pekerjaan Umum dicapai melalui beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan, antara lain :

1) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan dengan panjang total jaringan irigasi	79	79	100	77

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai yakni mencapai target presentase panjang jaringan irigasi kondisi baik sejumlah 79%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada berkurangnya kawasan banjir dan rob di Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena berhasil dilaksanakannya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pengadaan material pemeliharaan drainase dan sungai.

2) Program Pengendalian Banjir

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase kawasan banjir dan rob	4,05	4,05	100	4,37

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 4,05%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada berkurangnya kawasan banjir dan rob di Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir, pengadaan pompa pengendali banjir, rehabilitasi/pemeliharaan pusat pengendali banjir, pengelolaan pompa banjir wilayah barat, wilayah tengah I, wilayah tengah II dan wilayah timur.

3) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan (jalan baru yang terbangun)	93	93	100	91%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 91%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena berhasil dilaksanakannya pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur.



4) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Saluran Drainase / Gorong-Gorong Dalam Kondisi Baik	64,5	64,5	100	63

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah mencapai target sejumlah 64,5%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada tersedianya saluran drainase / gorong-gorong dalam kondisi baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena terlaksananya perbaikan saluran drainase/gorong-gorong sistem wilayah timur dan wilayah tengah.

5) Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase yang Layak	86	86	100	84

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target yaitu sejumlah 84%. Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur drainase yang layak. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terlaksananya kegiatan pengadaan alat berat SDA dan drainase.

6) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	84,85	89,65	105,66	89,54

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 89,54%. Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil dilaksanakannya pengembangan inner ring roads, middle ring roads, pengembangan wilayah Batas Wilayah Kota, pengembangan dekorasi kota, pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Semarang, rehabilitasi infrastruktur bidang jalan dan pemeliharaan ruang manfaat jalan.

7) Program Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan	64	64	100	42

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 64%. Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat dengan tersedianya jumlah dokumen perencanaan infrastruktur. Indikator Kinerja tersebut berhasil

dicapai dengan terlaksananya kegiatan survey dan pengukuran, perancangan teknik, perencanaan program jalan dan jembatan, perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan, pengembangan teknologi jalan dan jembatan, patok ruang milik jalan, perencanaan program SDA dan drainase, perancangan teknik SDA dan drainase, DED sumber daya air dan drainase, leger infrastruktur, data base infrastruktur serta kegiatan pada laboratorium dan pengujian.

8) Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Prosentase Wilayah yang terehabilitasi	100%	100%	100	100

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 100%. Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada infrastruktur wilayah dalam kondisi baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terlaksananya kegiatan pengelolaan peralatan dan perbengkelan, pemeliharaan jalan dan drainase wilayah I dan wilayah II.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
DINAS PEKERJAAN UMUM	347.930.323.000	329.158.827.846	94,6
JUMLAH	347.930.323.000	329.158.827.846	94,6

PERMASALAHAN

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran belanja pemerintah kota yang disesuaikan dengan pendapatan asli daerah Kota Semarang, yakni:

- Pengembangan Inner Ring Road (Kode Rekening 1.1.03.1.1.03.01.41.001) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Pengembangan Middle Ring Road (Kode Rekening 1.1.03.1.1.03.01.41.002) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-

SOLUSI

Untuk program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran 2019 dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2020.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Selama tahun 2019, pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan menghasilkan kinerja sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase trayek angkutan umum yang optimal	%	64	62.65	97.89
Jumlah koridor BRT	koridor	8	8	100
Jumlah feeder BRT	feeder	2	2	100

Pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan realisasi keuangan maupun kinerja fisik mengalami keberhasilan pada seluruh kegiatan. Namun pada beberapa indikator kinerja program belum bisa mencapai target yang direncanakan.

Untuk target persentase trayek angkutan umum yang optimal tercapai 97.89 % dikarenakan terdapat trayek-trayek angkutan umum tidak tersedia armada yang melayani masyarakat. hal ini disebabkan beberapa pengusaha / operator angkutan umum belum mampu meremajakan armadanya. Sedangkan pada target Jumlah koridor BRT tercapai 100 % sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 telah dioperasikan 8 koridor BRT dan 2 Feeder BRT yang melayani masyarakat di pemukiman serta pelayanan tambahan untuk rute Bandara – Simpang Lima dari jam 17.30 WIB sampai dengan 24.00 WIB dengan armada sejumlah 217 unit. Dari jumlah tersebut 90 unit bus koridor dan 48 unit mikrobus feeder sudah menggunakan CNG sebagai bahan bakar sehingga mengurangi polusi udara. Trans Semarang juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan dalam pelayanan pembelian tiket non tunai guna memberikan kemudahan kepada masyarakat.

b) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail)	%	61	61.73	101.20
Persentase simpang yang dilengkapi ATCS	%	72.73	76	104.5
Persentase kendaraan lulus uji laik jalan	%	51.04	66.42	130.13
Persentase ketertiban pengguna jalan di kawasan strategis	%	80.63	81.42	100.98
Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	80.63	81.32	100.86

Pada Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas untuk semua indikator kinerja program dapat melebihi target. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan fasilitas perlengkapan jalan. Di 38 simpang dan ruas jalan yang rawan kemacetan telah terpasang Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL) dengan Area Traffic Control System (ATCS) sehingga memudahkan dalam memonitor dan mengendalikan arus kendaraan. Disamping itu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa patroli, operasi

dan penyuluhan pengguna jalan yang bertujuan meningkatkan ketertiban lalu lintas

c) Program Pelayanan BRT Trans Semarang

INDIKATOR	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah penumpang BRT	14.255.440	11.306.893	79.32	10.210.296

Pada Program Pelayanan BRT Trans Semarang capaian realisasi belum sesuai target dikarenakan pengoperasian koridor dan feeder BRT baru yang direncanakan mulai pertengahan tahun baru bisa dilaksanakan akhir tahun.

d) Program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan

INDIKATOR	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase halte HEBAT	3.02	3.45	114.24	2.59
Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	71.43	92.85	129.99	78.57

Pada program Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan capaian realisasi keuangan dan fisik sudah melebihi target. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan pengadaan shelter hebat BRT dan revitalisasi fasilitas perhubungan berupa terminal type C Gunungpati.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
DINAS PERHUBUNGAN	194.537.453.000	172.437.275.699	88.64
JUMLAH	194.537.453.000	172.437.275.699	88.64

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi urusan wajib perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Dibutuhkan penambahan dan perawatan prasarana kelengkapan jalan yang berfungsi untuk mendukung keamanan dan kelancaran lalu lintas dan pengguna jalan.
2. Pada ruas-ruas jalan tertentu masih terdapat kepadatan lalu lintas yang menimbulkan kerawanan kemacetan.
3. Masih terdapat kawasan permukiman yang membutuhkan akses angkutan umum massal yang mendukung kelancaran dan kecepatan aktivitas warga.

SOLUSI

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain :

1. Pengadaan dan perawatan prasarana kelengkapan jalan guna mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas.
2. Pengendalian dan penertiban disertai dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan lalu lintas.
3. Penambahan feeder BRT yang melayani kawasan permukiman sehingga dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dengan cepat dan murah

PENGHARGAAN

Prestasi/penghargaan yang diperoleh pada pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan tahun 2019 adalah :

1. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019 dari Kementerian Perhubungan RI. merupakan penghargaan tertinggi di bidang lalu lintas dan angkutan yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota.
2. Penghargaan Indonesia Road Safety Awards 2019 :
 - a. Juara Umum Kategori Excellent City
 - b. Pilar Jalan yang Berkeselamatan (safer road)
 - c. Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan (safer vehicle)
 - d. Pilar Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (safer user)

SASARAN 10 :

TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 123,29% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	51,00 indeks	62,88 indeks	123,29	51.94 indeks
	Rata-rata Capaian	51,00 indeks	62,88 indeks	123,29	Sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup disuatu daerah. Struktur IKLH terdiri dari Indeksi pencemaran Air (IPA), Indek Pencemaran Udara, (IPU), dan Indek Tutupan Hutan (ITH). Dari table diatas maka IKLH kota Semarang tahun 2019 adalah 123,29%



PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Selama tahun 2019, pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup menghasilkan kinerja sebagai berikut :

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	370	630	170.27	450
2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	65	110.52	170	78
3. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	40	40	100	30
4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	600	710	118.3	530
5. Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	100
6. Persentase ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100
7. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
8. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat	27	27	100	18
9. Persentase kelurahan ramah lingkungan yang terbangun per-tahun	9	9	100	9
10. Persentase peraturan daerah bidang lingkungan hidup yang tersusun	100	100	100	100

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah berhasil:

- 1) Meningkatkan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dari yang ditargetkan 370 perusahaan menjadi 630 perusahaan. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 450 perusahaan.
- 2) Meningkatkan persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dari yang ditargetkan 65% menjadi 110.52 %. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 78 %.

- 3) Meningkatkan persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari yang ditargetkan 40 % berhasil mencapai target sejumlah 40 %. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 30 %.
- 4) Meningkatkan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari yang ditargetkan 600 dokumen menjadi 710 dokumen. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 530 dokumen.
- 5) Meningkatkan persentase peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat dari yang ditargetkan 27 % berhasil mencapai target sebesar 27 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 18 %.
- 6) Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian kota sehat (Adipura) melalui peningkatan capaian Jakstrada Kota Semarang.

Manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peran serta stakeholder, pelaku usaha, partisipasi masyarakat dan upaya pengawasan dibidang lingkungan hidup.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- (1) Koordinasi penilaian kota sehat/adipura;
- (2) Koordinasi penilaian langit biru;
- (3) Pemantauan kualitas lingkungan;
- (4) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- (5) Pengelolaan B3 dan limbah B3;
- (6) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- (7) Koordinasi penilaian dokumen lingkungan;
- (8) Pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (9) Penanganan kasus lingkungan;
- (10) Pembangunan Sarana Prasarana Berwawasan Lingkungan.

- b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah taman keanekaragaman hayati (Kehati) yang terbangun	3	3	100	2



INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	56	56.25	100.45	51
Persentase pemahaman terhadap pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100	100	100	100
Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai	35	35	100	25

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah berhasil:

- 1) Meningkatkan jumlah taman keanekaragaman hayati (Kehati) yang terbangun dari yang ditargetkan 3 unit berhasil mencapai target sebesar 3 unit. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 2 unit.
- 2) Meningkatkan cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dari yang ditargetkan 56 Ha berhasil mencapai target 56.25 Ha. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 51 Ha.
- 3) Meningkatkan persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai dari yang ditargetkan 35 % berhasil mencapai target sebesar 35 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 25 %.

Manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yaitu :

- Mengurangi luasan daerah rawan longsor .
- Membatasi beban pencemaran yang masuk ke badan air sehingga pencemaran dapat dikendalikan melalui Penetapan daya tampung dan daya dukung badan air

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- (1) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
- (2) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
- (3) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
- (4) Penetapan daya tampung dan daya dukung badan air
- (5) Pembangunan taman ke hati

c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	100	100	100



INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	3	3	100	2

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah berhasil:

- 1) Meningkatkan persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun sebesar 100 %.
- 2) Meningkatkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari yang ditargetkan 3 dokumen berhasil mencapai target 3 dokumen. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 2 dokumen.

Manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam yaitu : Tersedianya dokumen RPPLH sebagai dasar dalam pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian dan pemantauan; serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- (1) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan (IKLH)	51	62.88	123.29	51.94
Indeks kualitas air (IKA)	48.1	48.75	101.35	31.01
Indeks kualitas udara (IKU)	65.5	85.50	130.53	74.27
Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	10	13.2	66.7	10

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah berhasil:

- 1) Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan (IKLH) dari yang ditargetkan 51 indeks menjadi 62.88 indeks. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 51.94 indeks.

- 2) Meningkatkan indeks kualitas air (IKA) dari yang ditargetkan 48.1 indeks menjadi 48.75 indeks. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 31.01 indeks.
- 3) Meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) dari yang ditargetkan 65.5 indeks menjadi 85.50 indeks. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 74.27 indeks.
- 4) Meningkatkan persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan dari yang ditargetkan 10 % berhasil mencapai target 13.2 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian 2018 sebesar 10%.

Manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu:

- a. Masyarakat bisa mendapatkan akses untuk melaporkan titik sampah secara online dengan mengisi data melalui aplikasi SILAMPAH.
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- c. Semakin banyaknya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
- 2) Pengembangan data dan informasi lingkungan
- 3) Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
- 4) Penyusunan data status lingkungan hidup (SLH)
- 5) Koordinasi Penilaian Adiwiyata dan Kalpataru

e) **Program Pengendalian Polusi**

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah bank sampah yang terbangun	37	34	91.89	25
Persentase peningkatan pengetahuan/ketrampilan masyarakat terhadap pengembangan teknologi tepat guna dibidang lingkungan hidup	97	97	100	95
Persentase penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin pembuangan limbah cair yang diterbitkan oleh Kota	100	100	100	100

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah berhasil:

- 1) Meningkatkan persentase peningkatan pengetahuan/ketrampilan masyarakat terhadap pengembangan teknologi tepat guna dibidang lingkungan hidup yang ditergetkan 97 % berhasil mencapai target 97 %.

- 2) Meningkatkan persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin pembuangan limbah cair yang diterbitkan oleh Kota yang ditargetkan 100% berhasil mencapai target 100 %. Peningkatan jumlah IPLC yang di terbitkan pada tahun 2019 sebesar 65 ijin yang diterbitkan.

Manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program pengendalian polusi yaitu :

- Meningkatkan upaya pengurangan sampah melalui bank sampah.
- Mengendalikan dampak negatif dari cemaran air sungai akibat dari pencemaran limbah industri dengan pembangunan IPAL industri UMKM.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- (1) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.
- (2) Pengendalian polusi udara, limbah padat dan limbah cair.
- (3) Pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup melalui sosialisasi pengembangan teknologi bidang lingkungan hidup.
- (4) Pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil.

Kegiatan yang dianggap belum berhasil mencapai target adalah pembangunan bank sampah

1. Indikator kinerja pembangunan bank sampah di Kota Semarang pada tahun 2019, belum terpenuhinya target yang ditetapkan dikarenakan adanya perubahan kriteria teknis desain yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. /Menlhk-Setjen/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan hidup dan Kehutanan. Sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah bank sampah yang terbangun.
2. Keterbatasan dalam penyediaan lahan milik pemerintah yang direncanakan untuk lokasi pembangunan bank sampah.

f) Program Penguatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dan perubahan iklim	60	60	100	40
Jumlah kampung proklamasi	18	18	100	13
Solar Cell yang terbangun	20	14	70	15
Luas area yang terkonservasi	1	1	100	1

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah berhasil:

- 1) Meningkatkan persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dan perubahan iklim dari yang ditargetkan 60% berhasil mencapai target sebesar 60%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 40 %.
- 2) Meningkatkan jumlah kampung proklamasi dari yang ditargetkan 18 lokasi berhasil mencapai target 18 lokasi. hal ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 13 lokasi. Pada tahun 2019 terpilih 3 kelurahan yang terpilih untuk mengikuti penilaian program kampung proklamasi di tingkat nasional diantaranya: kelurahan purwoyoso, kelurahan tugurejo, dan kelurahan cepoko.

Manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yaitu :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
- Semakin banyaknya kampung iklim yang terbangun
- Pengembangan energi terbarukan melalui solar cell.
- Berkurangnya dampak kekeringan melalui pembangunan RWH.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- (1) Mitigasi perubahan iklim
- (2) Konservasi sumber daya air
- (3) Program kampung iklim

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1.	Dinas Lingkungan Hidup	51.887.861.961	50.250.424.848	96.84
	JUMLAH	51.887.861.961	50.250.424.848	96.84

PERMASALAHAN

- a. Masih rendahnya indeks kualitas tutupan lahan di Kota Semarang
- b. Masih rendahnya indeks kualitas air di Kota Semarang.
- c. Kurang optimalnya pengelolaan limbah B3 di Kota Semarang dan masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 dan belum memahami proses perijinan.

SOLUSI

- a. Meningkatkan luasan tutupan lahan melalui penghijauan, pembangunan taman kota, hutan kota dan mengendalikan alih fungsi tata guna lahan.

- b. Meningkatkan indeks kualitas air melalui penurunan beban pencemaran dari kegiatan industri dan domestik, dengan memperketat penerbitan ijin pembuangan limbah cair (IPLC) bagi pelaku kegiatan usaha dan/atau industry sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan ijin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3.

PRESTASI

- 1) Penghargaan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat

Penerima Penghargaan	Penghargaan
Kelurahan Telogosari, Kec. Pedurungan	Penghargaan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi

- 2) Penghargaan Adiwiyata

Penerima penghargaan	Penghargaan
- SDN Bojongsalaman 01	Sekolah Adiwiyata Provinsi
- SMAN 4 Semarang	
- SMAN 9 Semarang	
- SMPN 31 Semarang	Sekolah Adiwiyata Nasional
- SMAN 14 Semarang	Sekolah Adiwiyata Mandiri

- 3) Penghargaan Kampung Proklam

Penerima penghargaan	Penghargaan
- Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan	Penghargaan Program Kampung (Proklam) Tingkat Nasional
- Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu	
- Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunungpati	

SASARAN 11 :

TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN YANG BERKUALITAS

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman yang Berkualitas dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 98,33% dengan kategori predikat "sangat tinggi".

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Presentase Lingkungan Permukiman Sehat	97,90%	96,26%	98,33%	95,80%
Rata-rata Capaian		97,90%	96,26%	98,33%	Sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator tersebut terlihat dari presentase lingkungan permukiman sehat pada tahun 2019 dengan target sebesar 97,90% dan mencapai realisasi 96,17% atau 98,23% dari capaian target. Meningkatnya capaian di tahun 2019 menandakan taraf kesehatan yang meningkat dan menurunnya area kumuh di Kota Semarang.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Capaian Indikator Kinerja pada Urusan Wajib Perumahan Umum dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Presentase Lingkungan Permukiman Sehat	97,90%	96,26%	98,33%	95,80%
Presentase luas lingkungan permukiman kumuh	0,30 %	0,05%	116,34%	0,29%
Presentase kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	73,21%	75,50%	103,13%	74,83%

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman yang Berkualitas merupakan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun 2 (dua) sasaran strategis untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dinas yaitu (1) menurunnya luas kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas sarana dan (2) prasarana dasar permukiman perkotaan. Pada indikator kinerja ini mendukung sasaran pertama yaitu menurunnya luas kawasan kumuh. Perhitungan capaian indikator persentase lingkungan permukiman sehat tahun 2019 ini dianalisis melalui hasil capaian dari persentase luas lingkungan permukiman kumuh yang mencapai 99,95%, persentase lampu penerangan terpasang yang mencapai 95,87%, persentase rumah tangga yang terlayani air minum yang mencapai 96,40%, dan persentase rumah tangga bersanitasi yang mencapai 86,46%. Upaya yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan capaian indikator tersebut terlihat dari presentase lingkungan permukiman sehat pada tahun 2019 dengan target sebesar 97,90% dan mencapai realisasi 96,26% atau 98,33% dari capaian target. Meningkatnya capaian di tahun 2019 menandakan taraf kesehatan yang meningkat dan menurunnya area kumuh di Kota Semarang. Dibuktikan dengan prestasi predikat penghargaan yang diperoleh Kota Semarang sebagai *ASEAN Clean Tourist City Standard* atau Kota Terbersih di Asia Tenggara dalam acara *ASEAN Tourism Forum (ATF) 2020*.

Penanganan Lingkungan Kumuh yang dilaksanakan di seluruh kecamatan Kota Semarang menyisakan luas 18,10 Ha di tahun 2019 dengan target sebesar 0,30% yang realisasinya mencapai 0,05% atau 116,34% dari target. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang menyisakan luas 108,28 Ha dengan capaian realisasi 0,29%. Luas permukiman kumuh di Kota Semarang yang telah mencapai hingga 0% terdapat beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, Genuk, dan Ngaliyan. Tentunya dengan capaian tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dapat ikut

mendukung dalam upaya memenuhi Program 0% luas kawasan kumuh yang tercantum pada RPJMN 2015-2019.

Perhitungan capaian indikator presentase kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan pada tahun 2019 terdiri dari presentase lampu penerangan terpasang yang mencapai 95,87%, presentase ruang terbuka hijau yang mencapai 44,17%, dan presentase rumah tangga bersanitasi yang mencapai 86,46%. Sehingga diperoleh presentase kualitas sarana dan prasarana dasar dengan realisasi mencapai 75,50% atau 103,13% dari target yang ditentukan yaitu sebesar 73,21%. Realisasi capaian yang diperoleh pada tahun 2019 meningkat hingga 0,67% dari realisasi capaian tahun 2018 yaitu sebesar 74,83%. Manfaat dari meningkatnya capaian tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang karena luas kawasan kumuh menjadi semakin berkurang sehingga tercipta lingkungan permukiman yang jauh lebih tertata dan sehat. Selain itu, hal tersebut mampu meningkatkan kualitas sarana prasarana dasar perkotaan yang mendukung dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan indikator kinerja tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Program untuk Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Presentase rumah layak huni	98,00	97,90	99,90	97,44
Program Pengelolaan Area Pemakaman	Presentase ketersediaan lubang pemakaman	49,80	41,64	83,64	42,29
Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	Presentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik	90,00	88,70	98,56	82,43

Menurut capaian indikator kinerja program pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa presentase jumlah rumah layak huni pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 98,00% dengan capaian realisasi sebesar 97,90% atau 99,90% dari target, dimana capaian kinerja pada tahun sebelumnya mencapai sebesar 97,44%. Pada tahun 2019, capaian kegiatan ini telah dilaksanakan melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.687 unit yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang, sedangkan pada tahun 2018 menangani sebanyak 1.162 unit. Maka RTLH yang belum tertangani masih sebanyak 7.640 unit dan akan ditangani pada tahun perencanaan berikutnya. Berdasarkan tahun dasar perencanaan pada tahun 2016 memiliki total RTLH sebanyak 11.651 unit, dan telah menangani total RTLH sebanyak 4.011 unit pada tahun telah berjalan. Dengan tercapainya target tersebut maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang yaitu masyarakat yang memiliki rumah pribadi dengan kondisi

rumah tidak layak huni bisa mendapatkan kesempatan berteduh di rumah atau hunian dengan standar layak huni yang telah terpenuhi.

Total luas lahan pemakaman Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 4.244.152 m², dengan rincian lahan TPU di tahun 2019 sebesar 536.066 m², sedangkan lahan TPBU memiliki luas sebesar 3.708.086 m². Ketersediaan lubang pemakaman di tahun 2019 sebanyak 78.843 lubang TPU dan 618.380 lubang TPBU yang tersebar di seluruh TPU Kota Semarang dengan capaian realisasi sebesar 41,64% atau 83,62% dari target, sedangkan pada tahun sebelumnya ketersediaan lubang pemakaman di tahun 2018 sebanyak 82.780 lubang TPU dan 616.273 lubang TPBU dengan realisasi 47,29% atau 89,60% dari target. Maka dengan itu, ketersediaan lubang pemakaman di Kota Semarang masih dalam tahap memenuhi kebutuhan masyarakat dan akan melakukan pembebasan lahan tahap lanjut untuk keperluan dalam memenuhi ketersediaan lubang pemakaman di Kota Semarang.

Presentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik pada tahun 2019 dimana telah ditargetkan sebesar 90,00% dengan realisasi mencapai 88,70% atau mencapai realisasi 98,56% dari target yang telah ditentukan. Hasil realisasi tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,43% pada tahun 2018 dengan peningkatan persentase sebesar 6,28%. Kondisi eksisting luas jalan dan saluran permukiman yang telah tertangani pada tahun 2019 seluas 176,91 m² sedangkan pada tahun 2018 menangani seluas 206,88 m². Penambahan luas yang tertangani dari tahun 2018 ke tahun 2019 seluas 29,98 m². Maka melalui peningkatan capaian indikator tersebut telah memberikan manfaat secara tidak langsung dari aspek sosial lingkungan dan estetika lingkungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang dimana lingkungan permukiman Kota Semarang menjadi lebih tertata, kondisi jalan lingkungan lebih layak, nyaman dan memadai, serta dapat meminimalisir terjadinya bencana banjir dan kecelakaan.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	166.047.482.012	161.003.708.504	96,96
	JUMLAH	166.047.482.012	161.003.708.504	96,96

PERMASALAHAN

Ketersediaan lubang TPU milik pemerintah mengalami penurunan jumlah. Penurunan ketersediaan lubang TPU tersebut dikarenakan sebagian besar pembebasan lahan TPU di tahun 2018 yang belum selesai hingga tahun 2019, akibat adanya proses birokrasi yang tidak bisa diprediksi dan keperluan tata

ruang yang mendesak. Adapun beberapa kendala terjadi pada beberapa TPU milik Pemerintah Kota Semarang yang menjadi faktor menurunnya ketersediaan lubang TPU di Kota Semarang. Permasalahan tersebut terjadi seperti pada TPU BSB yang awalnya memiliki luas lahan sebesar 30 Ha, namun hanya dapat terealisasi seluas 14 Ha karena adanya pembangunan Sirkuit BSB dan kebutuhan lahan PDAM.

Kemudian pada TPU Tugurejo dimana penyerahan lahan dari Perumahan Graha Padma ke Pemerintah Kota Semarang baru diserahkan 2% dari perjanjian awal, sehingga menjadi hambatan pembangunan TPU siap pakai. Hal tersebut terjadi juga pada TPU Jabungan yang mana dari total lahan perencanaan seluas 94 Ha masih belum terbebaskan seluruhnya, yaitu dari 38 bidang tanah baru terbebaskan 3 bidang tanah di tahun 2018 dan 1 bidang tanah di tahun 2019. Maka dari itu lahan di TPU Jabungan masih dalam tahap proses pembebasan lahan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan TPU siap pakai.

Selain itu, pada TPU Sendangmulyo, terdapat kendala geografis yang membutuhkan perencanaan lanjutan karena lokasi geografis lahan TPU Sendangmulyo berada di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memerlukan tanggul penahan yang kuat agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Di samping itu, lubang pemakaman di TPU Kembangarum yang sudah penuh sejak tahun 2009 pada kenyataannya belum *ter-update database* sampai tahun 2018 menyebabkan invalid data dalam kurun waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk masa lelang lahan TPU Banjardowo yang masih belum jelas juga menjadi masalah lain dalam proses perencanaan ketersediaan lahan TPU di Kota Semarang sehingga perlu adanya evaluasi kembali agar tidak menjadi hambatan pada perencanaan selanjutnya.

SOLUSI

Perlunya melakukan percepatan penyelesaian proses pembebasan lahan di tahun 2020 pada TPU Jabungan, Tugurejo dan Banjardowo untuk memenuhi kebutuhan lubang pemakaman Kota Semarang dan juga perlunya pembebasan lahan lagi untuk memenuhi kebutuhan penyediaan lahan pemakaman yang dapat mengakomodasi perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta perlunya tim khusus teknis pengukur lapangan untuk pengawasan terhadap updating data TPU dan TPBU agar lebih akurat dan valid.

SASARAN 12 :**MENINGKATNYA KETANGGUHAN BENCANA**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketangguhan Bencana dengan Indikator Kinerja Mendapatkan Angka Capaian Kinerja Sasaran sebesar 113,44% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Indeks Resiko Bencana	150,88	130,60	113,44	130,60
Rata-rata Capaian	150,88	130,60	113,44	sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana pemerintah dapat memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat terjadi bencana alam. Berikut adalah data bencana yang terjadi di Kota Semarang pada Tahun 2018 Indikator Indeks Resiko Bencana sebesar 113,44 Nilai Indeks.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN**a) Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
1. Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	65,15 %	65,92 %	101,18 %	64,73 %
2. Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	60,00 %	40,00 %	66,66 %	40,00 %
3. Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	85,36 %	85,36 %	100,00 %	85,00 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah :

- 1) Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan sebesar 65,92 % dari yang ditargetkan sebesar 65,15 %, Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 64,73 %.
- 2) Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh Early Warning System (EWS) sebesar 40,00 % dari yang ditargetkan sebesar 60,00 %, Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 40,00 %.
- 3) Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana sebesar 85,36 % dari yang ditargetkan sebesar 85,36 %, Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 85,00 %.

Program di atas merupakan upaya mitigasi, preventif dan promotif terjadinya bencana alam di wilayah Kota Semarang. Indikator kinerja program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Rawan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Forum Prb, Kelurahan Siaga Bencana, Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, Peningkatan Sumberdaya Manusia KSB, Early Warning System (EWS), Pelatihan SDM Rescue dan Sinergitas Pembangunan Kelembagaan Bencana. Beberapa kegiatan unggulan yang mendukung capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

- a) Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (PRB BK)
Sosialisasi dan simulasi Sekolah/ Madrasah Aman Bencana di SD Juara Semarang, SMP Semesta 2, dan SMP Al-Azhar 14 Semarang.
- b) Kelurahan Siaga Bencana
Pembentukan dan pembekalan KSB pada Kelurahan Sadeng, Pongangan, Tegalsari, Jabungan, Srandol Wetan dan Gedawang.
- c) Sinergitas pembangunan kelembagaan bencana
Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kebencanaan untuk menyamakan persepsi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Semarang.

b) Program Penanganan Bencana

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2019
	TARGET	REALISASI	%	
1. Persentase pemenuhan bagi korban bencana	95,14 %	95,14 %	100,00%	100,00 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah “Persentase Pemenuhan Bagi Korban Bencana” sebesar 95,14 % dari yang ditargetkan sebesar 95,14 %. Meskipun capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2018 sebesar 100%, namun capain tersebut telah memenuhi target.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan, Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana, Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Tanggap Darurat dan Pusat Pengendalian Operasi. Pusat Pengendalian Operasi yang menjadi ujung tombak BPBD dalam menangani bencana, dimana para personil pusdalops siap siaga 24 jam apabila terjadi bencana.



c) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	91,50%	91,50%	100,%	90,00 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah “Persentase cakupan pemulihan pasca bencana” sebesar 91,50 % dari yang ditargetkan sebesar 91,50 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 90,00%.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana, Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana, Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana, Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi dan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana. Beberapa kegiatan unggulan yang mendukung capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

- a) Fasilitasi pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi dampak bencana dengan pemberian bantuan mesin jahit untuk 9 kelurahan terdampak bencana, antara lain : Kelurahan Pudak Payung, Tinjomoyo, Jomblang, Lemponsari, Sukorejo, Kemijen, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon dan Mangunharjo
- b) Pengelolaan Bantuan Korban Bencana dengan melakukan dropping bantuan air bersih di beberapa daerah yang mengalami kekeringan pada tahun 2019 diantaranya di kecamatan Pedurungan, Candisari, Tembalang, Gunungpati dan Mijen.

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD. Pada Tahun 2019 berhasil meningkatkan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran sebesar 136.57% dari yang ditargetkan 23.3% menjadi 31.82%.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.150.074.000	5.952.696.639	96.79
JUMLAH	6.150.074.000	5.952.696.639	96.79



MISI 4 :

**MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN
MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF**

TAGLINE : SEMARANG BERDAYA SAING

TUJUAN 6 :

MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS EKONOMI LOKAL

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,16	6,86	111,36	5,64
Rata-rata Capaian	6,16	6,86	111,36	Sangat tinggi

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), capaian pada 2019 mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Posisi laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,86. Angka tersebut lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,66 dan nasional 5,02. “Artinya, apa yang disampaikan pengusaha, ini sebagai indikator kami untuk mengeluarkan kebijakan,”

SASARAN 13 :

MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DAN JASA UNGGULAN

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Nilai Perdagangan dan Jasa Unggulan dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 161,8% dengan kategori predikat “sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Nilai investasi	18.699.000	36.534.709	137	27.549.279
Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	31,27	30,74	98,31	31,80
Nilai Ekspor	US\$1.400.434.987	US\$1.100.148.140	79	US\$1.163.718.499,18
Persentase peningkatan kunjungan wisata	8,00	26,62	332,75	8,60
Rata-rata Capaian	-	-	161,8	sangat tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pada tahun 2019, investasi di Kota Semarang sampai dengan bulan Desember mencapai sebesar Rp. 36.534.709.- atau sudah melebihi target yang sudah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu mencapai 137% sebanyak Rp.18.699.000. Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada koordinasi bidang ekonomi

keuangan dan industri perdagangan, peningkatan Produk Unggulan Daerah dan Penguatan Kelembagaan Perekonomian dalam kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah. Pertumbuhan perdagangan dapat dilihat dari kontribusi PDRB kategori perdagangan dan jasa terhadap PDRB dimana pada tahun 2019 sebesar 30,74% dari total PDRB.

1. Melihat dari tabel di atas nilai ekspor Pada tahun 2019 terdapat penurunan nilai ekspor dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 nilai ekspor mencapai US\$1.163.718.499, namun pada tahun 2019 nilai ekspor hanya mencapai US\$1.100.148.140. Hal tersebut dikarenakan adanya persaingan dagang antara China dan Amerika serta kebijakan Amerika Serikat yang mengurangi impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari Indonesia, sehingga terjadi penurunan nilai ekspor Kota Semarang yang mana TPT cukup memiliki andil besar dalam nilai ekspor Kota Semarang.
2. Persentase kenaikan peningkatan kunjungan wisata mencapai 26,62 sentra. kenaikan tersebut tidak lepas dari usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan mendorong kemajuan pariwisata yang ada di Kota Semarang. Dinas kebudayaan dan Pariwisata melalui program pengembangan pemasaran Pariwisata pada tahun 2019 secara terus menerus melakukan berbagai promosi dalam memperkenalkan Daerah Wisata untuk menarik wisatawan baik domestic maupun Luar Negeri .

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

1. URUSAN PENANAMAN MODAL

Selama tahun 2019, pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal menghasilkan kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Nilai Investasi (dln juta)	18.699.000	36.534.709	137%	27.549.279,90
2	- Prosentase Ijin Terbit Sesuai SP	98.00%	98.20%	100	97.50%
	- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 (nilai)	91.76 (nilai)	110	84.7 (nilai)

Sumber Data : DPM-PTSP Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang

Pada tahun 2019 realisasi kinerja peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang dicapai persentase ijin terbit telah sesuai target sebesar 98.20 % sedangkan realisasi dari Survey Kepuasan Masyarakat hasilnya melebihi target dari 83 (nilai) menjadi 91.760 (nilai). Keberhasilan dalam pencapain persentase ijin terbit dan survey kepuasan masyarakat didukung dengan keberhasilan DPM PTSP Kota Semarang dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat dimana ijin yang diterbitkan sesuai dengan standar pelayanan masing-masing izin yang sudah ditetapkan. dan hal tersebut berdampak pada kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang sudah ada sehingga capaian nilai survey kepuasan masyarakat melebihi target yang sudah ditetapkan.

- a) Selain pelaksanaan program sebagaimana tersebut di atas, untuk capaian kinerja pada Urusan Penanaman Modal juga dapat dikatakan baik, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program pada Urusan Penanaman Modal dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Capaian realisasi fisik dari program peningkatan promosi dan kerjasama investasi adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Terlaksananya Forum RKPPMD	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya SEMBIZ Forum 2019	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : DPM- PTSP Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang

Program yang mendukung tercapainya nilai investasi adalah program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Program ini melaksanakan upaya peningkatan nilai investasi melalui pameran dan temu usaha. Adapun pameran dan temu usaha yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal	Lokasi
Pameran Gelar Produk Khas Daerah dan Peluang Investasi (GPKD EXPO 2019)	14-17 Maret 2019	Nagoya Hill Shopping Mall-Batam
Pameran INAVEST	29-31 Maret 2019	Duta Pertiwi Mall. Semarang
Pameran Central Java Business Expo(CJBE)	5 November 2019	Hotel Bidakara . Jakarta
Semarang Business Forum (Sem'biz) 2019	17 Oktober 2017	Hotel Patrajasa Semarang

Peningkatan nilai investasi ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah perizinan yang masuk pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang. Dengan meningkatnya jumlah pemohon perizinan maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang sudah diberikan. Kepuasan nilai kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan pemberian pelayanan perizinan yang cepat dan bebas dari pungutan liar. Dari gambaran capaian kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang dapat memenuhi target Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJMD sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Nilai Investasi (dlm juta)	18.699.000	36.534.709	137%	27.549.279
Nilai PMA (dlm juta)	385.733	2.876.099	745%	3.800.234
Nilai PMDN (dlm juta)	18.313.267	33.658.609	180%	23.749.045
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	275	312	113%	317

Sumber Data : DPM – PTSP Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang

Pada tahun 2019 realisasi kinerja program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang dituangkan dalam capaian nilai investasi baik dari sektor PMA maupun PMDN sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Dimana untuk nilai PMA mengalami kenaikan sebanyak 745% dari target yang sudah ditetapkan dan untuk PMDN mengalami kenaikan sebanyak 180 %, dan untuk jumlah investor berskala nasional adalah sebanyak 312 investor. Realisasi tersebut sudah melebihi dari target di Tahun 2019 sebanyak 275 investor, dengan persentase 113%. Peningkatan nilai investasi yang ada di Kota Semarang dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang serta adanya dukungan dari Pemerintah Kota Semarang yang senantiasa selalu berinovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan perijinan kepada masyarakat.

b) Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Capaian Realisasi Fisik dari program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Bidang Layanan Perijinan Pembangunan	100%	100%	100%	100%
Bidang Layanan Perijinan Kesra dan Lingkungan	100%	100%	100%	100%
Bidang Layanan Perijinan Perekonomian	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : DPM – PTSP Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang

Sedangkan untuk indikator kinerja utama yang ada dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase ijin terbit sesuai SP	98.00%	98.20%	100	97.50%
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 (nilai)	91.76 (nilai)	110	84.7 (nilai)

Sumber Data : DPM – PTSP Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang

Pada tahun 2019 realisasi kinerja peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang dicapai persentase ijin terbit telah sesuai target sebesar 98.20 % sedangkan realisasi dari Survey Kepuasan Masyarakat hasilnya melebihi target dari 83 (nilai) menjadi 91.760 (nilai). Keberhasilan dalam pencapaian persentase ijin terbit dan survey kepuasan masyarakat didukung dengan keberhasilan DPM PTSP Kota Semarang dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat dimana ijin yang diterbitkan sesuai dengan standar pelayanan masing-masing izin yang sudah ditetapkan. dan hal tersebut berdampak pada kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang sudah ada sehingga capaian nilai survey kepuasan masyarakat melebihi target yang sudah ditetapkan.

Selain pelaksanaan program sebagaimana tersebut di atas, untuk capaian kinerja pada Urusan Penanaman Modal juga dapat dikatakan baik, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program pada Urusan Penanaman Modal dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada perkembangannya dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI INVESTASI		
	2017	2018	2019
Jumlah Investor	4.237	2.929	1.936
PMA	17	103	40
PMDN	4.220	36.883	1.896
Jumlah Nilai Investasi	20.594.936.363.183	27.549.279.896.540	36.534.709.113.052
PMA	1.246.416.418.623	3.800.234.850.014	2.876.099.774.111
PMDN	19.348.519.944.560	23.749.045.046.526	33.658.609.338.941
Jumlah Tenaga Kerja :	29.223	41.430	35.345
- WNA	20	34	697
- WNI	29.203	41.396	34.648
Kenaikan nilai investasi	10.083.695.981.349	6.954.343.533.359	8.985.429.216.512
Prosentase kenaikan investasi	95.93 %	33.77 %	32.7 %

Sumber Data : DPM-PTSP Kota Semarang

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERBADU	4.522.486.000	4.329.451.352	95,73
	JUMLAH	4.522.486.000	4.329.451.352	95,73

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya kesadaran para pengusaha terhadap pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pemerintah Daerah.
2. Adanya masa transisi aplikasi perizinan dari Pemerintah Pusat yaitu aplikasi OSS.

SOLUSI

Solusi yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

1. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi bagi pengusaha terkait pentingnya pengisian aplikasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di Kota Semarang.
2. Perlu dilakukan update dan sinergitas dengan aplikasi perizinan daerah dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Internasional yang diperoleh pada tahun 2019. DPM PTSP Kota Semarang adalah :

1. Role Model PTSP Terbaik Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia Tahun 2019 kategori “Sangat Baik”
2. Penganugerahan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori WBK dari KemenPANRB Tahun 2019
3. Rekomendasi Sertifikasi ISO 9001:2015.

2. URUSAN PERDAGANGAN

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			Realisasi tahun 2018
	Target	Realisasi	%	
Prosentase alat UTPP bertera	85%	85%	100%	80%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan prosentase alat UTPP bertera, sehingga pada tahun 2019 menjadi 80%. Kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui kegiatan pengawasan kemetrolagian dan pelayanan tera serta tera ulang yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal.

a) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			Realisasi tahun 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Nilai ekspor	US\$1.400.434.987	US\$1.100.148.140	79 %	US\$1.163.718.499

Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekspor Kota Semarang melalui promosi dan peningkatan kualitas SDM IKM. Pada tahun 2019 terdapat penurunan nilai ekspor dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 nilai ekspor mencapai US\$1.163.718.499, namun pada tahun 2019 nilai ekspor hanya mencapai US\$1.100.148.140. Hal tersebut dikarenakan adanya persaingan dagang antara China dan Amerika serta kebijakan Amerika Serikat yang mengurangi impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari Indonesia, sehingga terjadi penurunan nilai ekspor Kota Semarang yang mana TPT cukup memiliki andil besar dalam nilai ekspor Kota Semarang.

b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			Realisasi tahun 2018
	Target	Realisasi	%	
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	17 pasar	17 pasar	100%	15 pasar

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil merealisasikan target pembangunan pasar sebanyak 2 pasar per tahun, yaitu dengan telah terbangunnya Pasar Banjardowo dan Pasar Satriowibowo serta dilakukannya perbaikan di beberapa pasar di Kota Semarang, sehingga pada tahun 2019 jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif bertambah menjadi 17 pasar (tahun sebelumnya baru ada 15 pasar yaitu Pasar Sampangan, RPU Penggaron, Bulu, Rasamala, Surtikanti, Jrasah, Genuk, Klithikan Penggaron, Rejomulyo, Pedurungan, Peterongan Konservasi, Waru Indah, Sronдол, Wonodri, Banyumanik).

Berkaca pada pelaksanaan kegiatan tahun 2018 serta memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus LKPJ DPRD Kota Semarang agar memperhitungkan dengan cermat dan tepat setiap kegiatan pembangunan pasar maka pembangunan pasar Banjardowo dan Satriowibowo yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat terealisasi sesuai rencana dengan capaian fisik 100%

c) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			Realisasi tahun 2018
	Target	Realisasi	%	
Cakupan Bina kelompok pedagang / usaha informal	9 sentra	9 sentra	100%	8 sentra

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil merealisasikan target pembangunan sentra PKL sebanyak 1 sentra per tahun, dengan dibangunnya Shelter PKL Ikan Hias di Jalan Agus Salim sehingga pada tahun 2019 jumlah sentra PKL bertambah menjadi 9 sentra (tahun sebelumnya baru ada 8 sentra yaitu PKL Simpanglima, Pandanaran II, Taman KB, Batan Selatan, Tlogosari (Jl. Suryokusumo), PKL depan Kantor Diklat, PKL Tlogosari II (Jl. Suryokusumo), lapak sementara PKL Banjir Kanal Timur di Penggaron, Souvenir Shop dan Workshop serta Shelter PKL dan Kuliner Kelurahan Cepoko).

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	DINAS PERDAGANGAN	33.163.683.000	32.786.329.502	98,86
	JUMLAH	33.163.683.000	32.786.329.502	98,86

PERMASALAHAN

Dengan adanya pemindahan PKL Barito ke lapak sementara MAJT, dan pemindahan Pasar Tambaklorok serta beroperasinya Pasar Wonodri yang menggunakan lift, menyebabkan kenaikan tagihan listrik yang cukup signifikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjelang akhir tahun 2019 ketersediaan anggaran yang ada tidak dapat memenuhi seluruh biaya tagihan listrik.

SOLUSI

Untuk memenuhi kekurangan pembayaran listrik pada tahun 2019, maka dilakukan pergeseran anggaran yang berasal dari rekening Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Semarang.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Pada tahun 2019 Dinas Perdagangan mengikuti pameran Inacraft yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 April 2019 dan mendapatkan penghargaan “Inacraft Best Booth” kategori Dinas/BUMN sebagai peserta dengan stand terbaik dalam pameran tersebut.
2. Pasar Pedurungan sebagai Juara III Kompetisi Pasar Rakyat 2019 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. URUSAN PARIWISATA

Capaian indikator kinerja pada urusan pilihan pariwisata adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,8	15,37	320,20	14,01
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	5.721.362	7.223.529	126,25	5.703.282
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	68.638	82.030	119,51	66.105
Lama Menginap Wisatawan	1,5	1,51	100,6	1,47

Keberhasilan pembangunan pariwisata di Kota Semarang sebagaimana dapat diperhatikan pada realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang pesat. Keberhasilan ini didorong adanya pencitraan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui pembangunan infrastruktur yang ikonik, sangat menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang, pengembangan daya tarik wisata melalui kampung tematik yang bertema pariwisata dan peran serta masyarakat yang optimal dalam mendukung pengembangan pembangunan pariwisata khususnya di kawasan desa wisata.

Kondisi kepariwisataan Kota Semarang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dapat diperhatikan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH	WISATAWAN MANCANEKARA	WISATAWAN NUSANTARA
1	Tahun 2010	1.915.892 orang	23.809 orang	1.892.083 orang
2	Tahun 2011	2.100.926 orang	27.880 orang	2.073.046 orang
3	Tahun 2012	2.712.442 orang	32.975 orang	2.679.467 orang
4	Tahun 2013	3.157.658 orang	35.241 orang	3.122.417 orang



NO	TAHUN	JUMLAH	WISATAWAN MANCANEKARA	WISATAWAN NUSANTARA
5	Tahun 2014	3.750.351 orang	88.927 orang	3.661.424 orang
6	Tahun 2015	4.376.359 orang	51.880 orang	4.324.479 orang
7	Tahun 2016	4.660.822 orang	55.252 orang	4.605.570 orang
8	Tahun 2017	5.024.476 orang	59.672 orang	4.964.804 orang
9	Tahun 2018	5.769.387 orang	66.105 orang	5.703.282 orang
10	Tahun 2019	7.305.559 orang	82.030 orang	7.223.529 orang

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2019

Peningkatan kinerja pada urusan pilihan pariwisata didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program pengembangan pemasaran pariwisata

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase kualitas promosi wisata	1,25	1,8	144	2,2

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase kualitas promosi wisata dari yang ditargetkan 1,25% menjadi 1,8%, atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 1,8%.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan efektifitas promosi pariwisata terhadap peningkatan kunjungan wisata melalui bahan promosi, pameran pariwisata dan generasi muda yang berwawasan kepariwisataan sebagai duta pariwisata. Adapun pada tahun 2019 kegiatan promosi pariwisata lebih diprioritaskan melalui sosial media sehingga lebih efektif dan efisien. Kegiatan dalam bentuk bahan cetak promosi dan pameran pariwisata dialihkan diprioritaskan untuk mendukung kegiatan yang menarik minat kunjungan wisata antara lain atraksi seni budaya di daya tarik wisata dan pembangunan sarana prasarana di daya tarik wisata.

Adapun kegiatan unggulan yang menjadi prioritas yaitu famtrip blogger, sales mission bersama pelaku wisata, Gebyar Wisata Budaya Nusantara dan sosial media.

Famtrip blogger merupakan kegiatan yang mengundang blogger se Indonesia untuk bisa menginformasikan dan mempromosikan kepada khalayak masyarakat tentang destinasi wisata dan event seni budaya yang ada di Kota Semarang. Sales mission salah satu cara untuk mempromosikan Kota Semarang di luar daerah melalui penawaran paket wisata yang terdiri dari paket desa wisata, paket wisata religi, paket wisata belanja dan kuliner serta paket wisata MICE dengan mengundang penggiat wisata yang terdiri dari biro perjalanan, hotel, sekolah dan OPD terkait di luar daerah serta UMKM. Gebyar Wisata Budaya Nusantara merupakan event pameran tourism yang diikuti oleh penggiat wisata dan UMKM se Indonesia yang rutin diselenggarakan di Jakarta Convention Center dan

dikompetisikan dalam kategori stand Pemerintah Provinsi, stand Pemerintah Kota/Kabupaten dan UMKM. Sosial media yang digunakan untuk meng upload semua informasi tentang kepariwisataan di Kota Semarang antara lain melalui instagram, face book, twitter dan website.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang telah dilaksanakan Promosi Pariwisata yaitu melalui kegiatan pengadaan souvenir/cinderamata, bahan cetak promosi, majalah pariwisata, guide book, buku calendar event, pembuatan DVD destinasi pariwisata, pemasangan dan pembuatan baliho, promosi media elektronik, promosi media cetak penerbangan, promosi media cetak pariwisata lokal, pembuatan video klip pariwisata, sewa baliho luar daerah, roll banner info event, pembuatan video vlog pariwisata, outdoor banner, pembuatan dan pemeliharaan web, aplikasi pemasaran pariwisata dan promosi di majalah pariwisata, sosial media, promosi media cetak penerbangan, famtrip Ayo Wisata ke Semarang, famtrip blogger dan sales mission. Adapun kegiatan yang melibatkan generasi muda dengan diselenggarakan kompetisi pemilihan generasi muda yang berwawasan kepariwisataan yaitu dengan menyelenggarakan pemilihan Denok Kenang Kota Semarang, melalui kegiatan pemilihan pada tanggal 29 April 2019, pengiriman duta wisata pada tanggal 5-8 November 2019 yang diselenggarakan di Boyolali dan fasilitasi denok kenang selama 12 bulan sebanyak 64 kali.

b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.554 orang	8.619 orang	100,76	8.549 orang
Lama Menginap MICE	1,5 hari	1,51 hari	100,67	1,47 hari

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisata MICE dari yang ditargetkan 8.554 orang menjadi 8.619 orang, atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 8.619 orang. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebanyak 8.549 orang. Selain itu juga pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan lama menginap MICE dari yang ditargetkan 1,5 hari menjadi 1,51 hari, atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 1,5 hari. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 1,47 hari.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata dan MICE di Kota Semarang, melalui peningkatan sarana dan prasarana pariwisata di daya tarik wisata, atraksi wisata di daya tarik wisata dan event MICE kepariwisataan.

Di Kota Semarang pada tahun 2019 ada 75 daya tarik wisata yang terdiri dari 14 wisata alam, 25 wisata budaya dan 36 wisata buatan. Tahun 2018 terdapat 71 daya tarik wisata yang terdiri dari 12 wisata alam, 25 wisata budaya dan 34 wisata buatan. Ada 6 (enam) daya tarik wisata baru apabila dibandingkan pada tahun 2017, tahun 2017 ada 65 daya tarik wisata yang terdiri dari 11 wisata alam, 24 wisata budaya dan 30 wisata buatan. Adapun 6 (enam) daya tarik wisata baru tersebut adalah bridge fountain, air terjun Gondoriyo, Taman Indonesia Kaya, wisata religi Habib Hasan bin Toha atau yang dikenal Mbah Kramat Jati, pasar semarangan Tinjomoyo dan kampung *safety reading*. Adapun pada tahun 2019 daya tarik wisata yang baru yaitu wadas prongkol, sky bridge pandanaran, down tron Gedung Pandanaran dan wisata lembah waduk Jati Barang.

Adapun kegiatan unggulan yang menjadi prioritas antara lain jogging track Goa Kreo, informasi city guide, kajian wisata sungai dan penataan pasar Semarangan Tinjomoyo. Jogging track Goa Kreo yang dapat digunakan untuk wisatawan untuk menikmati pulau Kreo lebih aman dan nyaman. Informasi city guide digunakan untuk menyediakan informasi bagi pengunjung di Kota Lama tentang wisata unggulan di Kota Semarang. Kajian wisata sungai untuk perencanaan atraksi wisata sungai di Kota Semarang. Penataan pasar Semarangan Tinjomoyo merupakan atraksi wisata di hutan wisata Tinjomoyo untuk menghidupkan kembali wisata malam.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- (1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, melalui kegiatan peningkatan kajian wisata sungai, kajian potensi pendapatan, master plan dan DED Gondoriyo, informasi city guide, masterplan dan DED river turbing, peningkatan sarana dan prasarana Goa Kreo, penataan kawasan pasar semarangan Tinjomoyo dan peningkatan sarana dan prasarana Tinjomoyo.
- (2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, melalui kegiatan Mahakarya Legenda Gua Kreo yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2019 di Gua Kreo.
- (3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata, melalui kegiatan pakan dan obat hewan 2 UPTD, laundry Hotel Wisata Taman Lele, breakfast Hotel Wisata Taman Lele, tenaga keamanan dan kebersihan UPTD.
- (4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE, melalui kegiatan fasilitasi guide untuk tamu MICE yang diselenggarakan di Kota Semarang sebanyak 20 event MICE tingkat nasional dan tingkat internasional.

c) Program pengembangan industri pariwisata

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	80	100	125	70

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase usaha pariwisata yang berkualitas dari yang ditargetkan 80% menjadi 100%, atau berhasil mencapai target 2019 sejumlah 80%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 70%.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan kualitas pelaku usaha industri pariwisata melalui bina pelaku usaha pariwisata.

Adapun kegiatan unggulan yang menjadi prioritas yaitu bina pelaku usaha pariwisata, pelatihan tata kelola destinasi wisata perdesaan dan perkotaan, pelatihan tata kelola destinasi wisata kuliner, pelatihan tata kelola homestay, pelatihan pemandu wisata perdesaan dan perkotaan serta pelatihan pemandu wisata kuliner.

Bina pelaku usaha pariwisata dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha dari berbagai aspek yaitu aspek produk, pelayanan dan pengembangan usaha ke depan. Dengan pembinaan setiap aspek usaha akan meningkatkan daya saing setiap usaha pariwisata sehingga secara masif akan meningkatkan kualitas industri pariwisata.

Pelatihan tata kelola destinasi wisata perdesaan dan perkotaan merupakan kegiatan yang ditujukan kepada SDM desa wisata untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pengelolaan desa wisata.

Pelatihan tata kelola destinasi wisata kuliner merupakan kegiatan yang ditujukan kepada SDM pelaku kuliner di desa wisata, kampung tematik kuliner dan destinasi wisata kuliner di Kota Semarang untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pengelolaan destinasi wisata kuliner.

Pelatihan tata kelola homestay merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pengelola homestay di desa wisata dan rintisan wisata untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pengelolaan manajemen homestay.

Pelatihan pemandu wisata perdesaan dan perkotaan yang ditujukan kepada SDM desa wisata dan rintisan wisata untuk meningkatkan kemampuan kepemanduan wisata di tempat masing-masing dan kepemanduan city tour Kota Semarang.

Pelatihan pemandu wisata kuliner ditujukan kepada SDM desa wisata, kampung tematik kuliner, destinasi wisata kuliner di Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuan kepemanduan wisata gastronomi Kota Semarang.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata, melalui kegiatan bina pelaku usaha pariwisata sebanyak 5 kali di Star Hotel pada tanggal 18-20 Juni 2019 sebanyak 2 kegiatan dan tanggal 17-19 September 2019 sebanyak 3 kegiatan.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5.075.211.500	4.874.102.500	96,04
	JUMLAH	5.075.211.500	4.874.102.500	96,04

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pilihan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kerjasama pemasaran bersama lintas regional (JOGLOSEMAR).
2. Koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
3. Belum semua jenis usaha pariwisata mempunyai paguyuban atau asosiasi sehingga pembinaan kurang optimal.
4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan atraksi wisata baru.
5. Kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.

SOLUSI

Dalam menghadapi hambatan serta permasalahan pada masing-masing program terdapat solusi atau tindak lanjut sebagai berikut :

1. Peningkatan jejaring pemasaran bersama lintas regional (JOGLOSEMAR).
2. Mendorong pertemuan penggiat wisata melibatkan stakeholder pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media).
3. Menginisiasi pembentukan paguyuban usaha pariwisata tiap jenis usaha dan mengaktifkan kembali paguyuban atau asosiasi yang telah ada namun kurang aktif.
4. Memperkuat fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pokdarwis dan rintisan wisata.

5. Mengadakan peningkatan kapasitas kepada SDM pariwisata yang ada di pokdarwis dan desa wisata.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan yang diterima dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata di Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Juara I Stand Terbaik Gebyar Wisata Budaya Nusantara.
2. Stand Terbaik Trisakti Tourism Award Destinasi Indonesia Expo.
3. Juara II (Wakil I) Mas Jawa Tengah.
4. Juara Penampilan Terbaik Mbak Jawa Tengah.
5. Juara II Stand Terbaik Festival Jamu dan Kuliner.

SASARAN 14 :

MENINGKATNYA PRODUK UNGGULAN DAERAH

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Produk Unggulan Daerah dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101,00% dengan kategori predikat“Sangat Tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	27,42 %	27,88	102	26,74
Jumlah wilayah produk unggulan daerah (Sentra/Kecamatan)	6	6	100,00	4
Rata-rata Capaian			101	Sangat Tinggi

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pembangunan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB dimana pada tahun 2019 sebesar 27,88%.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

1. Urusan Pilihan Perindustrian

Hasil kinerja Urusan Pilihan Perindustrian, dengan capaian sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	27,42 %	27,88	102	26,74
Indikator Kinerja Tujuan : Peningkatan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Semarang	3579 IKM	3570 IKM	99,75	3542 IKM
Indikator Kinerja Sasaran : ✓ Presentase Penguatan Sentra Industri	3.579 IKM	3570 IKM	99,75	3542 IKM



INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
✓ Bertambahnya Industri Kreatif	76,56 %	80 %	104,5	60 %
✓ Bertambahnya Industri Kreatif	598 Industri Kreatif	598 Industri Kreatif	100	568 Industri Kreatif

Keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja pada urusan Perindustrian adalah meningkatnya produktifitas IKM hal ini tertuang dalam indikator sebagai berikut:

- Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB dari target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 27,42% dan realisasi yang dicapai 27,88%.
- Indikator kinerja tujuan adalah peningkatan industri kecil menengah Kota Semarang, dalam indikator ini target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 3579 IKM sedangkan realisasinya 3570 IKM, rata-rata realisasi yang dicapai 99,75.%.
- Kinerja sasaran Dinas Perindustrian adalah :
 - ✓ Peningkatan industri kecil menengah dalam sasaran ini target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 3579 IKM sedangkan realisasinya 3570 IKM, rata-rata realisasi yang dicapai 99,75.%. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 3542 IKM.
 - ✓ Presentase penguatan sentra industri dalam sasaran indikator ini target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 76,56% sedangkan realisasinya 80%, atau persentase capaiannya adalah 104,5 %.
 - ✓ Bertambahnya industri kreatif, dalam sasaran ini target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 598 industri kreatif sedangkan untuk realisasi capaian sebanyak 598 Industri Kreatif .

Dari hasil yang dicapai dalam indikator yang telah dilaksanakan berdampak pada meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat Kota Semarang serta berkurangnya tingkat pengangguran yang ada di Kota Semarang.

a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Pertumbuhan Industri Menengah	769 IM	780 IM	101	760 IM

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan industri menengah, dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 769 industri menengah menjadi 780 industri menengah, rata-rata target yang dicapai 101 % hal ini meningkat dibanding tahun 2018 sejumlah 760 industri menengah.

Dengan berhasilnya program pengembangan industri kecil dan menengah sesuai dengan arah kebijakan yang ada pada Renstra Dinas Perindustrian terkait

peningkatan jumlah industri kecil menengah memiliki hasil/manfaat yaitu meningkatnya/munculnya industri baru. Dari hasil/manfaat ini akan mempunyai dampak meningkatnya lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran di Kota Semarang.

Kegiatan yang berhasil adalah fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.

b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	3579 IKM	3570 IKM	99,75	3542 IKM

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah jumlah industri kecil menengah dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 3579 IKM menjadi 3570 IKM, rata-rata target yang dicapai 99,75% hal ini meningkat dibanding tahun 2018 sejumlah 3.542 IKM.

Dengan keberhasilan program peningkatan kemampuan teknologi industri sesuai dengan arah kebijakan yang ada pada Renstra Dinas Perindustrian terkait pemanfaatan teknologi industri memiliki hasil/manfaat yaitu peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri bagi para IKM tentang Standarisasi Produk (SNI) serta usulan pengajuan SNI bagi IKM di Kota Semarang yang secara kelayakan sudah memenuhi persyaratan SNI. Usulan tersebut tidak sertamerta disetujui karena harus melewati banyak tahap evaluasi dan penilaian dari Tim BSN (Badan Standarisasi Nasional).

c) Program Penataan Struktur Industri

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Pertumbuhan Industri Kecil	2810 IK	2790 IK	99,28	2782 IK

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah pertumbuhan industri kecil dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 2810 industri kecil menjadi 2790 industri kecil, rata-rata target yang dicapai 99,28 % hal ini meningkat dibanding tahun 2018 sejumlah 2.782 industri kecil.

Dengan keberhasilan program penataan struktur industri sesuai dengan arah kebijakan yang ada pada Renstra Dinas Perindustrian terkait pengembangan struktur industri mengadakan Pelatihan Pemasaran bagi IKM baik secara Online maupun Offline agar para IKM bisa melakukan sendiri pemasaran produknya sehingga para IKM diharapkan bisa mandiri dalam hal Pemasaran. Disamping itu dengan berhasilnya para IKM memasarkan produknya tentu mempunyai dampak

bagi kelangsungan IKM agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang berhasil kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan (DBHCHT).

d) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
	TARGET	REALISASI	%	
Penguatan Sentra Industri	76,56%	80 %	104	60%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah peningkatan sentra industri dari target yang ditetapkan tahun 2019 sejumlah 76,56% sedangkan realisasinya 80%, atau persentase capaiannya adalah 104%, hal ini meningkat dari tahun 2018 sejumlah 60 %.

Dengan keberhasilan program pengembangan sentra-sentra industri potensial sesuai dengan arah kebijakan yang ada pada Renstra Dinas Perindustrian terkait penguatan sentra industri yang sudah ada, maka mempunyai hasil/manfaat yaitu berkembangnya sentra-sentra industri yang ada sehingga mempunyai dampak bagi IKM serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada disekitar sentra industri tersebut. Kegiatan yang Berhasil penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

e) Program Pengembangan Industri Kreatif

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Produktivitas dan Jangkauan Pemasaran Industri Kreatif	598 IKM	598 IKM	100	568 IKM

Program produktifitas dan jangkauan pemasaran industri kreatif pada tahun 2019, target yang ditetapkan sebesar 598 IKM dan terealisasi sebesar 598 IKM.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	DINAS PERINDUSTRIAN	6.265.403.000	6.037.486.058	96,36
	JUMLAH	6.265.403.000	6.037.486.058	96,36

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pilihan Perindustrian selama Tahun 2019 antara lain :

1. Masih adanya pelaku usaha IKM yang belum bisa mengembangkan desain produknya
2. Belum maksimalnya pelaku IKM yang mengembangkan sub sektor Industri Kreatif

3. Masih adanya pelaku usaha yang belum memperhatikan kemasan, baik dari bahan yang aman untuk produk makanan atau bahan kemasan yang dilarang serta sistem pelabelannya

SOLUSI

Solusi untuk mengatasi permasalahan pada Urusan Pilihan Perindustrian antara lain :

1. Pelatihan Desain produk untuk batik dengan sistem Ecoprint, Desain Komputer.
2. Melakukan kegiatan pelatihan yang termasuk dalam kategori Industri Kreatif. Selama ini yang sudah berjalan baru Industri Kreatif Fashion. Perlu lebih banyak bentuk pelatihan yang dibuat khususnya dari sisi Industri Kreatif seperti Animasi, Desain, Music, Kerajinan dan masih banyak lagi jenisnya.
3. Pelatihan Kemasan yang aman bagi Khususnya di Industri Makanan.

2. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2019 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Koperasi Baik	88 %	88,67 %	100,76	88,41 %
Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25 %	25,80 %	103,2	25,70 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah berhasil mencapai Persentase Koperasi Baik, dari yang ditargetkan 88 % tercapai 88,67 % atau berhasil mencapai target 100,76 %, dan Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya dari yang ditargetkan tahun 2019 yaitu 25 % tercapai 25,80 %, atau berhasil mencapai target 103,20 %.

Dengan meningkatnya persentase Koperasi baik dari aspek Kelembagaan, usaha, dan administrasi Keuangannya serta meningkatnya persentase jumlah UMKM yang meningkat nilai omsetnya diharapkan mampu mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja berlandaskan semangat wirausaha serta kemandirian koperasi. Program inovatif yang dikembangkan untuk mendukung adalah I-JUS MELON atau ijin usaha Mikro melalui Online dan Kredit Wibawa bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun Program yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah :

- a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	55 %	59,68 %	108,51	56,07 %
Persentase Meningkatnya Kualitas produk yang dibina	13 %	14,53 %	111,77	14,49 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase Kualitas Usaha Mikro yang dibina dari yang ditargetkan 55 % menjadi 59,68 %, atau berhasil mencapai target 108,51 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 yang sebesar 56,07 % sedangkan Persentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah 13 % berhasil tercapai 14,53 % atau berhasil mencapai target sebesar 111,77 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 14,49 %

Kelembagaan UMKM di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2019 dapat dijelaskan pada data dibawah ini :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Jumlah UMKM	Unit	14.893	17.567
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	14.879	17.546
Jumlah UMKM yang dibina	Unit	2.140	2.857
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	25.719	30.357
Jumlah Omset	Rupiah	1.435.111.276.173	1.760.465.984.566
Fasilitasi Permodalan UMKM	Rupiah	6.503.500.000	9.806.500.000

Dengan terlaksananya program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, pelaku usaha mikro semakin meningkat produktifitas dan Kualitas produk serta manajemen pengelolaan usahanya, sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasaran.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Penguatan Mutu Produk UMKM; (2) Pendampingan Usaha Mikro; (3) Peningkatan Manajemen Usaha Mikro; (4) Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah; (5) Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan.

b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi UMKM

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Legalitas Pelaku Usaha	35 %	54,50 %	155,72	78,25 %
Persentase akses pembiayaan	30 %	80,14 %	267,13	79,0 %

Untuk fasilitasi legalitas pelaku usaha dengan memberikan kemudahan pelaku usaha memperoleh kepastian hukum akan usaha dan produknya dengan memberikan kemudahan pengurusan IUMK melalui I-Jus Melon, Prosentase Legalitas Pelaku usaha pada tahun 2019 yang ditargetkan 35 % dapat tercapai 54,50 %, atau berhasil mencapai target 155,72 %. Sedangkan fasilitasi akses

pembiayaan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses permodalan melalui kredit wibawa yang pada tahun 2019 ditargetkan 30 % tercapai 80,14 % atau berhasil mencapai target sejumlah 267,13 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 79,0 %

Dari program yang dilaksanakan ini diharapkan masyarakat/pelaku usaha mampu memberdayakan diri dengan membuka usaha atau menjadi wirausaha baru karena mendapat kemudahan dalam mengakses berbagai fasilitas baik legalitas, permodalan, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya serta mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro; dan (2) Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro.

c) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Koperasi Aktif	88,4 %	88,67 %	100,31	88,41 %
Persentase Koperasi Sehat	12 %	24,6 %	205	8,89 %
Persentase Omset Koperasi	0,6 %	49,89 %	8.315	2,39 %

Pada Tahun 2019 Kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase koperasi aktif dari yang ditargetkan 88,4 % menjadi 88,67 % atau berhasil mencapai target sejumlah 100,31 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 88,41 %. Persentase koperasi sehat dari target yang ditetapkan di tahun 2019 12 % menjadi 24,6 % atau berhasil mencapai target sejumlah 205 %. Sedangkan Persentase omset Koperasi dari target yang ditetapkan di tahun 2019 yaitu 0,6 % yang berhasil tercapai 49,84 % atau berhasil mencapai target sejumlah 8.315 %.

Adapun Kelembagaan Koperasi di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2019 dapat dijelaskan pada data dibawah ini.

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	618	634
Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	699	715
Persentase Koperasi Aktif	Persen	88,41	88,67
Jumlah Omset Koperasi	Rupiah	1.253.347.938.000	1.878.627.483.000
Jumlah Aset Koperasi	Rupiah	1.491.506.932.000	1.700.193.870.000
Fasilitasi Permodalan Koperasi	Rupiah	1.250.000.000	1.500.000.000

Dengan tercapainya target tersebut diatas diharapkan pengelola Koperasi dapat lebih meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi agar

berfungsi lebih efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain didukung dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi; (2) Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi; (3) Pengembangan Usaha Koperasi; (4) Peningkatan Pengendalian Koperasi; (5) Penilaian Kesehatan Koperasi; (6) Fasilitasi Hari Koperasi; (7) Fasilitasi Kelembagaan Koperasi; (8) Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi; (9) Advokasi Dan Pendampingan Koperasi; (10) Fasilitasi Perijinan Koperasi; (11) Fasilitasi Informasi Koperasi; (12) Peningkatan Kepatuhan Koperasi; (13) Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi.

d) Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Akses Pemasaran	20 %	20,35 %	101,75	24,5 %

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase akses Pemasaran dari yang ditargetkan 20 % tercapai 20,35 % atau berhasil mencapai target sejumlah 101,75 %. Fasilitasi akses pemasaran dilaksanakan antara lain dengan mengikuti pameran, pelaksanaan kontak dagang, temu usaha dengan pengusaha besar dan Fasilitasi galeri di Kawasan Kota Lama, Gedung Balaikota, Pasar Bulu dan Pasar Srandol,

Sehingga terkait dengan rekomendasi DPRD Kota Semarang pada laporan LKPJ tahun lalu dimana jumlah pelaku UMKM yang semakin meningkat tetapi terkendala pada jangkauan pemasaran produk UMKM yang masih terbatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah melaksanakan dengan memberikan fasilitas pemasaran produk UMKM melalui galeri dan pemasaran online serta mengikuti pameran, kontak dagang dan mengadakan kemitraan usaha dengan pengusaha besar dan akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 Fasilitasi jaringan pemasaran melalui pameran dilaksanakan sebanyak 15 kali di 9 Kabupaten/Kota yaitu di Kab. Demak (Jateng) pada tanggal 27 Februari 2019 dalam rangka Gelar Produk Unggulan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Musrenbangwil Se-Eks Karisidenan Semarang, di Cihampelas Walk-Bandung (Jawa Barat) tanggal 14-17 Maret 2019 dalam rangka Bandung PUKD Expo 2019, di Java mall Semarang pada tanggal 20-26 Maret 2019 dalam rangka Semarang Business & Entrepreneur Expo 2019, di Lombok Epicentrum Mall pada tanggal 21-24 Maret 2019 dalam rangka Indonesia Product

Expo 2019, di Hotel PO Semarang pada tanggal 29 Maret 2019 dlm rangka Rakernas APEKSI XIV dan Indonesia City Expo 2019, di Java Mall Semarang tanggal 5-8 April 2019 dalam rangka Gemerlap EXPO, di Jogja Expo Center (Yogyakarta) pada tanggal 25-28 April 2019 dalam rangka Gebyar UMKM, Koperasi dan PKBL Expo ke -11, di DP Mall Semarang tanggal 25-28 April 2019 dalam rangka Semarang Hitz Market, di JCC Jakarta pada tanggal 26-29 Juni 2019 dalam rangka Trisakti Tourism Award (Destinasi Indonesia Expo & Conference) 2019, di lapangan Simpang Lima Semarang pada tanggal 2 – 6 Juli 2019 dalam rangka Indonesia City Expo 2019, di GOR Satria Purwokerto pada tanggal 11-14 Juli 2019 dalam Pameran Hari Koperasi Nasional Expo 2019, di Banjir Kanal Barat Semarang pada tanggal 21-24 Agustus 2019 dalam rangka Semarang Introducing Market 2019, di GOR Giri Mandala Wonogiri tanggal 23-25 Agustus 2019 dalam rangka Kriya Dekranasda Propinsi Jawa Tengah, di Mega Mall Batam Center-Batam pada tanggal 1-4 Nopember 2019 dalam rangka Gelar Inovasi Koperasi dan UMKM Indonesia 2019. Disamping itu sebagian dari produk Unggulan UMKM juga telah difasilitasi untuk dapat dipasarkan ke manca negara dengan mengikutikan Pameran Heritage Festival Edmonton di Canada pada tanggal 3 - 5 Agustus 2019.

Dengan tercapainya program dan kegiatan ini para pelaku usaha mikro diharapkan akan memiliki jangkauan pemasaran produk unggulan mereka ke wilayah yang lebih luas yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan omset para pelaku usaha mikro. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha dan Kemitraan UMKM; (2) Fasilitasi Promosi Produk UMKM; (3) Perluasan Akses Pasar.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	9.471.270.000	8.978.627.137	94,80
	JUMLAH	9.471.270.000	8.978.627.137	94,80

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya kualitas SDM Pengurus/pengelola Koperasi.
2. Masih banyaknya Koperasi yang mempunyai Unit Usaha Simpan pinjam belum memisahkan Laporan Keuangannya serta Koperasi Simpan Pinjam yang belum melaporkan kegiatan usaha simpan pinjamnya, sehingga belum bisa dinilai kesehatannya.

3. Kurangnya pemahaman Koperasi dan pelaku usaha terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga Keuangan.
4. Masih terbatasnya jangkauan pemasaran produk usaha mikro.
5. Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kualitas produk dan usahanya.
6. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi perlindungan produk antara lain PIRT dan HAKI.

SOLUSI

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

1. Melaksanakan pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi serta melaksanakan uji Kompetensi bagi manajer Koperasi.
2. Melaksanakan Pembinaan kepada Pengurus KSP/USP dan Bintek Penilaian Kesehatan Simpan pinjam secara Online melalui sipon.penkeskop.semarangkota.go.id
3. Melaksanakan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro maupun pengelola Koperasi serta menyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan
4. Selain memberikan fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro melalui Galeri UMKM di Kota Lama, Pasar Bulu dan Pasar Srandol, pemasaran online pada <http://semarangkreatifgaleri.com> dan <https://www.blibli.com/> serta dengan mengikutsertakan pelaku usaha untuk mengikuti pameran, kontak dagang dan mengadakan kemitraan usaha dengan pengusaha besar juga akan diselenggarakan Festival dan Bazar KUMKM dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kota Semarang.
5. Melaksanakan Pelatihan manajemen kewirausahaan dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang antara lain melalui klinik bisnis dan inkubator bisnis.
6. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan pemberian Fasilitasi Sertifikasi PIRT dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro melalui kegiatan Penguatan mutu produk UMKM.

PENGHARGAAN

Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 adalah :

1. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia diberikan kepada Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wakil Walikota Semarang.
2. Penghargaan Koperasi Berprestasi Tahun 2019 Jenis Simpan Pinjam dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia diberikan kepada Koperasi KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang.
3. Penghargaan dari LEPRID (Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang atas prestasi Rekor UMKM berijin terbanyak 16.597 UMKM sejak Tahun 2015.

3. Urusan Wajib Pangan

Hasil capaian indikator kinerja pada Urusan Wajib Pangan selama Tahun 2019 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Ketersediaan pangan penduduk (kkal/kapita/hari)	3.053	3.053	100	3.052
Pola Pangan Harapan (satuan skor)	87,7	94	107,18	87,7
Cakupan daerah rentan pangan (kelurahan)	18	0	118	0
Tingkat keamanan pangan (%)	80	76,01	95,01	83,56
Tingkat ketahanan pangan (%)	90,925	92,50	101,73	92,815

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah :

- a. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2019 mencapai 94 skor, artinya capaian ini telah melampaui dari yang di targetkan sebesar 87,7 skor. Dalam prosentase, capaian tersebut mencapai 107,18 %. Capaian yang melampaui target tersebut tak lepas dari berbagai upaya yang ditempuh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang melalui berbagai kegiatan diantaranya :
 - Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
 - Apresiasi Ketahanan Pangan.
 - Pengembangan Pangan Lokal.Kegiatan yang dilaksanakan secara intens tersebut menjadikan keseimbangan proporsi 9 kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat sudah baik dan mendekati seimbang.
- b. Cakupan daerah rentan pangan yang ditargetkan hanya 18 kelurahan saja, pada tahun 2019 justru sudah tidak ada lagi kelurahan yang masuk dalam cakupan rentan pangan, atau bisa disebut cakupan daerah rentan pangan sudah 0 kelurahan. Artinya semakin sedikit daerah yang masuk dalam

akupan rentan pangan maka semakin baik untuk tingkat ketahanan pangannya. Jika diprosentasikan, jumlah yang ditargetkan 18 kelurahan namun berhasil sampai 0 kelurahan artinya menacapai 118 %. Hal ini menunjukkan bahwa kota semarang sudah tidak lagi dalam cakupan rentan pangan, namun sudah mulai masuk dalam prioritas cukup tahan pangan. Sedangkan capaian indikator program adalah sebagai berikut :

1. Program Ketahanan Pangan

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Ketersediaan pangan penduduk (kkal/kapita/hari)	3.053	3.053	100	3.052
Pola Pangan Harapan (satuan skor)	87,7	94	107,18	87,7
Tingkat keamanan pangan (%)	80	76,01	95,01	83,56 %
Cakupan daerah rentan pangan	18	0	118	0

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai Program Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a) Ketersediaan pangan penduduk sudah mencapai 3.053 kkal/kapita/hari sesuai yang ditargetkan yaitu 3.053 kkal/kapita/hari, artinya sudah berhasil mencapai target 100%. Hal ini lebih dikarenakan oleh ketersediaan beras yang ada di Kota Semarang mencukupi.
- b) Capaian Pola Pangan Harapan sebesar 94 skor dari yang di targetkan sebesar 87,7 skor atau dengan prosentase sebesar 107,18 %. Hal ini dapat dilihat dari potret keseimbangan proporsi 9 kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat sudah baik dan mendekati seimbang.
- c) Cakupan daerah rentan pangan sebesar 118 % (0 kelurahan) dari yang ditargetkan sebesar 18 kelurahan, hal ini menunjukkan bahwa kota semarang sudah tidak lagi dalam prioritas rentan pangan namun sudah masuk dalam prioritas cukup tahan pangan.
- d) Tingkat keamanan pangan sebesar 76,01 % dari yang ditargetkan sebesar 80%, atau menurun 7,55%. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya makanan yang mengandung bahan pengawet. Tentu kita masih ingat dengan diketemukannya anggur yang mengandung formalin, ditemukannya mie kuning basah yang mengandung formalin. Dengan adanya kasus tersebut di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan lebih meningkatkan intensitas pengawasan makanan yang beredar dengan semangat bergerak bersama menggandeng dinas – dinas terkait.



2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
Penanganan daerah rentan rawan pangan (kelurahan)	115	131	113,91	125

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Penanganan daerah rentan rawan pangan dari 115 kelurahan yang ditargetkan pada tahun 2019 telah berhasil di realisasikan menjadi 131 kelurahan, atau dengan kata lain telah mencapai prosentase 113,91 %. Keberhasilan capaian tersebut karena intensitas pelatihan semakin ditingkatkan, diantaranya pelatihan olahan pangan dan pelatihan pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hidroponik.

Selain melalui pelatihan-pelatihan tersebut, juga didukung dengan kegiatan – kegiatan lainnya, yaitu :

- Penyaluran bantuan berupa beras kepada lokasi yang berdampak bencana.
- Penempatan ATM beras di 5 lokasi (Kelurahan Mugasari, Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Kuningan, Kelurahan Palebon, dan Kelurahan Tandang)
- Pendataan pada warga masyarakat yang sudah terdaftar pada BDT maupun PKH tapi belum menerima bantuan Rastra (Beras Sejahtera) Melalui program dan kegiatan yang saling bersinergi tersebut, pada tahun 2019 ini menjadikan kota Semarang sudah terlepas dari posisi rawan pangan, namun sudah mulai beranjak pada daerah yang cukup tahan pangan.

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
Dinas Ketahanan Pangan	5.006.136.000	96,06	96,06
JUMLAH	5.006.136.000	96,06	96,06

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan wajib Pangan pada Tahun 2019 adalah pada indikator Tingkat Keamanan Pangan, karena pada Tahun 2019 ini Indikator Tingkat Keamanan Pangan hanya mencapai 76,01 % dari yang ditargetkan 80 % belum terpenuhinya target lebih disebabkan oleh :

- Masih banyaknya makanan yang mengandung bahan – bahan yang berbahaya yang masih beredar di Kota Semarang, seperti beredarnya Anggur yang mengandung formalin dan mie basah yang mengandung formalin.



2. Masih terbatasnya fasilitas yang mendukung adanya mini laboratorium untuk melakukan uji laboratorium di pasar tradisional, pasar modern maupun di kantin-kantin sekolah di Kota Semarang.

SOLUSI

Solusi yang direkomendasikan terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Lebih meningkatkan pengawasan dan memperbanyak sosialisasi tentang keamanan pangan di masyarakat.
2. Meningkatkan sinergitas antara dinas terkait, pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat (Organisasi Masyarakat, CSR dll) dalam kaitannya pengawasan maupun sosialisasi keamanan pangan.

PENGHARGAAN

Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan Penghargaan sebagai Juara Harapan II tingkat Provinsi dalam “ LOMBA MERANGKAI UMBI “ dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-39 di Salatiga.



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Tahun 2019 Kota Semarang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri dari formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*). Formulasi kebijakan anggaran yang menjadi dasar dalam perencanaan operasional anggaran adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Daerah. Formulasi Kebijakan Anggaran berkaitan dengan analisis fiskal sedangkan perencanaan rasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Latar belakang penyusunan KUA adalah dalam rangka menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahun 2019 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 dengan mengacu pada RKPD Kota Semarang Tahun 2019.



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 dengan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Tahun 2019.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan dan penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak DPRD Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Data Realisasi APBD Tahun 2019 yang dituangkan dalam LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan data *unaudited* atau belum diaudit oleh BPK. Data keuangan yang sudah diaudit akan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2019. APBD Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan per 31 Desember 2019 dan saat ini masih dalam proses Audit BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

Berdasarkan realisasi dan struktur APBD Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

D.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum Anggaran Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2019, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.128.176.142.000,-
 2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.829.949.744.000,-
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 802.052.284.000,-
- Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.760.178.170.000,-



D.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tiap tahun diupayakan untuk dapat terus meningkat namun dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan guna pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.



- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- d) dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- g) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya



dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

- i) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- j) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- k) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-Undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- l) Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat



ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

- 2) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
 - a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 - d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.



- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- a. Dana Perimbangan
- Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.
 - b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019
 - c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.
 - 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.
 - 3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
 - 4) Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
 - 5) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

D.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan diupayakan dengan berbagai langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dengan memperhatikan potensi yang ada dengan tetap mendasarkan kepada aspek pelayanan, keadilan, serta kepentingan umum, antara lain melalui peningkatan pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2. Meningkatkan law enforcement dalam penegakan perda pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Semarang, baik melalui media konvensional maupun media berbasis daring (online);
4. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemungut pajak dan retribusi;
5. Menyederhanakan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana, mudah dan akuntabel;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
7. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan Provinsi;
10. Meningkatkan kinerja manajemen bisnis BUMD (terutama BUMD yang profit oriented) sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran untuk berkontribusi terhadap pendapatan Pemerintah Kota Semarang.

Secara umum di Tahun 2019 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang telah mencapai target, bahkan beberapa pendapatan melampaui target. Di sisi lain terdapat pendapatan yang belum mencapai target.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 sebagai berikut :

Target Pendapatan	Rp.	4.760.178.170.000,-
Realisasi Pendapatan	<u>Rp.</u>	<u>4.565.770.644.232,-</u>
Selisih Kurang	Rp.	(194.407.525.768,-)

Realisasi Pendapatan mencapai 95,92 % dari target Pendapatan Tahun 2019.



Target dan Realisasi pendapatan secara rinci adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1.	Pendapatan Asli Daerah.	2.128.176.142.000	2.066.264.067.403	(61.912.074.597)	97,09	1.821.496.831.874
2.	Dana Perimbangan	1.829.949.744.000	1.738.942.211.620	(91.007.532.380)	95,03	1.689.237.451.791
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah.	802.052.284.000	760.564.365.209	(41.487.918.791)	94,83	723.882.655.954
Jumlah Pendapatan Daerah.		4.760.178.170.000	4.565.770.644.232	(194.407.525.768)	95,92	4.234.616.939.619

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Target Rp. 2.128.176.142.000,-

Realisasi Rp. 2.066.264.067.403,-

Selisih Kurang Rp. (61.912.074.597,-)

Realisasi PAD mencapai 97,09 % dari target PAD Tahun 2019.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.465.881.250.000	1.561.698.569.340	95.817.319.340	106,54	1.331.817.746.450
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	180.219.723.000	113.669.193.269	(66.550.529.731)	63,07	107.791.109.630
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	41.066.960.000	41.241.433.982	174.473.982	100,42	42.552.117.491
4.	Lain-lain PAD yang Sah	441.008.209.000	349.654.870.812	(91.353.338.188)	79,29	339.339.134.403
Jenis PAD		2.128.176.142.000	2.066.264.067.403	(61.912.074.597)	97,09	1.821.496.831.874

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan Pajak dilakukan oleh OPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang.



Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 adalah :

Target	Rp.1.465.881.250.000,-
Realisasi	<u>Rp.1.561.698.569.340,-</u>
Selisih Lebih	Rp. 95.817.319.340,-

Realisasi Pajak Daerah mencapai 106,54 % dari target Pajak Daerah.

Rincian Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1.	Pajak Hotel	98.500.000.000	110.599.114.298	12.099.114.298	112,28	84.404.797.270
2.	Pajak Restoran	175.325.000.000	168.988.277.806	(6.336.722.194)	96,39	146.158.818.822
3.	Pajak Hiburan	30.500.000.000	33.672.013.450	3.172.013.450	110,40	28.320.064.901
4.	Pajak Reklame	40.000.000.000	29.747.066.270	(10.252.933.730)	74,37	24.897.941.656
5.	Pajak Penerangan Jalan	260.000.000.000	234.438.338.634	(25.561.661.366)	90,17	222.527.900.016
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	750.000.000	853.632.000	103.632.000	113,82	760.583.800
7.	Pajak Parkir	21.750.000.000	24.322.158.461	2.572.158.461	111,83	20.801.146.800
8.	Pajak Air Tanah	13.000.000.000	14.853.585.407	1.853.585.407	114,26	8.871.473.962
9.	Pajak Sarang Burung Walet	56.250.000	0	(56.250.000)	0,00	125.000
10.	Pajak BPHTB	401.000.000.000	464.118.368.011	63.118.368.011	115,74	384.109.332.739
11.	Pajak PBB	425.000.000.000	480.106.015.003	55.106.015.003	112,97	410.965.561.484
	PAJAK DAERAH	1.465.881.250.000	1.561.698.569.340	95.817.319.340	106,54	1.331.817.746.450

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan Pemungutannya dilakukan oleh OPD penghasil.

Target dan Realisasi Retribusi Daerah adalah :

Target	Rp. 180.219.723.000,-
Realisasi	<u>Rp. 113.669.193.269,-</u>
Selisih Kurang	Rp. (66.550.529.731,-)

Realisasi Retribusi Daerah mencapai 63,07 % dari target Retribusi Daerah.

Rincian Penerimaan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	%	REALISASI 2018
1	DINAS PENDIDIKAN	592.007.000	592.096.577	89.577.00	100,02	375.675.568
	Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah	592.007.000	592.096.577	89.577.00	100,02	375.675.568
2	DINAS KESEHATAN	400.000.000	481.474.500	81.474.500.00	120,37	411.165.500
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	400.000.000	481.474.500	81.474.500.00	120,37	411.165.500
3	DINAS PENATAAN RUANG	61.353.000.000	39.489.771.000	(21.863.229.000.00)	64,36	46.818.400.700



NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	%	REALISASI 2018
	Retr.Penggantian Biaya Cetak Peta	2.000.000.000	2.742.786.000	742.786.000.00	137,14	1.866.001.000
	Retr. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah	11.000.000.000	5.524.719.850	(5.475.280.150.00)	50,22	3.518.075.800
	Retr. Ijin Mendirikan Bangunan	48.353.000.000	31.222.265.150	(17.130.734.850.00)	64,57	41.134.838.200
	Retr. Ijin Gangguan/Keramaian	0	0	0	0,00	299.485.700
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.700.320.000	3.069.012.000	(631.308.000.00)	82,94	3.188.806.806
	Retr.Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Myt	1.088.100.000	706.118.000	(381.982.000.00)	64,89	764.999.000
	Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	2.612.220.000	2.362.894.000	(249.326.000.00)	90,46	2.423.807.806
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.329.547.000	748.635.000	(580.912.000.00)	56,31	488.226.900
	Retr.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.313.147.000	727.885.000	(585.262.000.00)	55,43	464.976.900
	Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah	16.400.000	20.750.000	4.350.000.00	126,52	23.250.000
6	DINAS TENAGA KERJA	2.600.000.000	3.731.987.150	1.131.987.150.00	143,54	4.028.475.300
	Retr. Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	2.600.000.000	3.731.987.150	1.131.987.150.00	143,54	4.028.475.300
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.000.000.000	24.862.283.500	3.862.283.500.00	118,39	19.917.704.100
	Retr.Pelayanan Persampahan	19.975.000.000	23.655.169.700	3.680.169.700.00	118,42	18.854.305.700
	Retr. Penyedotan Kakus	475.000.000	581.260.800	106.260.800.00	122,37	470.998.400
	Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah	550.000.000	625.853.000	75.853.000.00	113,79	592.400.000
8	DINAS PERHUBUNGAN	37.809.855.000	13.085.755.570	(24.724.099.430.00)	34,61	9.907.038.820
	Retr. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	29.261.034.000	2.525.110.000	(26.735.924.000.00)	8,63	2.441.057.000
	Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor	7.304.137.000	8.989.380.070	1.685.243.070.00	123,07	6.120.646.820
	Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah	53.394.000	54.000.000	606.000.00	101,13	49.500.000
	Retr. Terminal	59.940.000	78.665.500	18.725.500.00	131,24	86.835.000
	Retr.Tempat Khusus Parkir	1.050.000.000	1.362.475.000	312.475.000.00	129,76	1.153.250.000
	Retr. Ijin Trayek	81.350.000	76.125.000	(5.225.000.00)	93,58	55.750.000
9	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.387.048.000	4.324.146.000	(3.062.902.000.00)	58,54	3.557.395.500
	Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah	5.142.738.000	2.560.480.000	(2.582.258.000.00)	49,79	2.001.358.000



NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	%	REALISASI 2018
10	Retr.Tempat Rekreasi & Olah Raga	2.244.310.000	1.763.666.000	(480.644.000.00)	78,58	1.556.037.500
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.000.000.000	2.183.106.175	183.106.175.00	109,16	2.800.878.050
	Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah	290.514.500	640.114.925	349.600.425.00	220,34	430.123.800
11	Retr.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	565.000.000	311.200.000	(253.800.000.00)	55,08	326.000.000
	Retr.Tempat Rekreasi & Olahraga	1.144.485.500	1.231.791.250	87.305.750.00	107,63	2.044.754.250
	DINAS PERIKANAN	180.540.000	187.659.347	7.119.347.00	103,94	121.364.220
12	Pemakaian Kekayaan Daerah	84.240.000	110.189.000	25.949.000.00	130,80	90.216.000
	Retr. Tempat pelelangan Ikan	48.600.000	20.968.047	(27.631.953.00)	43,14	31.148.220
	Retr.Penjualan Produksi Usaha Daerah	47.700.000	56.502.300	8.802.300.00	118,45	0
13	DINAS PERDAGANGAN	40.408.656.000	19.720.143.950	(20.688.512.050.00)	48,80	14.808.903.566
	Retr. Pelayanan Pasar	34.908.656.000	15.933.308.850	(18.975.347.150.00)	45,64	12.288.325.266
	Retr. Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.500.000.000	1.069.034.400	(1.430.965.600.00)	42,76	1.003.188.400
14	Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000.000	2.717.800.700	(282.199.300.00)	90,59	1.517.389.900
	SEKRETARIAT	1.418.750.000	1.141.722.500	(277.027.500.00)	80,47	1.363.798.500
	Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000	341.487.500	141.487.500.00	170,74	585.952.500
14	Retr.Tempat Penginapan / Villa	1.218.750.000	800.235.000	(418.515.000.00)	65,66	777.846.000
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	40.000.000	51.400.000	11.400.000.00	128,50	0
	Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000	51.400.000	11.400.000.00	128,50	0
RETRIBUSI DAERAH		180.219.723.000	113.669.193.269	(66.550.529.731.00)	63,07	107.787.833.530

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang dipisahkan :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah PAD yang berasal dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini dikelola dan diterima melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Target dan Realisasi HPKD yang dipisahkan adalah :

Target	Rp. 41.066.960.000,-
Realisasi	<u>Rp. 41.241.433.982,-</u>
Selisih Lebih	Rp. 174.473.982,-



Realisasi HPKD mencapai 100,42 % dari target HPKD yang dipisahkan.

Rincian HPKD yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	PDAM	13.700.000.000	9.441.228.380	(4.258.771.620)	68,91	15.018.950.712
3	Perusahaan Daerah Bank Pasar	650.000.000	759.963.975	109.963.975	116,92	545.918.617
4	Perusahaan Daerah BPR BKK Semarang Tengah	1.300.000.000	1.312.038.676	12.038.676	100,93	1.247.179.313
6	Bank Jateng Cabang Semarang	24.000.000.000	27.718.016.825	3.718.016.825	115,49	25.162.549.127
8	PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera	1.200.000.000	919.179.368	(280.820.632)	0,00	577.519.722
7	PT. Taman Satwa	216.960.000	1.091.006.758	874.046.758	502,86	0
	JUMLAH	41.066.960.000	41.241.433.982	174.473.982	100,42	42.552.117.491

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

4) Lain-lain PAD yang Sah :

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari 8 (delapan) Organisasi Perangkat Kerja (OPD) Kota Semarang yaitu Dinas Kesehatan Kota, RSUD, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

Target Rp. 441.008.209.000,-

Realisasi Rp. 349.654.870.812,-

Selisih Kurang Rp. (91.353.338.188,-)

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah mencapai 79,29 % dari target Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	DINAS KESEHATAN KOTA	62.785.529.000	59.060.672.845	(3.724.856.155)	94,07	52.006.171.912
	Pendapatan BLUD Puskesmas Kota Semarang	62.785.529.000	59.060.672.845	(3.724.856.155)	94,07	52.006.171.912
2	RUMAH SAKIT UMUM	217.645.570.000	182.257.719.278	(35.387.850.722)	83,74	191.549.403.148
	Pendapatan BLUD RSUD Kota Semarang	217.645.570.000	182.257.719.278	(35.387.850.722)	83,74	191.549.403.148
3	DINAS PERHUBUNGAN	31.945.805.000	30.407.545.635	(1.538.259.365)	95,18	27.875.038.894
	Pendapatan BLUD Terminal Mangkang	31.945.805.000	30.407.545.635	(1.538.259.365)	95,18	27.875.038.894
4	DINAS PERIKANAN	0	0	0	#DIV/0!	48.079.600
	Penjualan Hasil Perikanan	0	0	0	#DIV/0!	48.079.600
5	DINAS PERTANIAN	1.272.305.000	1.300.414.700	28.109.700	102,21	1.561.597.171
	Penjualan Hasil Pertanian	149.000.000	167.313.100	18.313.100	112,29	142.620.600
	Penjualan Hasil Peternakan	1.123.305.000	1.133.101.600	9.796.600	100,87	1.418.976.571
6	DINAS PERDAGANGAN	4.300.000.000	2.229.443.124	(2.070.556.876)	51,85	2.394.883.027
	Pendapatan Iuran Listrik	4.300.000.000	2.229.443.124	(2.070.556.876)	51,85	2.394.883.027



NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
	dari Pedagang Pasar					
7	B P K A D	116.059.000.000	64.014.670.905	(52.044.329.095)	55,16	56.409.650.037
	Pelepasan Hak Atas Tanah	50.000.000	460.167.450	410.167.450	100,00	426.844.269
	Penj.Peralatan/ Perlengk.Kant. Yg tdk terpakai	2.050.000.000	827.790.000	(1.222.210.000)	40,38	2.391.250.000
	Jasa Giro Kas Daerah	15.000.000.000	7.482.304.080	(7.517.695.920)	49,88	9.121.431.347
	Lain-lain DPKAD	0	10.173.964.397	10.173.964.397	0,00	14.102.812.883
	Rekening Deposito pada Bank	60.000.000.000	4.407.153.418	(55.592.846.582)	7,35	23.987.723.771
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kel Masy.	30.000.000	30.661.510	661.510	102,21	14.965.551
	Sewa Lahan/Bangunan	38.929.000.000	40.632.630.050	1.703.630.050	104,38	6.364.622.216
8	Badan Pendapatan Daerah	7.000.000.000	10.384.404.325	3.384.404.325	148,35	7.494.310.614
	Pendapatan Denda Pajak	7.000.000.000	10.384.404.325	3.384.404.325	148,35	7.494.310.614
	PENERIMAAN LAIN- LAIN PAD YG SAH	441.008.209.000	349.654.870.812	(91.353.338.188)	79,29	339.339.134.403

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah :

Target Rp. 1.829.949.744.000,-

Realisasi Rp. 1.738.942.211.620,-

Selisih Kurang Rp. (91.007.532.380,-)

Realisasi Dana Perimbangan mencapai 95,03 % dari target Dana Perimbangan. Rincian Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1.	Bagi Hasil Pajak	171.020.562.000	112.727.953.883	(58.292.608.117)	65,91	167.389.857.870
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2.349.907.000	1.367.400.200	(982.506.800)	58,19	1.394.502.004
3.	Dana Alokasi Umum.	1.317.186.595.000	1.317.685.763.000	499.168.000	100,04	1.190.422.387.000
4.	Dana Alokasi Khusus	339.392.680.000	307.161.094.537	(32.231.585.463)	90,50	330.030.704.917
	Dana Perimbangan	1.829.949.744.000	1.738.942.211.620	(91.007.532.380)	95,03	1.689.237.451.791

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

1) Bagi Hasil Pajak :

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Pajak berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri



dan Pajak Penghasilan Pasal 21, DBHCHT dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29.

Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak adalah :

Target	Rp. 171.020.562.000,-
Realisasi	<u>Rp. 112.727.953.883,- -</u>
Selisih Kurang	Rp. (58.292.608.117,-)

Atau realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 65,91 % dari target Bagi Hasil Pajak Tahun 2019.

Adapun Rincian Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi & Bangunan P3	8.977.032.000	6.484.589.800	(2.492.442.200)	72,24	8.248.065.051
2.	PPH OPDN & Pasal.21	153.524.228.000	91.735.129.482	(61.789.098.518)	59,75	134.742.372.118
3	PPH Pasal 25/29	0	5.981.315.400	5.981.315.400	0,00	16.718.874.701
4	Dana Bagi Hasil Cukai& Tembakau (DBHCHT)	8.519.302.000	8.526.919.201	7617201	100,09	7.680.546.000
	Bagi Hasil Pajak	171.020.562.000	112.727.953.883	(58.292.608.117)	65,91	167.389.857.870

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

2) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (BHP / SDA) :

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam adalah dana yang berasal dari Penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Target dan Realisasi BHP / SDA adalah :

Target	Rp. 2.349.907.000,-
Realisasi	<u>Rp. 1.367.400.200,- -</u>
Selisih Kurang	Rp. (982.506.800,-)

Atau realisasi BHP/SDA mencapai 58,19 % dari target BHP / SDA.

Rincian Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Pertambangan Umum	196.000	137.200	(58.800)	1348,40	2.642.858
2	Pertambangan Panas Bumi	42.534.000	29.773.800	(12.760.200)	62,47	26.570.761
3	Pertambangan Minyak Bumi	172.822.000	95.052.100	(77.769.900)	21,03	36.346.929
4	Pertambangan Gas Bumi	763.518.000	419.934.900	(343.583.100)	38,14	291.237.025
5	Kehutanan	387.244.000	232.346.400	(154.897.600)	86,89	336.469.840
6	Perikanan	983.593.000	590.155.800	(393.437.200)	71,29	701.234.591
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.349.907.000	1.367.400.200	(982.506.800)	58,19	1.394.502.004

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019



3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Target Rp. 1.317.186.595.000,-

Realisasi Rp. 1.317.685.763.000,-

Selisih Rp. 499.168.000,-

Atau realisasi Dana Alokasi Umum mencapai 100,04 % dari target Dana Alokasi Umum Tahun 2019.

Rincian Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Dana Alokasi Umum Formula	1.225.952.784.000	1.225.952.784.000	0	100,00	1.190.422.387.000
2	Dana Alokasi Umum Tambahan	62.471.136.000	62.471.136.000	0	100,00	
3	Dana Alokasi Umum Tambahan	28.762.675.000	29.261.843.000	499.168.000	101,74	
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)		1.317.186.595.000	1.317.685.763.000	499.168.000	100,04	1.190.422.387.000

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

Dana Alokasi Umum Tambahan poin 3 adalah :

- a) Sesuai PMK RI No. 166/PMK.07/2019 tentang Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah. Besaran alokasi sesuai yang dianjurkan BPJS ditetapkan dalam KMK, yaitu :
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/KM.7/2019 Tanggal 26 November 2019 Tentang Pemotongan Atas Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Dan Penyetoran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran. Untuk Kota Semarang bantuan sebesar Rp. 28.762.675.000,-.
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KM.7/2019 Tanggal 18 Desember 2019 Tentang Selisih Kurang Dan/Atau Selisih Lebih Atas Penyetoran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran. Untuk Kota Semarang bantuan sebesar Rp. 499.168.000,-



- b) Bahwa Pemerintah Kota Semarang atas KMK Nomor 33/PMK.07/2019 telah melakukan perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, sehingga target APBD telah dilakukan penyesuaian, namun atas KMK Nomor 35/KM.7/2019 tidak dilakukan perubahan Peraturan Walikota karena pemotongan dilakukan tanggal 27 Desember 2019 dan baru diketahui oleh Pemerintah Kota Semarang setelah ada update SIMTRADA tanggal 30 Desember 2019, untuk itu realisasi tetap dicatat sebagai pendapatan.
- c) Bahwa dalam hal perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 11 September 2019 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah :

Target	Rp. 339.392.680.000,-
Realisasi	<u>Rp. 307.161.094.537,-</u>
Selisih Lebih	Rp. (32.231.585.463,-)

Realisasi Dana Alokasi Khusus mencapai 90,50 % dari target Dana Alokasi Khusus Tahun 2018. Rincian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	73.129.186.000	66.111.839.104	(7.017.346.896)	90,40	79.584.094.202
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	266.263.494.000	241.049.255.433	(25.214.238.567)	90,53	250.446.610.715
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK)		339.392.680.000	307.161.094.537	(32.231.585.463)	90,50	330.030.704.917

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019



3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Target dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah :

Target Rp. 802.052.284.000,-
Realisasi Rp. 760.564.365.209,-
Selisih Kurang Rp.(41.487.918.791,-)

Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 94,83 % dari target Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2019.

Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Pendapatan Hibah	112.881.120.000	113.338.107.487	456.987.487	100,40	111.643.099.114
2	Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	585.707.338.000	548.361.407.823	(37.345.930.177)	93,62	517.052.050.840
3	Bantuan Keuangan dari Propinsi	20.020.000.000	15.421.023.899	(4.598.976.101)	77,03	34.937.506.000
4	Dana Insentif Daerah	83.443.826.000	83.443.826.000	0	100,00	60.250.000.000
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah		802.052.284.000	760.564.365.209	(41.487.918.791)	94,83	723.882.655.954

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah pusat, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Target dan Realisasi Pendapatan Hibah adalah :

Target Rp. 112.881.120.000,-
Realisasi Rp. 113.338.107.487,-
Selisih Rp. 456.987.487,-)

Realisasi Pendapatan Hibah mencapai 100,40 % dari target Pendapatan Hibah 2019. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Hibah Dana Bos	112.881.120.000	112.942.107.487	60.987.487	100,05	111.643.099.114
2	Hibah Air Limbah	0	396.000.000	396.000.000	0,00	0
Jumlah Pendapatan Hibah		112.881.120.000	113.338.107.487	456.987.487	100,40	111.643.099.114

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019



2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi adalah dana yang berasal dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota se Provinsi yang bersangkutan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya adalah :

Target Rp. 585.707.338.000,-

Realisasi Rp. 548.361.407.823,-

Selisih Kurang Rp. (37.345.930.177,-)

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya mencapai 93,62 % dari target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	195.547.338.000	198.465.517.962	2.918.179.962	101,49	178.268.200.088
2.	Bagi Hasil BBNKB	157.500.000.000	144.196.941.545	(13.303.058.455)	91,55	147.030.334.717
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	157.500.000.000	141.088.924.534	(16.411.075.466)	89,58	123.737.040.104
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	160.000.000	370.769.399	210.769.399	231,73	358.517.078
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	75.000.000.000	64.239.254.383	(10.760.745.617)	85,65	67.657.958.853
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya		585.707.338.000	548.361.407.823	(37.345.930.177)	93,62	517.052.050.840

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

3) Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan keuangan provinsi adalah bantuan dalam penggunaannya dan teknis penganggarannya dibedakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus. Bantuan ini diberikan provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi adalah :

Target Rp. 20.020.000.000,-

Realisasi Rp. 15.421.023.899,-

Selisih kurang Rp. (4.589.976.101,-)

Bantuan Keuangan Provinsi mencapai 77,03 % dari target Tahun 2019.

Adapun rincian dari Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :



NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.020.000.000	15.421.023.899	(4.598.976.101)	77,03	34.937.506.000
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I		20.020.000.000	15.421.023.899	(4.598.976.101)	77,03	34.937.506.000

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

4) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan memberikan reward kepada pemerintah daerah atas penilaian capaian kinerja-nya di atas rata-rata nasional, dan digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah adalah :

Target Rp. 83.443.826.000,-

Realisasi Rp. 83.443.826.000,-

Selisih kurang Rp. 0,-

Realisasi Dana Insentif Daerah mencapai 100 % dari target Dana Insentif Daerah Tahun 2019. Adapun rincian Dana Insentif Daerah adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Dana Insentif Daerah	83.443.826.000	83.443.826.000	0	100,00	60.250.000.000
Jumlah Dana Insentif Daerah		83.443.826.000	83.443.826.000	0	100,00	60.250.000.000

D.1.2 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan mengelola pendapatan daerah Pemerintah Kota Semarang sering mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul pada setiap optimalisasi pendapatan dan solusinya sebagai berikut :

1. Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada PAD

a) Permasalahan Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah

1. Ketidakmampuan Wajib Pajak Restoran untuk membayar Pajak sesuai ketentuan serta ketidakmauan Wajib Pajak Restoran untuk membayar Pajak sesuai ketentuan
2.
 - a) Wajib Pajak Reklame masih menyesuaikan perubahan regulasi Pajak Reklame
 - b) Kurangnya sosialisasi kepada para Biro Reklame
 - c) Penetapan target reklame melihat di tahun 2019 akan adanya rencana kenaikan kelas jalan

3. Penetapan target Pajak Penerangan Jalan memprediksi ada kenaikan tarif listrik tetapi sampai akhir tahun tidak terwujud.
4. Tidak adanya Sarang Burung Walet di Semarang hanya pengemasan saja

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- 1)
 - a) Memasang alat pantau elektronik (E-Tax) di Restoran
 - b) Sosialisasi terhadap pemilik Restoran
 - c) Memberi penghargaan kepada Restoran yang tertib dan benar dalam melaksanakan pembayaran pajak
- 2)
 - a) Melakukan Operasi yustisi rutin terhadap biro-biro yang membandel
 - b) Sosialisasi terhadap peraturan atau regulasi yang baru
 - c) Menyusun harga sewa Reklame yang baru
- 3) Melakukan koordinasi dengan PT. PLN terkait info kenaikan tarif dan jumlah pelanggaran listrik di Kota Semarang.
- 4) Dilakukan upaya pendataan dan pendaftaran secara berkala.

2. Permasalahan Retribusi Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah secara optimal sering terjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh OPD Pengelola Retribusi Daerah bersangkutan. Adapun permasalahan Retribusi Daerah setiap OPD sebagai berikut :

(a) Dinas Penataan Ruang

Permasalahan :

- 1) Tidak tercapainya Target pendapatan Retribusi Sewa Lahan untuk Reklame dikarenakan :
Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame yang disahkan tanggal 21 Agustus 2017 tidak memperbolehkan adanya bangunan konstruksi reklame permanen pada ruas jalan nasional, ruas jalan Provinsi dan ruas jalan milik Pemerintah Kota Semarang tidak diperbolehkan dibangun konstruksi reklame permanen sehingga tidak bisa dipungut retribusi sewa lahan reklame lagi.
- 2) Tidak tercapainya Target pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan :
Pada tahun 2019 pengajuan Ijin IMB masih didominasi oleh pemohon perorangan/perumahan kecil.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :



- 1) Memaksimalkan Ijin IMB di Kawasan industry

(b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan :

1. Tidak tercapainya Target Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikarenakan :
 - Terdapat pembebasan retribusi pelayanan pemakaman berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 469/1006 Tahun 2019 tentang pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Semarang yang berlaku mulai 7 Oktober 2019 s/d 29 Februari 2020
2. Tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan :
 - Kesadaran penghuni yang masih kurang dalam memenuhi kewajiban membayar sewa dan penghuni diharuskan membagi pembayaran sewa rutin dengan pembayaran piutang sewa tahun lalu.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Melakukan sosialisasi terkait telah selesainya masa pembebasan retribusi pelayanan pemakaman.
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Mensosialisasikan kepada penghuni untuk membayar tunggakan sewa dan sewa rutin bulanan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang dan Perwal Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang.

(c) Dinas Pemadam Kebakaran

Permasalahan :

Tidak tercapainya Target Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran dikarenakan :

- 1) Masih kurangnya kesadaran/ketidaktahuan dari pemilik Gedung akan pentingnya safety kebakaran.
- 2) Perlunya perawatan alat proteksi pemadam kebakaran agar jika ada bencana kebakaran alat proteksi pemadam kebakaran dapat bekerja dengan baik.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- 1) Mendatangi secara rutin dan mensosialisasikan aturan dengan pemilik Gedung harus ada kelengkapan safety kebakaran.
- 2) Memberikan teguran pada perusahaan yang belum membayar retribusi agar tertib sesuai peraturan yang berlaku.

(d) Dinas Perhubungan

Permasalahan :

- 1) Tidak tercapainya target pendapatan parkir tepi jalan umum dikarenakan
 - a) Target sebesar 29 Milyar diasumsikan apabila sistem parkir berlangganan belum direalisasikan pada bulan Oktober 2019. Tetapi sampai dengan bulan September 2019, parkir tepi jalan umum masih menggunakan cara konvensional
 - b) Beberapa titik parkir belum efektif penyetorannya sesuai dengan ijin yang berlaku
 - c) Perubahan jalan menjadi satu arah atau kembali dua arah di beberapa ruas jalan, mengakibatkan perubahan pula pencapaian pendapatan parkir
 - d) Banyak jalan-jalan utama terdapat larangan parkir
- 2) Tidak tercapainya target Pendapatan Retribusi Izin Trayek
 - a) Sejumlah armada taksi merubah wilayah operasinya dari wilayah kota ke wilayah propinsi yang kemudian proses perijinannya beralih ke tingkat propinsi sehingga berimbas ke target pendapatan bidang angkutan.
 - b) Masyarakat dan biro tour wisata cenderung lebih memilih bus pariwisata yang memang diperuntukan untuk keperluan wisata atau lainnya, dimana bis tersebut sudah memiliki ijin khusus wisata sehingga tidak lagi memerlukan ijin istimewa

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- 1) Retribusi Parkir di tepi jalan umum
 - a) Penataan dan pendataan titik parkir lama maupun titik parkir baru
 - b) Penambahan titik parkir di daerah yang belum terdata seperti Ngaliyan, Mijen, Tembalang, Banyumanik.
 - c) Parkir dengan sistem komputerisasi sehingga terdata satu lokasi titik parkir hanya atas satu nama kepemilikan ijin

dan nama yang lainnya masuk sebagai asisen parkir. Sehingga tidak terjadi dua kepemilikan.

- d) Rutin mengadakan sosialisasi dengan Tim Sabar Pungli untuk pengecekan dan menemukan titik parkir yang belum terdaftar terutama di daerah-daerah yang belum masuk dalam ijin parkir.
- 2) **Retribusi Ijin Trayek**
 - Himbauan kepada pengusaha angkutan untuk meremajakan dan meningkatkan daya saing armada bis regulernya sehingga masyarakat dan biro tour wisata kembali tertarik untuk menggunakan bis regular.

(e) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan :

- 1) Tidak tercapainya retribusi pemakaian kekayaan daerah dikarenakan :
 - Ruko dan perkantoran di GOR Trilomba Juang tidak tersewa semua, ada beberapa perkantoran digunakan ormas atau cabor sehingga tidak dapat ditarik pembayarannya.
- 2) Tidak tercapainya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikarenakan :
 - a) Untuk sirkuit road race Mijen belum bisa dioperasikan secara maksimal karena masih dalam tahap perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana, begitu juga dengan lapangan futsal belum dapat dioperasikan juga karena sarana dan prasarananya belum memadai.
 - b) Banyak tumbuh pesaing kolam renang yang berada di lingkungan Manunggal Jati, sementara kondisi kolam renang Manunggal Jati masih memerlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
 - c) Lapangan sepak bola Stadion Citarum sedang direnovasi.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- 1) **Retribusi pemakaian kekayaan daerah**
 - Untuk ruko maupun perkantoran di Tri Lomba Juang yang digunakan oleh ormas atau cabor dapat dikeluarkan dari potensi pendapatan.

- 2) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - a) Renovasi atau perbaikan road race Mijen agar segera terealisasi sehingga dapat disewakan secara maksimal, untuk lapangan futsal akan diusulkan anggaran untuk kelengkapan sarana dan prasarananya
 - b) Perlu adanya penambahan dan perbaikan fasilitas maupun sarana dan prasarana di UPTD Gelanggang Olahraga secara menyeluruh perlu segera diprioritaskan untuk dapat bersaing dan menarik minat pengguna atau pengunjung.

(f) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan :

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa belum dapat memenuhi Target dikarenakan :

- Terdapat banyak hotel-hotel baru di dekat area hotel taman lele yang menawarkan harga yang lebih rendah dengan fasilitas yang lebih baik

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan dan fasilitas
- 2) Promosi dengan lebih ditingkatkan
- 3) Koordinasi dengan pihak terkait untuk membuka akses sehingga memudahkan wisatawan menuju Taman Lele.

(g) Dinas Perikanan :

Permasalahan :

Tidak tercapainya Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dikarenakan

- Dinas Perikanan tidak mempunyai TPI lagi

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk pengadaan lahan dan bangunan TPI

(h) Dinas Perdagangan :

Permasalahan :

- 1) Tidak tercapainya Retribusi Pelayanan Pasar dikarenakan :
 - a) Penetapan target tidak sesuai dengan potensi retribusi pedagang
 - b) Ada beberapa pasar yang tidak aktif/sepi transaksi jual beli (Pasar Manyaran, Pasar Banyumanik, Pasar Gedawang,

- Pasar Udanriris, Pasar Tlogosari, Pasar Banjardowo) sehingga retribusi tidak maksimal.
- c) Adanya pemindahan pedagang dari Pasar Johar ke MAJT, sehingga pedagang tidak mau membayar retribusi
- 2) Tidak tercapainya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikarenakan
- a) Adanya perubahan aturan terkait UTTP yang masuk wajib tera dan tera ulang (Permendag No. 67 tahun 2018) dan jangka waktu tera ulang (Permendag No. 68) yang berimbas pada pengurangan potensi.
 - b) Pengurangan potensi dari banyaknya pabrikan alat ukur di Kota Semarang yang tidak memproduksi atau produksinya berkurang (Semarang merupakan Daerah Tera, dimana potensi alat ukur banyak dari Tera terhadap produk baru).
- 3) Tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan
- Titik PKL yang semula masuk/sesuai dengan SK Walikota tentang Penetapan Lahan/lokasi PLK, namun karena proses penataan dan perkembangan kota maka berubah peruntukannya sehingga kondisi riil pedagang di lapangan juga berkurang contoh Taman Indonesia Kaya, Banjir Kanal Timur, Empu Tantular, Jl, W.R. Supratman PKL Barito, dsb.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- 1)
 - a) Penetapan target pendapatan disesuaikan dengan data potensi yang ada di lapangan
 - b) Membuat inovasi untuk menjadikan pasar tradisional mempunyai daya tarik pembeli dan pedagang
 - c) Pedagang Pasar Johar yang ada di penampungan MAJT segera dikembalikan ke Pasar Johar agar retribusi bisa ditarik maksimal sesuai Perda.
- 2)
 - a) Penggalan potensi baru dari alat ukur yang selama ini tidak diterakan di Semarang, misal Meter air.
 - b) Penambahan pelayanan berupa pengujian dan kalibrasi alat ukur.

- 3) Mengganti penarikan retribusi konvensional/karcis dengan E-Retribusi untuk penarikan retribusi pasar, PKL dan metrologi di tahun 2020

(i) Sekretariat Daerah

Permasalahan :

- 1) Tidak tercapainya Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dikarenakan :
 - a) Kurangnya sarana dan prasarana
 - b) Banyak berdirinya penginapan sejenis di sekitar mess Cibubur

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- a) Dilakukan pengecatan, perbaikan dan pemeliharaan secara rutin
- b) Dilakukan pemasaran secara online/selebaran

c) Permasalahan Pendapatan dan Solusi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah (HKPD) Yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di tahun 2019 secara umum telah mencapai target tetapi dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan terkait pengelolaan pendapatan yang terdapat pada Perusahaan Daerah atau BUMD, antara lain :

PD. Bhumi Pandanaran Sejahtera

- 1) Masih belum adanya unit usaha baru yang berjalan.
- 2) Modal usaha yang disertakan masih belum dimanfaatkan sebagai investasi usaha baru.
- 3) Pendapatan yang diperoleh masih didapatkan dari kontribusi bunga bank sebagai tambahan pendapatan.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- 1) Mengajak kemitraan dengan pihak ketiga dalam hal ini untuk penjualan karkas dengan system bagi hasil setiap penjualan karkas, BPS mendapatkan Rp.1000/kg.
- 2) Gerakan makan daging berdasarkan surat edaran Sekretariat Daerah Kota Semarang No.444/6214 tanggal 17 Oktober 2018.

Perumda Air Minum Tirta Moedal

- Rata-rata pemakaian air ditargetkan 25 m³/pelanggan hanya terealisasi 24,27 m³/pelanggan, target sambungan baru sebanyak 8000 terealisasi hanya 3.536 sambungan baru (44%).

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- Perencanaan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) di tahun berikutnya (2019-2020) akan lebih dimatangkan terkait dengan rencana pendapatan dan biaya.

d) Permasalahan Pendapatan dan Solusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(a) Dinas Kesehatan

Permasalahan :

- Tidak tercapainya target pendapatan BLUD Puskesmas dikarenakan SILPA tahun lalu dimasukkan ke dalam target tahun ini.

Solusi :

- Perencanaan prediksi/estimasi pendapatan sesuai dengan kemampuan BLUD

(b) RSUD

Permasalahan

Penerimaan BLUD tidak memenuhi target karena :

1. Adanya rujukan BPJS berjenjang sehingga jumlah pasien menurun
2. Klaim BPJS dari bulan September 2019 – Desember 2019 sebesar Rp.35.759.655.444,- belum terbayar oleh BPJS

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan aturan dari BPJS yang mengharuskan rujukan BPJS berjenjang.
2. RSUD sudah berupaya untuk menagih hutang BPJS.

(c) Dinas Perhubungan

Permasalahan :

Penerimaan BLUD Terminal Mangkang tidak memenuhi target karena :

1. Penentuan target dihitung dari rencana beroperasinya 8 (delapan) koridor dan feeder pada tahun 2019. Tetapi sampai dengan bulan November 2019 koridor 8 dan feeder belum beroperasi. Adanya kecelakaan kendaraan pada titik rawan kemacetan (Jl. Raya Mangkang - Walisongo) yang berimbas pada kemacetan koridor 1 (Mangkang - Penggaron)

2. Sering terjadi penutupan jalan di rute-rute yang dilayani oleh bus BRT sehingga berpengaruh pada jumlah penumpang
3. Pada kurun waktu Januari s/d Juni 2019 terdapat kegiatan libur sekolah sehingga berdampak pada jumlah penumpang terutama murid sekolah
4. Masih kurangnya minat masyarakat menggunakan bus BRT dalam mobilitas kesehariannya

Solusi yang diupayakan sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petugas pelayanan BRT dengan kemungkinan-kemungkinan kecurangan transaksi pendapatan dan standart pelayanan minimal yang telah ditetapkan
2. Berkoordinasi dengan ATCS Dishub untuk mengurai kemacetan yang sering menghambat interval bus BRT
3. Menambah pelayanan rute Bandara Ahmad Yani - Simpanglima yang beroperasi pukul 18.00 - 24.00 mulai 12 Juni 2018
4. Dengan adanya aplikasi Semarang Smart Transportasi City yang diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2018 dan dapat diunduh di playstore android. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memudahkan mendapatkan informasi transportasi pengguna jasa
5. Penambahan sarana dan prasarana berupa rambu BRT untuk penurunan penumpang pada area yang belum terdapat shelter

(d) Dinas Perdagangan

Permasalahan :

Pendapatan Iuran Listrik dari Pedagang Pasar tidak memenuhi target karena :

Target tidak sesuai dengan data pelanggan listrik.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut:

Penetapan anggaran sesuai dengan jumlah data pelanggan listrik

(e) BPKAD

Permasalahan :

1. Jasa Giro Daerah tidak memenuhi target karena tingginya penyerapan anggaran sehingga uang giro tidak mengendap lama dan tidak menghasilkan jasa giro atau realisasinya tergantung posisi keuangan di rekening 668

2. Rekening Deposito pada Bank tidak memenuhi target karena penyerapan anggaran OPD tinggi dan cepat sehingga uang yang didepositokan sedikit.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut:

1. Perkiraan Pendapatan Jasa Giro diperhitungkan secara rasional dan terukur dalam pencapaiannya
2. Perkiraan Pendapatan Deposito diperhitungkan secara rasional dan terukur dalam pencapaiannya

2. Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada Dana Perimbangan

a) Permasalahan Bagi Hasil Pajak Pusat

Bagi Hasil Pajak Pusat yang tidak mencapai target adalah PBB, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 25/29 dikarenakan :

- DBH yang ditransfer berdasar realisasi penerimaan pajak pusat
- Transfer DBH triwulan IV tidak ditransfer oleh pusat karena pusat lebih memprioritaskan membayar kurang bayar

Solusi yang diupayakan sebagai berikut:

- Target DBH tidak mendasarkan pada Perpres Rincian APBN (Alokasi Dana Transfer) tetapi mendasar pada trend realisasi penerimaan 3 tahun terakhir.

b) Permasalahan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tidak mencapai target dikarenakan :

- DBH yang ditransfer berdasar realisasi penerimaan pajak pusat
- Harga minyak dunia direncanakan \$ 120 per barrel realisasinya hanya \$ 40 per barrel
- Transfer DBH triwulan IV tidak ditransfer oleh pusat karena pusat lebih memprioritaskan membayar kurang bayar

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- Target DBH tidak mendasarkan pada Perpres Rincian APBN (Alokasi Dana Transfer) tetapi mendasar pada trend realisasi penerimaan 3 tahun terakhir.

c) Permasalahan Dana Alokasi Khusus :

Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target karena :

- DAK Fisik
Bahwa angka target pendapatan DAK adalah dari alokasi sesuai Perpres tentang rincian APBN tetapi dana yang ditransfer adalah

sesuai nilai kontrak, sehingga seringkali angka kontrak lebih kecil dari pagu alokasi.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- Diupayakan untuk dapat dilakukan optimalisasi kegiatan dari sisa alokasi dana setelah dikurangi nilai kontrak.

3. Permasalahan Pendapatan dan Solusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

a) Permasalahan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tidak mencapai target dikarenakan :

- 1) Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang cukup tinggi, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan masih rendah
- 2) Khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak tercapai target pendapatan karena munculnya mobil baru dengan harga murah sehingga BBNKB rendah
- 3) Target yang ditetapkan Pemkot Semarang melebihi target yang ditetapkan oleh Propinsi

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- Penganggaran target pendapatan DBH tidak lebih besar dari alokasi DBH Pemprov ke Pemkot Semarang

b) Permasalahan Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan tidak mencapai target dikarenakan :

- Pagu anggaran dari Provinsi sebesar Rp. 20.020.000.000,00 dana bantuan keuangan yang ditransfer ke Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan nilai lelang/kontrak.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- Upaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk dapatnya daerah melakukan optimalisasi bankeu dari sisa pagu.

D.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Belanja Daerah tahun 2019 disusun dengan memperhatikan RPJMD 2016-2021 dan mempedomani RKPD



Tahun 2019. Belanja Daerah tahun 2019 disusun berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Selain itu, belanja daerah juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Sinkronisasi dilakukan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, Kementerian dan SKPD terkait di Provinsi dengan mengedepankan sinergitas pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengintegrasian prioritas program dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan kewenangan urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Belanja Daerah tahun 2019 disusun berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan serta fungsi-fungsi penunjang. Prioritas pada tiap urusan disusun berdasarkan prioritas yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2016-2021. Program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan efektifitasnya terhadap pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja berdasarkan Perangkat Daerah di tahun 2019 diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pengalokasian pagu anggaran belanja yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dengan prinsip money follow program dimana hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitasnya. Program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan struktur sesuai dengan ketentuan terbaru.

D.2.1 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2019 disusun dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019

Kebijakan belanja di tahun 2019 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2019 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.
2. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021, dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelesaian permasalahan perkotaan yang ada
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2018.
 - ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
5. Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya

digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan dari Rp. 1.728.042.731.000, menjadi sebesar Rp. 1.611.618.875.834 atau mengalami penurunan sebesar Rp.116.423.855.166 (turun sebesar 6,71%). Penurunan ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi serapan sampai dengan semester satu tahun 2019. Belanja pegawai ini sudah termasuk perhitungan untuk memenuhi semua hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.815.000.000,- atau naik 2,6% karena terdapat tambahan hibah untuk Pamsimas, Yayasan Ponpes Roudlotus Saidiyah, dan Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.
3. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp. 9.262.000.000 karena terdapat penurunan pada beasiswa warga miskin dan bansos untuk Panti Sosial. Di sisi lain, terdapat penambahan bansos untuk tali asih bagi warga binaan lokalisasi Argorejo dan Rowosari Atas. Alokasi bansos ini merupakan pindahan dari Belanja Langsung pada Dinas Sosial.
4. Belanja Bantuan Keuangan Parpol tidak mengalami perubahan.
5. Belanja Tidak Terduga menurun sebesar Rp. 2.500.000.000. Penurunan ini menyesuaikan dengan realisasi penggunaan dan antisipasi jika terdapat hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang membutuhkan penanganan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan sisa waktu pelaksanaan.

Penganggaran Belanja Daerah tahun 2019 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan bersifat penunjang bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Kebijakan untuk belanja tidak langsung di tahun 2019, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:



1. Penganggaran untuk gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2019 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi access dan kenaikan gaji pokok / tunjangan-tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, disamping itu juga penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai yang dibutuhkan di tahun 2019;
2. Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;
3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan di tahun 2019 direncanakan naik dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
4. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

6. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
7. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2019 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan dari Rp. 1.728.042.731.000, menjadi sebesar Rp. 1.611.618.875.834 atau mengalami penurunan sebesar Rp.116.423.855.166 (turun sebesar 6,71%). Penurunan ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi serapan sampai dengan semester satu tahun 2019. Belanja pegawai ini sudah termasuk perhitungan untuk memenuhi semua hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.815.000.000,- atau naik 2,6% karena terdapat tambahan hibah untuk Pamsimas, Yayasan Ponpes Roudlotus Saidiyah, dan Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.
3. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp. 9.262.000.000 karena terdapat penurunan pada beasiswa warga miskin dan bansos untuk Panti

Sosial. Di sisi lain, terdapat penambahan bansos untuk tali asih bagi warga binaan lokalisasi Argorejo dan Rowosari Atas. Alokasi bansos ini merupakan pindahan dari Belanja Langsung pada Dinas Sosial.

4. Belanja Bantuan Keuangan Parpol tidak mengalami perubahan.
5. Belanja Tidak Terduga menurun sebesar Rp. 2.500.000.000. Penurunan ini menyesuaikan dengan realisasi penggunaan dan antisipasi jika terdapat hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang membutuhkan penanganan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan sisa waktu pelaksanaan.

Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung disusun dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2019 seperti yang termuat dalam RKPD Tahun 2019 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021.
2. Belanja Langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2019;
3. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
4. Penganggaran Belanja Langsung disusun menurut Perangkat Daerah dan kewenangannya yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien
6. Pengadaan Pegawai Non ASN serta pemberian Honorarium Non ASN disusun dengan memperhatikan kebutuhan nyata, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sasaran kinerja;
7. Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut;



8. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2019;
9. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Kebijakan Belanja Langsung Tahun 2019

Perubahan Kebijakan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif dengan prioritas untuk:
 - a. Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2018 yang harus dianggarkan kembali dan yang telah ditentukan penggunaannya pada Perubahan APBD TA 2019;
 - b. Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi.
 - c. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 - 2021;
2. Penyesuaian anggaran kegiatan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum berjalan atau dilaksanakan, serta kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung prioritas;
3. Efisiensi anggaran kegiatan dilakukan pada belanja rutin yang tidak berdampak langsung ke kinerja Perangkat Daerah, antara lain pada Alat Tulis Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, dan perjalanan dinas.
4. Pelaksanaan Program/kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2019;

D.2.2 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH

Anggaran	Rp. 4.909.506.629.834,-
Realisasi	<u>Rp. 4.633.931.873.694,-</u>
Selisih kurang	Rp. (275.574.756.140,-)

Realisasi belanja sebesar 94,39 % atau kurang belanja sebesar 5,61 % dari Anggaran Belanja Tahun 2019.



NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Belanja Tidak Langsung	1.700.781.634.834	1.629.584.494.970	(71.197.139.864)	95,81	1.461.239.941.510
2	Belanja Langsung	3.208.724.995.000	3.004.347.378.724	(204.377.616.276)	93,63	3.045.113.688.234
	Belanja	4.909.506.629.834	4.633.931.873.694	(275.574.756.140)	94,39	4.506.407.629.744

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah :

Anggaran Rp.1.700.781.391.834,-

Realisasi Rp.1.629.584.494.891,-

Selisih kurang Rp (71.196.896.864,-)

Realisasi sebesar 95,81 % atau kurang belanja sebesar 4,19 % dari Anggaran

Belanja Tidak Langsung Tahun 2019.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Belanja Pegawai	1.610.690.666.834	1.556.244.417.540	(54.446.249.294)	96,62	1.364.214.020.347
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	71.680.190.000	60.329.765.676	(11.350.424.324)	84,17	81.899.001.477
5	Belanja Bantuan Sosial	14.110.000.000	10.784.116.000	(3.325.884.000)	76,43	14.051.304.000
6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.228.508.000	1.177.789.625	(1.050.718.375)	52,85	984.257.700
8	Belanja Tidak terduga	2.072.027.000	1.048.406.129	(1.023.620.871)	50,60	145.357.986
	Belanja Tidak Langsung	1.700.781.391.834	1.629.584.494.970	(71.196.896.864)	95,81	1.461.293.941.510

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

Pengendalian terhadap Realisasi Belanja Daerah tidak pelampauan dari target anggaran belanja, kecuali kondisi tertentu pada belanja wajib dan rutin dilaksanakan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi kurang dari target belanja apabila target sasaran output terpenuhi berarti terjadi efisiensi. Adapun selisih kurang Belanja pada Belanja Tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Selisih kurang diakibatkan adanya pegawai pensiun, mutasi pegawai, pegawai yang cuti dan meninggal.

2. Belanja Bunga

Belanja Bunga tidak dianggarkan.

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dianggarkan.

4. Belanja Hibah

Di tahun 2019 selisih kurang hibah antara lain



- a) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD berdasarkan hasil verifikasi siswa yang memenuhi kriteria tidak sebanyak siswa yang diusulkan untuk mendapatkan beasiswa.
- b) KPU dan Bawaslu dikarenakan adanya efisiensi
- c) PAMSIMAS berdasarkan hasil verifikasi ada yang tidak memenuhi persyaratan terkait dengan Badan Hukum dan Lokasi.

5. **Belanja Bantuan Sosial**

Di tahun 2019 selisih kurang disebabkan :

- a) Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan tidak memenuhi syarat karena data kurang lengkap.
- b) Santunan Kematian Warga dan Bantuan kepada korban bencana alam, bencana sosial dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah kejadian insidental sesuai dengan pengajuan warga.
- c) Beasiswa warga miskin SD MI, Beasiswa warga miskin SMP MTS, Beasiswa warga miskin SMA SMK, Beasiswa Bagi Warga Miskin Berprestasi SD/MI, Beasiswa Warga Miskin Berprestasi SMP/MTS, Beasiswa Miskin Berprestasi SMA/SMK dan Beasiswa Miskin Berprestasi Perguruan Tinggi, berdasarkan hasil verifikasi siswa yang memenuhi kriteria tidak sebanyak siswa yang diusulkan untuk mendapatkan beasiswa.

6. **Belanja Bagi Hasil**

Belanja Bagi Hasil tidak dianggarkan.

7. **Belanja Bantuan Keuangan**

Selisih kurang Belanja Bantuan Keuangan terkendala oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (tentang besaran bantuan per kursi perolehan dari Rp.1.500,- menjadi Rp.3.000,-)

8. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga direalisasikan sesuai peruntukannya dan pada tahun 2019 Belanja Tidak Terduga digunakan untuk restitusi BPHTB dan IMTA.

2. **BELANJA LANGSUNG**

Target dan Realisasi Belanja Langsung adalah :

Anggaran	Rp. 3.208.724.995.000,-
Realisasi	<u>Rp. 3.004.347.378.724,-</u>
Selisih kurang	Rp. (204.377.616.276,-)



Realisasi sebesar 93,63 % atau kurang sebesar 6,37 % dari target Belanja Langsung Tahun 2019 :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Belanja Pegawai	119.632.469.945	110.745.299.435	(8.887.170.510)	92,57	167.846.907.633
2	Belanja Barang dan Jasa	1.962.086.841.454	1.838.846.589.517	(123.240.251.937)	93,72	1.648.807.346.331
3	Belanja Modal	1.127.005.683.601	1.054.755.489.772	(72.250.193.829)	93,59	1.228.459.434.270
Belanja Langsung		3.208.724.995.000	3.004.347.378.724	(204.377.616.276)	93,63	3.045.113.688.234

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

Keterangan kurang belanja pada Belanja Langsung sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai :

Selisih kurang belanja pegawai disebabkan karena :

Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD.

Kurang Belanja Barang dan Jasa antara lain terdapat pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perikanan, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kecamatan Gunungpati dan Dinas Penataan Ruang.

b) Belanja Barang dan Jasa :

Pada belanja barang dan jasa selisih kurang disebabkan karena :

- 1) Belanja barang jasa disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Pemakaian telepon, listrik, dan air disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan.
- 3) Pengadaan dan penyediaan ATK, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dan pengadaan dan penyediaan peralatan gedung kantor disesuaikan dengan harga pasar dan menyesuaikan dengan *E-Catalog*.

Kurang Belanja Barang dan Jasa antara lain terdapat pada SKPD Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Genuk, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, RSUD, Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Ruang dan Sekretariat DPRD

c) Belanja Modal :

Pada belanja modal selisih kurang belanja disebabkan karena :

- 1) Pembelian barang modal memiliki kualitas, kuantitas dan pelaksanaannya di bawah standar indeks harga yang sudah ditentukan.

- 2) Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif yaitu dengan melakukan perbandingan harga yang sesuai dengan harga pasar dan wajar dengan melalui mekanisme lelang.
- 3) Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan.

Kurang Belanja Modal antara lain terdapat pada SKPD Dinas Perikanan, BPKAD, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja.

i. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Belanja Daerah

Pelaksanaan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 telah mencapai 94,39 % namun masih adanya permasalahan terkait dengan adanya beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan belum diikuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu sehingga bila direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu dan kondisi di lapangan.

Solusi dalam Pengelolaan Belanja Daerah adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dari pusat.

D.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

D.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

D.3.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2019 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SilPA). Penganggaran SilPA Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada:

- a. Penghitungan SilPA mengikat, yaitu SilPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2018 dan harus dianggarkan kembali;
- b. Perkiraan pelampauan pendapatan daerah di tahun anggaran 2018



- c. Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

D.3.1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Anggaran	Rp. 176.328.459.834,-
Realisasi	<u>Rp. 176.328.459.834,-</u>
Selisih	Rp. 0,- -

Atau mencapai 100,13 % dari Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	176.328.459.834	176.328.459.834	0	100,00	427.634.816.216
2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	25.000.000.000
	Penerimaan Pembiayaan	176.328.459.834	176.328.459.834	0	100,00	452.634.816.216

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019

D.3.1.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

D.3.1.4. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran	Rp. 27.000.000.000,-
Realisasi	<u>Rp. 27.000.000.000,-</u>
Selisih	Rp. 0,-

Atau mencapai sebesar 100 % dari Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	SELISIH	PERSENTASE	REALISASI 2018
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0.00	0
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23.000.000.000	23.000.000.000	0	100,00	4.292.787.000
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0.00	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0.00	0
5	Dana Bergulir	4.000.000.000	4.000.000.000	0	100,00	0
	Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000	27.000.000.000	0	100,00	4.292.787.000

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2019



D.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2019

D.4.1 Kebijakan SILPA Tahun Berjalan.

Kebijakan SILPA pada tahun berjalan bahwa SILPA tahun berjalan dijadikan pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan RAPBD. Apabila menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkan untuk menambah program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

D.4.2 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019.

Adapun perincian SILPA sebagai berikut :

a.	Realisasi Pendapatan	Rp. 4.565.770.644.232
	Realisasi Belanja	Rp. <u>4.633.931.873.694</u>
	Defisit Anggaran	Rp. (68.660.397.462)
b.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp. 176.328.459.834
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>27.000.000.000</u>
	Surplus Pembiayaan	Rp. 149.328.459.834
c.	Sisa Lebih Pembiayaan	Rp. 81.167.230.372

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2019 sebesar Rp.81.167.230.372,- terdiri dari :

1. Sisa Dana Perimbangan /Dana Transfer Tahun 2019 sebesar Rp.194.407.525.768,-
2. Sisa Belanja sebesar Rp. 275.574.756.140,-
Rincian SILPA Tahun 2019 terdiri dari :
 1. Defisit Pendapatan sebesar Rp. 194.407.525.768,- terdiri dari :
 - a. Defisit Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 61.912.074.597,-
 - b. Defisit Dana Perimbangan sebesar Rp. 91.007.532.380,-
 - c. Defisit Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 41.487.918.791,-



2. Sisa Belanja sebesar RP.275.574.756.140,- terdiri dari :
- a. Sisa Dana Perimbangan / Dana Transfer Tahun 2019 sebesar Rp. 38.959.256.612,- terdiri dari

1	DBHCHT Tahun 2019	Rp.	974.057.301
2	DAK		
	A DAK FISIK	Rp.	9.276.222.852
	- silpa 2010 - 2015	Rp.	8.170.146.000
	- silpa 2016	Rp.	13.111.552
	- silpa 2017	Rp.	560.111.800
	- silpa 2018	Rp.	125.025.500
	- silpa 2019	Rp.	407.828.000
	B DAK NON FISIK	Rp.	14.968.753.958
	silpa 2018	Rp.	23.197.826.767
3	BOS	Rp.	12.814.822.040
4	DID	Rp.	72.109.563
5	PAJAK ROKOK	Rp.	71.899.449
6	BANKEU PROV	Rp.	526.623.549
7	DAU TAMBAHAN	Rp.	254.767.900
JUMLAH		Rp.	38.959.256.612

NO	JENIS DANA TRANSFER	SILPA	KETERANGAN
DAK FISIK			
1	DINAS PENDIDIKAN DAK FISIK	Rp 8.522.613.800	- Silpa Bidang Pendidikan 2010-2015, dan 2017
	- DAK Fisik 2010 - 2015 (SD)	Rp 8.170.146.000	(subbidang SD) sebesar Rp. 8.425.868.800,00
	- DAK Fisik 2017 (SD)	Rp 255.722.800	untuk mencapai output bidang SD
	- DAK Fisik 2019 (SD,SKB)	Rp 96.745.000	
2	DINAS KESEHATAN	Rp 10.226.683	- Silpa Bidang Perkim tahun 2019 sebesar
	- DAK Fisik 2017	Rp 3.040.000	Rp. 245.000.000,00 untuk mencapai output
	- DAK Fisik (2016)	Rp 7.186.683	bidang perkim
3	DISPERKIM	Rp 348.715.000	
	- DAK Fisik 2017 (PERKIM)	Rp 43.115.000	- Untuk silpa DAK bidang lainnya sudah
	- DAK Fisik 2018 (PERKIM)	Rp 55.600.000	tercapai outputnya sebesar Rp. 605.354.052,00
	- DAK Fisik 2019 (PERKIM, AIR MINUM)	Rp 250.000.000	sehingga silpa bisa dialokasikan untuk bidang ybs
4	DPU	Rp 297.460.000	atau untuk bidanglain sesuai kebutuhan daerah
	- DAK Fisik 2017 (JALAN, IRIGASI)	Rp 258.234.000	
	- DAK Fisik 2018 (JALAN)	Rp 9.000.000	- Silpa akan dianggarkan di Perubahan 2020



NO	JENIS DANA TRANSFER	SILPA	KETERANGAN
	- DAK Fisik 2019 (JALAN, IRIGASI)	Rp 30.226.000	
5	RSUD (UD dan P3K2) 2016	Rp 5.924.869	
6	Disdalduk (DAK Fisik 2018)	Rp 1.490.000	
7	Dinas LH(DAK Fisik 2019)	Rp 29.909.000	
8	Dinas Perdagangan (DAK Fisik 2018)	Rp 59.883.500	
	- DAK Fisik 2018	Rp 58.935.500	
	- DAK Fisik 2019	Rp 948.000	
JUMLAH DAK FISIK		Rp 9.276.222.852	
DAK NON FISIK			
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 13.293.338.035	Silpa diperhitungkan dengan pagu alokasi DAK Non Fisik 2020 sehingga transfer yang akan masuk adalah pagu masing-masing OPD di APBD Murni 2020 dikurangi silpa
	- DAK non fisik PAUD	Rp 4.118.773.100	
	- DAK non fisik TPG	Rp 5.041.962.035	
	- DAK non fisik TAMSIL	Rp 2.351.425.000	
	- DAK non fisik Kesetaraan	Rp 1.781.177.900	
2	DISDALDUK DAN KB	Rp 7.558.424	
	- BOKB	Rp 7.558.424	
3	CAPIL	Rp 408.826.899	
	- ADMINDUK	Rp 408.826.899	
4	DINKOP DAN UMKM	Rp 23.840.733	
	- PK2UKM	Rp 23.840.733	
5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 5.472.500	
	- PARIWISATA	Rp 5.472.500	
6	DKK	Rp 1.229.717.367	
	- BOK	Rp 149.984.200	
	- Akreditasi Puskesmas	Rp 335.099.985	
	- Akreditasi Labkesda	Rp 120.251.384	
	- Jampersal	Rp 624.381.798	
JUMLAH DAK NON FISIK		Rp 14.968.753.958	
BOS			
	- SD	Rp 6.482.304.288	
	- SMP	Rp 6.332.517.752	
		Rp 12.814.822.040	
CHT		Rp 974.057.301	Silpa dari OPD akan dialokasikan d Perubahan Anggaran 2020
BANKEU		Rp 526.623.549	silpa Rp. 310.000.000,00 dianggarkan utk Disdik silpa Rp. 190.079.190,00 dianggarkan utk Distaru Rp. 26.544.359,00 merupakan silpa bebas
PAJAK ROKOK		Rp 71.899.449	Akan dianggarkan di Perubahan 2020 sesuai kebutuhan daerah



NO	JENIS DANA TRANSFER	SILPA	KETERANGAN
DID		Rp 72.109.563	silpa bebas
DAU TAMBAHAN		Rp 254.767.900	Akan dianggarkan di Perubahan 2020 sesuai kebutuhan daerah
	JUMLAH	Rp 38.959.256.612	

2. Sisa belanja sebesar Rp. 41.708.805.760,- terdiri dari :
- Kegiatan yang tidak dilaksanakan (0%) sebesar Rp.3.510.952.400,- pada OPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penataan Ruang, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Genuk, Kecamatan Tugu, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Selatan.
 - Efisiensi atau sisa dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD sebesar Rp. 38.197.853.360,-

BAB IV
PENUTUP**A. KESIMPULAN**

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kota Semarang Tahun 2019 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Pemerintah Kota Semarang. Seluruh kerja keras dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Semarang melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif.
2. Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019 diukur dengan pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja Pemerintah Kota Semarang berdasarkan realisasi tahun 2019 dengan hasil **“sangat baik”**.
3. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
MISI I				
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS				
TUJUAN 1				
MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA				
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,40	83,19	100,96	82,01**
Rata-rata Capaian Sasaran	82,40	83,19	100,96	Sangat Tinggi
SASARAN 1 :				
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT				
Angka Harapan Lama Sekolah	14,92	15,51	103,95	15,50
Rata-Rata Lama Sekolah	10,79	10,52	97,50	10,51
Angka Harapan Hidup	77,23	77,25	100,03	77,21
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	100,50	Sangat Tinggi
SASARAN 2 :				
MENINGKATNYA KEARIFAN BUDAYA LOKAL				
Tingkat Kearifan Budaya Lokal	49,70 %	84,75 %	170,52	73,95
Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	49,70%	84,75%	170,52	73,95
Rata-rata Capaian Sasaran	49,70%	84,75%	170,52	Sangat Tinggi
TUJUAN 2				
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97	4,54	108,65	5,29
Rata-rata Capaian Sasaran	4,97	4,54	108,65	Sangat Tinggi
SASARAN 3 :				
MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING TENAGA KERJA				
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,63	66,42	95,39	65,56
Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	80,00	87,50	109,38	68,00
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	102,39	Sangat Tinggi
SASARAN 4 :				
MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN				
Angka Kemiskinan	4,67	3,98	114,78	4,14
Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang)	18,19	13,80	124,13	17,51
Persentase Penanganan PMKS	94,00	100,00	106,38	83,94
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	115,09	Sangat Tinggi



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
SASARAN 5 :				
MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN				
Tingkat Partisipasi Masyarakat	81,17	82,17	101,23	81,17
Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	81,17	82,17	101,23	81,17
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	95,55	98,51	95,69
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	100,32	Sangat Tinggi
MISI 2				
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.				
TUJUAN 3				
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI				
Indeks Reformasi Birokrasi	> 68	68,86*	101,26	68,86
Rata-rata Capaian Sasaran	> 68	68,86*	101,26	Sangat Tinggi
SASARAN 6				
TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI				
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	83,83	101,00	83,25
Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP
Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	60/B	68,12/B	113,53	67,92/B
Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	> 3 / ST	3,4000 / ST*	113,20	3,4142 / ST
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	106,93	Sangat Tinggi
TUJUAN 4				
TERWUJUDNYA KONDUSIVITAS WILAYAH				
Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	82,17	96,15	117,01	82,17
Rata-rata Capaian Sasaran	82,17	96,15	117,01	Sangat Tinggi
SASARAN 7 :				
MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT				
Angka Kriminalitas	1934	1151	140,49	1443
Rata-rata Capaian Sasaran	1934	1151	140,49	Sangat Tinggi
MISI 3				
MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.				
TUJUAN 5				
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KOTA YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN				
Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	82,17 %	96,15 %	117,01	78,32
Rata-rata Capaian Sasaran	82,17 %	96,15 %	117,01	Sangat Tinggi
SASARAN 8 :				
TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG BERDAYA GUNA				
Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	65,00	65,00	100,00	46,00
Persentase kesesuaian tata ruang	83,00	95,59	115,17	82,00
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	107,59	Sangat Tinggi
SASARAN 9 :				
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA				
Persentase kawasan banjir dan rob	4,05	1,27	168,64	4,37
Jumlah titik/ruas rawan macet	4	4	100,00	5
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	134,32	Sangat Tinggi
SASARAN 10				
TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	51,00	62,88	123,29	51,94
Rata-rata Capaian Sasaran	51,00	62,88	123,29	Sangat Tinggi
SASARAN 11				
TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN YANG BERKUALITAS				
Persentase lingkungan permukiman sehat	97,90	96,47	98,54	94,92
Rata-rata Capaian Sasaran	97,90	96,47	98,54	Sangat Tinggi
SASARAN 12				
MENINGKATNYA KETANGGUHAN BENCANA				
Indeks Resiko Bencana	150,88	130,60	113,44	130,60
Rata-rata Capaian Sasaran	150,88	130,60	113,44	Sangat Tinggi



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
	TARGET	REALISASI	%	
MISI IV MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF				
TUJUAN 6 MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS EKONOMI LOKAL				
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,16	6,86	111,36	5,64
Rata-rata Capaian Sasaran	6,16	6,86	111,36	Sangat Tinggi
SASARAN 13 MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DAN JASA UNGGULAN				
Nilai investasi	18.699.000	36.534.709,11	195,38	27.549.279,90
Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	31,27	30,74	98,31	31,80
Nilai Ekspor	1.400.434.987,00	1.101.478.622,00	78,65	1.163.718.499,18
Persentase peningkatan kunjungan wisata	8,00	26,62	332,75	8,60
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	176,27	Sangat Tinggi
SASARAN 14 MENINGKATNYA NILAI PRODUK UNGGULAN DAERAH				
Kontribusi Katagori Industri Pengolahan terhadap PDRB	27,46	27,44	99,93	26,74
Jumlah Wilayah Produk unggulan Daerah (Sentra / Kecamatan)	6	6	100,00	4
Rata-rata Capaian Sasaran	-	-	99,97	Sangat Tinggi

Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2019 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen

- Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang yang sukses dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari anggota DPRD dan masyarakat Kota Semarang.

B. UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

- Mengingat masih terdapat beberapa masalah yang belum dapat terselesaikan secara maksimal dikarenakan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, maka dibutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan
- Kami memiliki harapan besar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang di masa yang akan datang dalam mewujudkan *Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju Masyarakat Semakin Sejahtera*

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang untuk tahun 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Semarang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Semarang, Maret 2020



Ir. WAHYU PERMATA RUSDIANA, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641221 199001 2 001